

HEGEMONI PEMERINTAH TERHADAP PEDAGANG PASAR (Analisis Dominasi Pemerintah Pasca Revitalisasi Pasar Kite Sungailiat Menurut Antonio Gramsci)

Puspita Sari, Citra Asmara Indra, S.Sos., M.A.

Abstrak

Hegemoni merupakan dominasi atas satu kelas terhadap kelas lain disebabkan secara ideologis dan politis. Hegemoni dilakukan melalui mekanisme konsensus bukan dengan penindasan terhadap kelas sosial lain. Terdapat Hegemoni pemerintah terhadap pedagang pasar di Pasar *Kite* Sungailiat. Kekuasaan intelektual yang digunakan oleh pemerintah mampu mempengaruhi kesadaran pedagang untuk mengikuti kebijakan pemerintah. Pedagang yang merasa dirugikan dengan kebijakan tidak mampu untuk melakukan perlawanan. Perlawanan pedagang dapat diatasi pemerintah dengan membentuk konsensus antara pemerintah dan pedagang. Konsensus dilakukan untuk mempengaruhi pemikiran pedagang agar mengikuti aturan yang dibuat pemerintah

Kata Kunci : Hegemoni, Revitalisasi, Konsensus

Abstract

Hegemony is dominance of one class over another class, caused of repression against other social class. That the government's hegemony over market vendors in Pasar Kite Sungailiat area does exist. The intellectual power used by the government can affect the vendor's awareness to submit to the government's rules. Vendors who are disadvantaged by the policy are unable to fight back. The government can use consensus between the government and the vendors to handle the vendors resistance. This consensus can influence the opinion of the vendors so that they will obey the rules.

Keywords : Hegemony, Revitalization, consensus

A. Latar Belakang

Pasar tradisional menjadi tumpuan masyarakat saat ini kurang memiliki daya tarik jika dibandingkan dengan pasar modern yang semakin menjamur. Konsep pasar modern yang identik dengan kotor, kumuh, bau dan semrawut menyebabkan masyarakat tidak nyaman untuk berbelanja. Pasar modern yang teratur dan bersih menyebabkan masyarakat saat ini lebih memilih beralih dari pasar tradisional, walaupun harga di pasar modern jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga barang di pasar tradisional. Dalam meminimalisir kesenjangan antara pasar tradisional dan pasar modern, pemerintah kemudian mengadakan revitalisasi pasar.

Revitalisasi merupakan proses memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian yang dulunya

pernah viral atau hidup, akan tetapi kemudian mengalami degradasi. Proses revitalisasi dan pembangunan dalam suatu kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial (Sukriswanto, 2012: 14). Revitalisasi pasar berarti membangun kembali pasar tradisional yang semakin menurun daya tariknya bagi masyarakat kemudian menjadikannya pasar modern atau semi modern untuk kembali meningkatkan minat masyarakat terhadap pasar tersebut.

Namun, tidak seluruh revitalisasi pasar dapat berjalan dengan baik. Banyak kasus yang menyatakan revitalisasi pasar hanya akan merugikan pedagang dan memberikan keuntungan bagi pemerintah sebagai pemegang kendali pengelolaan pasar. Pemerintah mendominasi pengelolaan pasar dengan kekuatan intelektual

yang dimiliki atau disebut hegemoni. Hegemoni merupakan istilah yang digunakan oleh Antonio Gramsci untuk menggambarkan suatu dominasi antar golongan satu atas golongan lain (Norrochman, 2008: 2). Hegemoni berhubungan dengan penyusunan kekuatan pemerintah sebagai kelas diktator. Menurut Hegel, masyarakat diatur dan dikuasai oleh kapasitas intelektual super dari pemerintah yang merupakan tatanan tertinggi dari etika dan moral (Patria, 2015: 35).

Salah satu pasar tradisional yang melakukan revitalisasi pasar yaitu Pasar *Kite* Sungailiat. Pasar ini awalnya merupakan pasar tradisional yang kemudian dilakukannya revitalisasi menjadi pasar semimodern. Dalam proses revitalisasi pasar, terindikasi adanya hegemoni antara pemerintah terhadap pedagang pasar tersebut. Pemerintah membuat kesepakatan bersama pedagang yang seharusnya dilaksanakan dengan baik, namun realitasnya banyak pedagang yang tidak puas dengan hasil revitalisasi pasar.

Pasar *Kite* tidak mengalami perkembangan yang cukup baik seperti yang diharapkan dari hasil revitalisasi. Proses revitalisasi dirasakan tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada di pasar tradisional bahkan menimbulkan masalah-masalah baru. Masalah ini antara lain terkait kondisi bangunan yang tidak sesuai, jumlah kios yang meningkat, hingga pembagian lapak yang tidak sesuai kesepakatan.

Pedagang secara sadar harus mengikuti peraturan pemerintah yang mengikat, lebih dari itu pedagang harus memberikan persetujuan terhadap peraturan dan kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah. Namun disisi lain, pedagang memiliki kesadaran untuk terlepas dari dominasi pemerintah yang memaksa. Pemerintah sebagai golongan yang mendominasi berupaya mengambil keuntungan dari pedagang sedangkan pedagang tidak memiliki posisi tawar untuk melawan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Melihat adanya hegemoni yang dibentuk oleh pemerintah terhadap pedagang pasar pasca

revitalisasi, sehingga dapat dirumuskan masalah: Bagaimanakah bentuk-bentuk hegemoni yang dilakukan pemerintah terhadap pedagang Pasar *Kite* Sungailiat pasca revitalisasi?

C. Kerangka Teori

Teori Hegemoni milik Antonio Gramsci digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk hegemoni pemerintah terhadap pedagang Pasar *Kite* Sungailiat pasca revitalisasi. Istilah Hegemoni digunakan oleh Gramsci untuk menggambarkan bahwa dominasi satu kelas atas kelas lain disebabkan secara ideologis dan politis. Meskipun paksaan politik (*coercion*) selalu berperan, ideologi lebih signifikan dalam mendapatkan persetujuan secara sadar (*consent*) dari kelas yang didominasi (Abercrombie, 2010: 253).

Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap kelas sosial lain. Ada berbagai cara yang dipakai, misalnya melalui institusi yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak struktur kognitif dari masyarakat. Pada hakikatnya Hegemoni merupakan upaya untuk menggiring orang-orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang telah ditentukan tanpa adanya paksaan secara kekerasan (Patria, 2015: 120-121).

Konsep hegemoni mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana masyarakat kapitalis modern diorganisasikan. Menurut Gramsci, Hegemoni merupakan suatu kesatuan kompleks dari kegiatan teori dan praktek, yang dengannya kelas yang berkuasa tak cuma membenarkan dan memelihara dominasinya tetapi mengatur untuk memenangkan konsensus aktif dari yang diatur. Dalam masyarakat kapitalis kontemporer, misalnya kelas pekerja memiliki kesadaran ganda (*dual consciousness*) kesadaran yang satu ditentukan oleh ideologi kelas kapitalis, kesadaran yang satu lagi revolusioner dan ditentukan oleh pengalaman mereka dalam masyarakat kapitalis. Dalam pandangan Gramsci, agar masyarakat kapitalis dapat digulingkan, kaum buruh harus terlebih dahulu menetapkan supremasi ideologi

mereka sendiri yang diturunkan dari kesadaran revolusioner. Kesadaran ganda yang dimiliki oleh kelas yang didominasi menurut Lenin hanya merupakan perlawanan yang spontan dan masih bersifat palsu (Abercrombie, 2010: 253).

D. Gambaran Umum

Pasar *Kite* Sungailiat berada di Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat. Pasar tradisional yang awalnya bernama Pasar Bawah ini merupakan pasar terbesar dan menjual berbagai jenis kebutuhan pokok dengan harga yang relative lebih murah. Pasar ini dibangun pada tahun 1970 dan belum pernah direnovasi sejak awal pembangunannya. Melihat kondisi bangunan pasar yang sudah tidak layak digunakan dan tidak dapat menampung jumlah pedagang yang semakin meningkat, pada tahun 2012 pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM) mengajukan rencana pembangunan pasar. Pengajuan dana ini akan digunakan untuk merevitalisasi pasar secara keseluruhan dan mengubah konsep pasar menjadi pasar semi modern.

Revitalisasi pasar digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasar dan juga meningkatkan daya tampung pasar. Peningkatan jumlah lapak pasar dibuat untuk menampung sejumlah pedagang maupun PKL yang sudah lama berdagang di pasar. Revitalisasi pasar juga membantu pemerintah untuk mendata sejumlah pedagang yang sebelumnya belum terdata secara lengkap.

Jumlah pedagang yang terdata dalam proses pendataan yaitu 536 pedagang dari keseluruhan sekitar 1000 pedagang. Pedagang ini merupakan pedagang yang sudah belasan tahun berdagang di pasar. Data kemudian digunakan untuk memudahkan proses pembagian lapak atau kios pasar. keterbatasan luas lokasi pasar, menyebabkan jumlah lapak yang dapat dibangun sebanyak 607 lapak. Keseluruhan jumlah lapak ini dibagi dalam 10 jenis lapak dengan ukuran berbeda disesuaikan dengan jenis dagangan.

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 16 miliar untuk revitalisasi Pasar *Kite* Sungailiat dari Dana Bantuan (DABA) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah sebagai pengelola dana bertanggung jawab untuk mengelola dana pembangunan tersebut. Perencanaan pembuatan denah pasar dan penyusunan anggaran sama sekali tidak melibatkan pedagang. Keseluruhannya diatur oleh pemerintah melalui UPT Pasar dan Dinas PU. Hal ini merupakan salah satu bentuk Hegemoni yang dilakukan pemerintah terhadap pedagang pasar dimana pedagang tidak bisa mengontrol atau melihat sejauh mana perkembangan dari pembangunan pasar. Pedagang hanya bisa menyetujui apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah sebagai pemegang kendali kekuasaan.

E. Hasil dan Pembahasan

Hegemoni merupakan bentuk dominasi pemerintah terhadap pedagang pasar. Dominasi yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan kekuasaan intelektual yang dimiliki sehingga pedagang dengan sadar mengikuti keinginan pemerintah. Adapun bentuk-bentuk hegemoni yang dilakukan pemerintah terhadap pedagang pasar yaitu :

1. Inisiasi dan proses revitalisasi pasar

Pasar Bawah memiliki peran penting bagi perekonomian ratusan pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya di pasar tersebut. Kondisi pasar yang memprihatinkan membuat pemerintah memutuskan untuk melakukan revitalisasi pasar secara keseluruhan. Proses revitalisasi pasar tidak secara langsung diterima oleh masyarakat khususnya pedagang Pasar Bawah. Butuh proses panjang yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan pedagang untuk menerima proses revitalisasi pasar.

Pedagang hanya meminta waktu 1 bulan sebelum pembongkaran pasar sampai selesai lebaran pedagang bersedia direlokasi sementara waktu namun, pemerintah tidak memikirkan kepentingan pedagang yang

takut kehilangan konsumennya. Proses pembangunan tetap berjalan sesuai dengan rencana awal pemerintah. Pedagang sebagai kelas yang didominasi tidak dapat berbuat banyak. Aturan juga menjalankan kekuasaan hegemoni yang mampu melanggengkan kekuasaan dari kelas dominan. Hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuasaan pemerintah sebagai kelas diktator.

Pemerintah dengan segala aturan yang ada secara tidak langsung telah melanggengkan dominasinya terhadap pedagang. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah digunakan untuk mendominasi pedagang sehingga pedagang harus mengikuti keinginan pemerintah. Pedagang tidak mampu menolak keinginan pemerintah dengan posisi tawar pedagang yang lemah. Pedagang harus tetap mengikuti keinginan pemerintah untuk pindah ke pasar sementara dan berharap tidak kehilangan konsumen mereka.

Pemerintah berusaha memperlihatkan kepada pedagang mekanisme pekerjaan mereka terkait pembangunan pasar. Pemerintah berulang kali harus mensosialisasikan kepada para pedagang terkait dengan aturan yang telah dibuat dalam proses revitalisasi pasar. pendekatan dengan kedekatan emosional seperti inilah yang digunakan pemerintah diawal proses revitalisasi agar para pedagang bersedia mentaati aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Aturan yang dibuat merupakan alat untuk menjamin kedudukan kelas atas, yang fungsinya secara politik meredam usaha-usaha kelas bawah untuk membebaskan diri dari penghisapan oleh kelas atas. Aturan yang telah dibuat pemerintah ini kemudian membuat pedagang dengan kesadaran mengikutinya. Pemerintah menahan perlawanan pedagang dengan membuat aturan-aturan yang dengan kesadaran harus disetujui oleh pedagang.

2. Penataan dan pembagian lapak

Penataan dan pembagian lapak meru-

upakan hal yang penting dalam proses revitalisasi pasar. Penataan lapak yang tidak sesuai dapat menyebabkan pasar menjadi tidak teratur dan kurang memiliki daya tarik. Pembagian lapak yang tidak adil juga akan membuat pedagang merasa dirugikan terlebih jika itu merupakan pedagang yang sudah lama berjualan di pasar. Penataan dan pembagian lapak harus dilakukan pemerintah dengan sesuai dan adil.

Penataan pasar sepenuhnya ditangani oleh pemerintah dalam hal ini pembuat desain pasar yaitu Dinas Pekerja Umum dan pihak pengembang. Penataan pasar disesuaikan dengan luas pasar yang tidak mengalami perubahan. Pemerintah meningkatkan jumlah lapak dan kios menjadi 607 buah. Jumlah lapak dan kios yang meningkat tentunya memperkecil ukuran lapak. Penataan lokasi lapak juga menjadi masalah lain. Pembangunan yang dilakukan dengan konsep kios dan lapak berderet menyebabkan banyak lapak yang lokasinya berada dibagian belakang. Hal ini tentunya menyebabkan banyak pembeli yang malas berbelanja ke bagian belakang terlebih dalam satu deretan kios atau lapak merupakan zona jenis dagangan yang sama.

Penataan kios dan lapak yang tidak tepat ini tentunya menyebabkan kerugian terlebih bagi para pedagang yang mendapatkan lokasi dibagian belakang. Apalagi pada saat pembuatan desain pasar, pemerintah sama sekali tidak melibatkan pedagang. Pedagang tidak bisa ikut campur dan hanya bisa menerima keputusan yang telah dibuat pemerintah selama pelaksanaan revitalisasi pasar. Untuk meminimalisir kekecewaan pedagang, pemerintah kemudian melakukan konsensus bersama perwakilan pedagang.

Pemerintah kembali melakukan konsensus bersama pedagang pada saat revitalisasi pasar sedang dilakukan. Konsensus kali ini berkaitan dengan kesepakatan pembagian lapak. Luas pasar yang tidak mengalami penambahan tentunya berdampak pada

jumlah lapak pedagang yang tidak banyak bertambah sedangkan jumlah pedagang terus meningkat. Maka, pemerintah membuat strategi dalam pembagian lapak agar tidak ada protes dari pedagang.

Pada konsensus yang dilakukan di ruang serbaguna Polman, berisi kesepakatan terkait dengan pembagian lapak pasar. Melihat dari jumlah data pedagang pasar sudah dipastikan tidak semua pedagang akan mendapatkan lapak. Menurut Peraturan Menteri dalam negeri tahun 2012 pasal 22 huruf a : memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam dilakukan renovasi dan/atau relokasi pasar tradisional.

Pedagang di Pasar *Kite* dibagi kedalam 3 kelompok yakni pedagang resmi, pedagang lama dan PKL. Pedagang resmi merupakan pedagang yang sudah memiliki kontrak bangunan di pasar dan izin usaha, pedagang lama merupakan pedagang yang sudah lama berjualan di pasar namun tidak memiliki izin usaha, dan PKL adalah pedagang yang berjualan disepertaran pasar baik dengan grobak atau lesehan, tidak memiliki lapak dagangan didalam bangunan pasar.

Konsensus ini kemudian memutuskan untuk memprioritaskan pembagian lapak kepada pedagang resmi dan pedagang lama, jika masih ada sisa lapak belum terisi baru akan dibagikan kepada PKL. Kesepakatan yang didapat pada konsensus terkait pembagian lapak ini yaitu pembagian lapak akan dilakukan dengan cara mengundi nama pedagang atau sistem cabut lot. Sistem ini merupakan sistem paling adil ketimbang penentuan dilakukan langsung.

Sistem cabut lot diutamakan bagi pedagang resmi dan pedagang lama terlebih dahulu, kemudian baru bagian untuk PKL. Pedagang resmi diprioritaskan karena mereka sebelumnya sudah memiliki kontrak dan lapak sendiri. Selanjutnya bagi pedagang lama yang tidak memiliki lapak, namun sudah berjualan puluhan atau belasan tahun di pasar. Sisa lapak yang masih ada barulah

diperuntukkan bagi PKL atau pedagang baru. Pelaksanaan cabut lot dilakukan di kantor Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Bangka dengan disaksikan oleh beberapa tokoh masyarakat dan kepala dinas terkait.

Strategi pembagian lapak ini dilakukan untuk mencegah protes dari pedagang jika mendapatkan lapak dilokasi yang tidak sesuai harapan mereka. Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan persetujuan pedagang dalam pembagian lapak yaitu dengan melakukan sosialisasi. Pemerintah melalui UPT Pasar setiap hari mendatangi pedagang dan mensosialisasikan terkait dengan pembagian lapak dan pembangunan pasar. Pendekatan dengan sistem ini akan memudahkan pemerintah untuk mendapat perhatian dan persetujuan dari pedagang.

Strategi yang digunakan pemerintah sebetulnya tidak berhasil sepenuhnya. Banyak pedagang lama yang masih belum mendapatkan lapak di pasar, selain itu pedagang juga mengeluh karena lokasi lapak yang tidak strategis. Pedagang lama yang sejak awal sudah memiliki izin di pasar merasa dirugikan karena banyak dari mereka malah mendapatkan tempat yang kurang strategis dalam pembagian lapak. Namun, pedagang tidak dapat berbuat banyak karena posisi tawar pedagang terlalu kecil untuk melawan dominasi pemerintah dalam penanganan pembagian lapak.

3. Konsensus sepihak pemerintah terhadap pedagang

Konsensus merupakan kesepakatan kata atau pemufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, yang dicapai melalui kebulatan suara. Konsensus dilakukan sebelum pengambilan keputusan atau pembuatan sebuah kebijakan. Konsensus menjadi titik tolak dari konsep hegemoni milik Antonio Gramsci. Gramsci memandang hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap

kelas sosial lainnya.

Kondisi pengelolaan Pasar Kite juga dilakukan pemerintah melalui jalan konsensus dengan pedagang. Pemerintah berupaya melakukan pembicaraan dalam pembuatan kebijakan pasar. Kepemimpinan intelektual pemerintah membuat keputusan yang dibuat pemerintah dalam konsensus dengan mudah diterima begitu saja oleh pedagang tanpa merasa pedagang akan banyak mengalami kerugian.

Gramsci lebih melihat hipotesis tercipta karena adanya dasar persetujuan. Sebuah konsensus yang diterima kelas pekerja sesungguhnya bersifat pasif karena sesungguhnya kelas yang terhegemoni kekurangan basis konseptual yang membentuk kesadaran yang memungkinkan mereka memahami realitas sosial secara efektif. Konsep hegemoni secara fundamental menyangkut tindakan memproduksi suatu wawasan-dunia yang diterima oleh kelas-kelas yang rendah dan beraliansi.

Hegemoni dapat diartikan sebagai suatu kepemimpinan intelektual dari pemerintah. Pemerintah tidak mendominasi pedagang dengan cara kekerasan, namun dengan melakukan pendekatan-pendekatan dan melakukan konsensus bersama pedagang pasar. Konsensus ini merupakan suatu konsensus sepihak yang dilakukan pemerintah terhadap pedagang pasar. Pedagang diharuskan menerima keputusan yang diambil dalam konsensus dengan kesadaran mereka, walaupun sesungguhnya pedagang tidak menginginkan hal tersebut. Pemerintah mampu membentuk suatu kebijakan baru atas dasar kesadaran dan kesepakatan dengan pedagang pasar meskipun pedagang tidak memahami efek kedepan dari kebijakan yang dibuat pemerintah.

Kelompok yang didominasi sesungguhnya memiliki kesadaran ganda, (*dual consciousness*), yaitu kesadaran ditentukan oleh ideologi dan kesadaran revolusioner. Kelas yang mendominasi masyarakat

dengan kapasitas intelektual yang dimiliki. Kesamaan ideologi dibentuk melalui lembaga-lembaga seperti sekolah, tokoh masyarakat dan pemerintahan untuk menuntun masyarakat agar tidak melakukan perlawanan. Hal ini yang menyebabkan kesadaran revolusioner masyarakat tidak dapat dimunculkan.

Pemerintah sebagai kelas yang mendominasi masyarakat memiliki kepemimpinan intelektual. Pemerintah yang memiliki pendidikan tinggi mampu menggunakan bahasa untuk membentuk konsensus dalam masyarakat. Pemerintah dalam hal ini menggunakan bahasan dan kepemimpinan intelektual untuk mendapatkan persetujuan pedagang. Persetujuan yang dibentuk merupakan hasil dari kesadaran pedagang, bukan atas dasar paksaan pemerintah. Namun hal ini yang kemudian membuat pedagang banyak dirugikan terlebih dengan keadaan pasar yang tidak sesuai dengan keinginan pedagang.

Proses revitalisasi Pasar Sungailiat dilakukan selama setengah tahun dengan melalui proses yang panjang. Selama proses pembangunan pasar, pemerintah mencoba melakukan pendekatan dengan pedagang dan masyarakat melalui jalan konsensus. Konsensus diperlukan untuk memperoleh kesepakatan bersama terkait dengan kebijakan yang dibuat pemerintah. Konsensus juga digunakan untuk melihat peran aktif pedagang dalam pembangunan pasar.

4. **Kesukarelaan pedagang pengelolaan pasar**

Pasca revitalisasi mulai muncul protes-protes dari berbagai pihak. Protes ini berkaitan dengan kondisi fisik bangunan dan pengelolaan pasar. Pedagang banyak mengeluhkan kondisi bangunan yang tidak sesuai dengan anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemprov. Semua pendanaan sudah diatur dalam Rencana Anggaran Biaya

(RAB) sesuai dengan kualitas dan jumlah barang. Namun pada pelaksanaannya banyak sekali barang yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis didalam RAB.

Banyak protes dari yang dikemukakan oleh pedagang maupun masyarakat. Bahkan wakil ketua DPRD Bangka Belitung yang datang mengunjungi Pasar *Kite* Sungailiat juga protes dengan kondisi pasar. Dalam RAB dituliskan anggaran untuk kran air sebesar RP 85.000,- sedangkan kran yang digunakan hanya yang seharga Rp 5.000,-. Selain kran air, keramik untuk lantai juga tidak sesuai dengan RAB. Keramik yang digunakan sangat licin dan tidak sesuai jika digunakan dilokasi pasar. Kondisi pasar yang becek menyebabkan banyak pembeli yang tergelincir hingga terjatuh akibat kondisi kramik yang licin (Bangkanew, 17 Januari 2016).

Kondisi bangunan yang tidak sesuai dengan RAB awal tentunya menurunkan kualitas bangunan pasar. Pedagang yang setiap harinya bekerja di pasar tentu kecewa ditambah lagi dalam proses pelaksanaan pembangunan pedagang tidak pernah dilibatkan. Bangunan pasar yang tertutup membuat suasana didalam pasar sangat panas karena kurangnya saluran udara. Pada musim hujan juga banyak bagian yang bocor. Pedagang mengeluhkan kurang baiknya pembangunan pasar karena belum setahun tapi bangunan sudah banyak yang rusak.

Pedagang merasa lebih nyaman dengan kondisi pasar lama jika dibandingkan dengan sekarang. Kondisi bangunan yang tertutup menjadikan pasar terkesan pengap dan panas pada musim panas. Pada saat musim hujan, banyak bagian yang bocor. Pedagang sudah melapor masalah ini kepada pihak pengelola pasar, plafon yang bocor sudah diperbaiki tapi baru seminggu diperbaiki bagian tersebut kembali bocor. Pengerjaan yang asal-asalan membuat pedagang kecewa dengan hasil pembangunan pasar. Namun sebagai pedagang kecil, mereka tidak bisa

melakukan apa-apa karena pasar merupakan tempat penghidupan bagi para pedagang.

Masalah juga dirasakan dari ukuran lapak pedagang yang terlalu sempit terlebih pada bagian meja sayur, ikan, ayam dan daging. Ukuran lapak yang dibuat didalam bangunan utama pasar ini hanya 90 cm x 155 cm. Pedagang tentunya protes dengan kecilnya ukuran lapak. Pemerintah memang mengubah ukuran lapak yang awalnya 200 cm x 150 cm agar pasar bisa menampung jumlah pedagang yang semakin meningkat. Tetapi dengan ukuran lapak sekarang, pedagang kesulitan meletakkan barang dagangan mereka terutama pedagang sayur.

Lapak dengan ukuran semakin diperkecil tentunya menyulitkan pedagang. Pedagang terpaksa meletakkan barang dagangan mereka dibawah dan sedikit menutup jalan pembeli. Tetapi saat ada pemeriksaan dari pihak keamanan para pedagang ini akan terkena sanksi. Sampai sejauh ini tidak ada upaya pemerintah untuk menangani keluhan pedagang pasar. Kekecewaan pedagang karena sejak awal mereka sudah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah namun tidak ditanggapi. pedagang tidak bisa berbuat banyak, hanya mengikuti setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tanpa merasakan mereka telah dirugikan dengan hal tersebut.

Tata letak pembangunan kios juga menjadi masalah dalam pembangunan pasar. Kios-kios yang dibangun berjejer kebelakang sehingga banyak pengunjung malas untuk membeli ke kios dibagian belakang. Banyak pedagang yang berjualan di kios tersebut mengeluh sepi pembeli. Hal ini juga dirasakan oleh pedagang yang berjualan di pasar kampung bagian kanan pasar. Pasar kampung yang berada disudut pasar dengan ukuran lapak hanya 70cm x 80cm dengan akses jalan bagi pembeli terlalu sempit, akibatnya pembeli malas untuk masuk ke pasar kampung. Dampaknya bagi pedagang yaitu penurunan omset sehingga banyak

pedagang yang mengeluh mereka selalu mengalami kerugian.

Pedagang yang sudah memiliki lapak tidak diperbolehkan menyewakan lapak atau kios mereka kepada orang lain. Kios yang sudah dikontrak harus digunakan langsung oleh pedagang yang memiliki kontrak bangunan tersebut. Ada 2 jenis harga yang harus dibayarkan oleh pedagang yakni uang sewa kios atau lapak dan uang retribusi harian. Uang sewa dibayarkan dalam setahun atau sesuai dengan kontrak yang telah dibuat. Jumlah yang harus dibayar disesuaikan dengan luas kios atau lapak. Pada meja dengan ukuran 90cm x 155cm ditarik tarif pertahun Rp 600.000,- untuk kios dengan ukuran 9m² – 12m² ditarik tarif Rp 2.000.000,- dan kios dengan ukuran 4m² tarifnya Rp 650.000 per tahun (UPT Pasar Sungailiat).

Berkaitan dengan masalah retribusi ada 2 jenis retribusi yang ditarik oleh UPT Pasar yaitu retribusi jasa umum dan jasa usaha. Retribusi jasa umum tertulis dalam perda nomor 4 tahun 2011 bagian keempat pasal 54 ayat satu menjelaskan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis, luas ukuran dan jangka waktu pemakaian dan masing-masing fasilitas serta kelas pasar yang digunakan. Tarif yang harus dibayarkan oleh pedagang sudah ditetapkan dalam perda tersebut dan dibayarkan setiap harinya. Selain retribusi jasa umum, setiap hari pedagang juga harus membayar pajak retribusi kebersihan dan keamanan sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Retribusi kebersihan dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan penarikannya diserahkan kepada UPT Pasar. walaupun sudah ada retribusi kebersihan, pedagang masih mengeluhkan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap kebersihan pasar. Banyak sampah khususnya sisa sayuran yang menumpuk disekitaran belakang pasar dan dekat pasar kampung.

Petugas kebersihan dirasa kurang cepat untuk bertindak sehingga sampah terus menumpuk dan menyebabkan bau tidak sedap menyebar. WC umum juga menambah masalah bagi pedagang, saluran air yang kurang baik menyebabkan air dari WC mengalir keluar dan menimbulkan aroma tidak sedap.

Banyak pembeli yang mulai beralih ke Pasar Higenis yang pengelolaannya ditangani oleh pihak swasta. Pasar Higenis dikelola dengan baik, suasana lebih nyaman dan bersih jika dibandingkan dengan Pasar *Kite*. Hal serupa juga dikatakan oleh kepala Disperindagkop melalui Bangkapos. Pak Syarifudin pernah mengatakan kebersihan pasar memang kalah bersih dibandingkan Pasar Higenis, namun pemerintah sudah berupaya bekerja sama dengan pihak kebersihan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH). Pemerintah juga menginginkan kerja sama dengan pedagang untuk menjaga kebersihan pasar (Bangkapos.com, 4 Agustus 2015).

Pembeli yang datang ke Pasar *Kite* mulai menurun. Kondisi pasar yang membuat pembeli kurang nyaman membuat banyak pembeli mulai beralih berbelanja di Pasar Higenis yang pengelolaannya lebih baik sehingga kondisinya lebih nyaman. Penurunan jumlah pembeli tentunya sangat berpengaruh dengan keuntungan yang diperoleh pedagang. Pada akhirnya pedagang harus rela mengurangi jumlah dagangan mereka ketimbang harus merugi karena jumlah dagangan selalu bersisa.

Banyak keluhan dari pembeli terhadap pembangunan pasar yang terlihat kacau. Apalagi jika melihat pengelolaan yang kurang diperhatikan pemerintah sehingga terkesan dibiarkan bergitu saja. Pembeli merasa kecewa dengan kondisi bangunan yang tidak lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi pasar sebelum adanya renovasi. Hal ini pula yang membuat banyak pembeli yang beralih dari Pasar *Kite* ke

pasar lain.

Pedagang pasar tidak dapat berbuat banyak dengan segala macam keluhan yang mereka hadapi. Pedagang mengikuti apa keinginan pemerintah agar mereka tidak kehilangan tempat bagi pedagang mencari nafkah. Gramsci menjelaskan bahwa konsep Hegemoni menganalisis bagaimana kapitalis modern diorganisasikan pada masa dulu dan sekarang. Pemerintah dalam hal ini mengorganisir para pedagang untuk mengikuti setiap aturan yang telah dibuat, dan membuat pedagang tidak dapat melakukan pembontakan. Kepentingan kedua belah pihak menyebabkan pemerintah sebagai kelas diktator dapat mengontrol protes dari pedagang tanpa adanya kekerasan. Kekuatan intelektual yang dimiliki oleh pemerintah mampu melanggengkan kekuasaan pemerintah didalam masyarakat, yang dalam hal ini pedagang.

Pedagang yang kebanyakan merupakan orang dengan pendidikan rendah dengan mudah didekati oleh pemerintah dan secara sadar pedagang mengikuti saja keinginan pemerintah. Kerugian yang kebanyakan dirasa oleh pedagang yaitu perubahan desain pasar. Bangunan pasar yang dulunya terbuka membuat suasana didalam pasar tidak panas dan sumpek berbeda dengan sekarang pasar jadi lebih tertutup. Penambahan jumlah kios dengan susunan kios tidak sesuai menyebabkan pedagang yang mendapatkan kios dibelakang sangat dirugikan.

Melihat karakteristik pembeli yang ada di Bangka khususnya, mereka akan mencari kios atau lapak yang dekat jika dibandingkan harus berjalan terlalu jauh kebagian belakang. Ditambah dengan dibuatnya zona-zona bagi pedagang, dengan bergabungnya banyak pedagang dengan jenis barang dagangan yang sama tentu pembeli akan mencari yang paling dekat dengan lokasi parkir kendaraannya.

Setelah berjalan beberapa lama, terdapat perlawanan yang dilakukan oleh

pedagang Pasar *Kite* Sungailiat. Perlawanan ini dilakukan dengan spontan akibat dari kekecewaan pedagang terhadap pembangunan dan pengelolaan pasar. Bentuk perlawanan yang dilakukan hanya sebatas protes pedagang terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah dan dirasakan merugikan pedagang.

Bentuk perlawanan pedagang terhadap kebijakan pemerintah hanya sebatas protes-protes yang mereka sampaikan. Pedagang memilih untuk berjualan disepanjang lorong pasar sebagai protes mereka dan memilih meninggalkan kios yang sudah dikontrak. Pedagang memang tidak bisa berbuat banyak ditambah dengan kurangnya asosiasi pedagang. Pedagang tidak memiliki posisi tawar yang baik sehingga banyak pedagang kecewa dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Perlawanan yang dilakukan pedagang hanya bersifat sementara dan terus berulang. Pedagang akan berjualan disepanjang lorong pasar, tetapi saat adanya penertiban mereka akan kembali ke lapak mereka. Pemerintah tidak pernah melakukan kekerasan dalam penanganan pedagang. Pemerintah berusaha melakukan pendekatan untuk menimbulkan kesadaran pedagang. Namun tetap saja pemerintah tidak bisa memberikan solusi terbaik bagi keadaan pedagang. Pedagang harus mau mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah walaupun dalam aturan tersebut memang tidak ada sanksi tertulis bagi pelanggarnya. Disinilah muncul kesukarelaan pedagang untuk mengikuti aturan pemerintah dalam pengelolaan Pasar *Kite* Sungailiat.

F. Penutup

Konsep revitalisasi Pasar *Kite* Sungailiat yaitu dengan pembangunan berbasis masyarakat dimana yang menjadi perhatian adalah keinginan masyarakat. Namun yang terjadi, pembangunan yang dilakukan merupakan pembangunan dari atas dimana pemerintah mengambil alih seluruh

proses pembangunan dan membuat kebijakan tanpa memperhatikan aspirasi pedagang. Pemerintah merupakan kelas yang mendominasi dalam pengelolaan pasar sehingga segala aturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah harus diikuti oleh pedagang. Pedagang memiliki kesadaran ganda yang terbentuk dari kesadaran yang dipengaruhi oleh pemerintah dan kesadaran revolusioner dari keseharian yang dilakukan pedagang.

Bentuk hegemoni yang dilakukan pemerintah terhadap pedagang yakni : (a) Sejak awal pedagang menolak adanya revitalisasi Pasar Bawah. Pemerintah kemudian melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan pedagang dalam melaksanakan revitalisasi pasar. Pendekatan dilakukan pemerintah dengan cara sosialisasi dan konsensus untuk mendapatkan persetujuan pedagang. Hal ini menunjukkan bentuk hegemoni pertama yang dilakukan pemerintah dalam upaya revitalisasi pasar. (b) Hegemoni dilakukan pemerintah dalam upaya pembagian lapak. Proses pembagian lapak pedagang dilakukan dengan sistem cabut lot sebagai aturan yang ditetapkan pemerintah untuk meredam protes pedagang nantinya. Sebagai titik tolak dari konsep hegemoni, konsensus merupakan jalan pendekatan untuk membentuk kesepakatan secara sadar dari pedagang tanpa melakukan paksaan. Terlebih dengan gaya kepemimpinan pemerintah yang intelektual membuat pedagang cepat membentuk kesadaran tersebut. (c) Konsensus dilakukan pemerintah sebagai titik tolak dari hegemoni pemerintah. Pemerintah berupaya melakukan pendekatan dengan pedagang melalui jalan konsensus. Konsensus ini dilakukan secara sepihak antara pemerintah terhadap pedagang pasar. Pemerintah berupaya untuk mendapat persetujuan pedagang secara sadar sedangkan pedagang pasar tidak memiliki posisi tawar untuk menentang. (d) Pedagang sebagai pihak yang didominasi harus dengan sadar mengikuti setiap kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah walaupun disisi lain pedagang memiliki kesadaran untuk melakukan perlawanan. Pedagang

dengan sukarela mengikuti aturan yang sudah dibuat pemerintah, walau aturan tersebut tidak memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan.

Sampai kapan pun, Hegemoni pemerintah terhadap pedagang tidak akan pernah berakhir dan akan terus berjalan. Pedagang akan terus berada dibawah bayang-bayang aturan yang dibuat pemerintah meskipun sebetulnya pemerintah tidak mengetahui keinginan sesungguhnya dari pedagang pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombie, Nicholas.dkk. 2010. *Kamus Sosiologi*. Terjemahan oleh Desi Novianti. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bocock, Robert. 2007. *Pengantar Komprehensif Untuk Memahami : Hegemoni*. Yogyakarta : Jalasutra.
- Legowo, Martinus.dkk. 2008. *Pedagang dan Revitalisasi Pedagang Tradisional di Surabaya : Studi Kasus pada Pasar Wonokromo dan Pasar Tambah Rejo, Surabaya*. Jurnal.Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Surabaya.
- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Patria, Nezar dan Andi Arif. 2015. *Antonio Gramsci : Negara & Hegemoni*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sukriswanto, Uchang. 2012. *Analisis Kelayakan Revitalisasi Pasar Umum Gubug Kabupaten Grobogan*. Jurnal.Universitas Negri Yogyakarta.
- Theresia, Aprilia. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat (Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat)*. Bandung : Alfabeta.

Bangkapos. 14 April 2015. *Ini Kisah Pasar Kumuh Jadi Pasar Kite Sungailiat*. Diakses pada 21 Oktober 2015. <http://bangka.tribunnews.com/2015/04/14/ini-kisah-pasar-kumuh-jadi-pasar-kite-sungailiat>

Bangkapos. 7 Oktober 2015. *Pedagang Pasar Kite yang Jualan di Lorong Diminta Kembali ke Lapaknya*.

RRI. 20 Oktober 2015. *Pedagang Pasar Kite Sungailiat Tinggalkan Petak Kios Beralih ke PKL*. Diakses pada 21 Oktober 2015. http://www.rri.co.id/post/berita/210986/ekonomi/pedagang_pasar_kite_sungailiat_tinggalkan_petak_kios_beralih_ke_pkl.html

Identifikasi Modal Sosial Masyarakat Terhadap Restorasi Lahan Pasca Tambang (Studi Masyarakat Desa Bukit Kijang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah)

Herdiyanti S.Sos., M.Si
(vhie_dyan@yahoo.co.id)

Abstrak

Modal sosial merupakan salah instrument penting yang sangat memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Pembangunan ekonomi dasawarsa ini menjadi perhatian yang menarik bagi semua kalangan masyarakat terutama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Realitas ini berkaitan pada fokus kajian penelitian ini mengenai program restorasi lahan pasca tambang yang sedang berlangsung di Desa Bukit Kijang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sementara itu penelitian ini menggunakan teori dari tokoh James Coleman mengenai konsep modal sosial. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi modal sosial dalam kehidupan masyarakat Desa Bukit Kijang terhadap program restorasi lahan pasca tambang yang sedang berlangsung di desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya modal sosial yang ada di masyarakat Desa Bukit Kijang. Beberapa indikator modal sosial yang dapat dijabarkan seperti rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program restorasi lahan pasca tambang, rendahnya arus informasi seperti tidak berjalannya komunikasi yang efektif di masyarakat Desa Bukit Kijang. Selain itu, rendahnya hubungan sosial yang ada di masyarakat, seperti kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program yang dipelopori oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dan Kementerian Lingkungan Hidup serta pihak swasta yang terlibat dengan program tersebut.

Kata Kunci : Modal Sosial, Restorasi Lahan, Pasca Tambang.

Abstract

Social capital is one of the most important instruments that have an influence on social life and economy. The economic development of this decade becomes an interesting concern for all society, especially the government in realizing the welfare of society. This reality is related to the focus of this study review of the ongoing post-mining land restoration program in Bukit Kijang Village. This research uses qualitative research method with case study approach. Meanwhile, this research uses the theory of the character James Coleman about the concept of social capital. The purpose of this study is to identify social capital in the community life of Bukit Kijang Village to the ongoing post-mining restoration program in the village. The results showed that the low social capital in Bukit Kijang Village community. Some social capital indicators can be elaborated such as low community participation in post-mining restoration program, low information flow such as ineffective communication in Bukit Kijang Village community. In addition, the low social relationships that exist in the community, such as the lack of community participation on the implementation of programs pioneered by the Government of Bangka Regency and the Ministry of Environment and the private parties involved with the program.

Keywords: Social Capital, Land Restoration, Post Mine.

A. Pendahuluan

Bangka Belitung merupakan salah satu Provinsi yang memiliki kekayaan alam yang cukup potensial untuk dikembangkan terutama kaitannya terhadap pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi masyarakat mayoritas berasal dari aktivitas pertambangan. Pertambangan timah merupakan salah satu potensi alam yang dikembangkan masyarakat dalam keberlangsungan penghidupan saat ini. Kondisi pasca timah mengundang banyak hal terutama bagi masyarakat agar mampu mengembangkan strategi apa yang dapat dilakukan dalam melangsungkan kehidupan pasca timah.

Sementara itu persoalan pasca timah ini juga mengundang beberapa upaya yakni antara Aparatur Desa seperti Kepala Desa Bukit Kijang beserta stafnya, tokoh masyarakat dan ketua kelompok tani serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Bangka Tengah melakukan alternatif terhadap kesejahteraan masyarakat terkait dengan mata pencahariannya pasca timah dengan berbagai macam program restorasi lahan pasca tambang yang dilakukan. Desa Bukit Kijang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu desa yang dikatakan sebagai desa baru dan sumber mata pencaharian masyarakatnya variatif. Bukit Kijang merupakan salah satu desa yang memiliki sejarah yakni merupakan gabungan antara dua dusun yaitu dusun Batu Kijang dan dusun Bukit Lesung yang kemudian menjadi Desa Bukit Kijang. Desa Bukit Kijang memiliki 300 KK dan jumlah penduduk sebanyak 1177 jiwa yakni laki-laki sejumlah 675 jiwa sedangkan perempuan sejumlah 502 jiwa¹.

Desa ini sering kali menjadi sorotan media karena berbagai macam program pemerintah yang sedang berlangsung di desa tersebut. Salah satu programnya antara lain seperti restorasi lahan pasca tambang yang ditanami berbagai macam sayuran seperti cabai dan jagung. Program ini berlangsung efektif jika disertai adanya partisipasi masyarakat dalam menggerakkan program tersebut. Partisipasi masyarakat dibu-

tuhkan dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya. Sebagian dari masyarakat sudah mengalami transformasi terhadap aktivitas mata pencaharian dari tambang ke pertanian dan perkebunan. Menurut Supriyadi (2007:20) menjelaskan bahwa mata pencaharian merupakan sumber pekerjaan utama yang dilakukan individu untuk melangsungkan kehidupan dengan cara memanfaatkan berbagai macam aset penghidupan yang tersedia di lingkungan tempat tinggal. Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan terutama mengenai kesejahteraan masyarakat desa yakni pembangunan ekonomi secara kompleksitas. Program yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan salah satu pemberdayaan kepada masyarakat Desa Bukit Kijang. Pemberdayaan merupakan salah satu tujuan agar meningkatnya kemampuan masyarakat dari berbagai aspek. Pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya didukung adanya modal ekonomi dan fisik saja, namun adanya dukungan modal-modal lainnya yang bekerja seperti modal alam, manusia dan sosial.

Pembangunan ekonomi dapat ditandai dengan adanya pembangunan fisik. Pembangunan fisik yang terjadi karena adanya dukungan modal manusia. Modal manusia yang berkembang karena adanya penopang yakni modal sosial yang menjadi asset penting dalam membangun ekonomi masyarakat. Modal Sosial memiliki peranan penting dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat, pernyataan ini didukung oleh Mawardi (2007) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sering kali menekankan pada modal alam dan ekonomi namun mengabaikan modal sosial yakni kelembagaan lokal, kearifan lokal, norma dan nilai masyarakat serta partisipasi masyarakat sebagai penopang terlaksananya pemberdayaan masyarakat. . Modal sosial memiliki perbedaan dengan modal-modal lainnya. Modal sosial merupakan perekat dalam menggerakkan modal lainnya.

Modal sosial merupakan konsep yang sangat penting dalam menunjang model pembangunan yakni manusia. Manusia merupakan subjek yang

1 Sumber data : Data Desa Tahun 2016

menentukan dan menggerakkan penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa. Modal sosial merupakan kemampuan seseorang atau komunitas dalam memanfaatkan sumberdaya yang terdapat pada lingkungan masyarakat. Modal sosial menurut Coleman (1990) yakni merupakan akses yang sesungguhnya memiliki peranan secara ekonomi untuk meningkatkan kelangsungan kehidupan masyarakat. Menurut Coleman di dalam modal sosial terdapat dua ikatan yang saling berhubungan yakni mengikat dan menjembatani.

B. Rumusan Masalah

Pada hakekatnya modal sosial merupakan salah satu instrument penting dalam meningkatkan program pemerintah demi pembangunan ekonomi masyarakat. Singkat jelas tujuan dari penelitian ini mengacu pada uraian di atas dapat dirumuskan masalah yakni Bagaimana peran modal sosial pada masyarakat Desa Bukit Kijang terhadap Program Restorasi Lahan Pasca Tambang?

C. Kerangka Teoritis

Menurut James Coleman (John Field:2013) menjelaskan bahwa konsep modal sosial merupakan sarana dalam menjelaskan bagaimana seseorang atau komunitas dalam melakukan kerjasama. Kepercayaan merupakan salah satu intrumen modal sosial yang dibentuk dalam kehidupan masyarakat atau komunitas. Kepercayaan yang tumbuh didorong dengan adanya kesamaan nasib dan tujuan dalam mencapai tujuan tertentu, sehingga memaksa individu atau masyarakat untuk melakukan kerjasama. Menurut Coleman terdapat dua ikatan yang saling mengikat antara internal dan eksternal atau *Bonding Social Capital* dan *Bridging Social Capital* dalam kehidupan masyarakat atau komunitas. Bonding dan Bridging bekerja saling bersinergis dalam kehidupan masyarakat. Adapun pemahaman Coleman dalam tulisannya yang berjudul "*social capital in the creation of human capital*"(1988) menjelaskan bahwa modal sosial sebagai sarana konseptual yang menjelaskan

tindakan sosial secara teoritis dengan mengaitkan perspektif sosiologi dan ekonomi. Coleman berpendapat bahwa pengertian modal sosial ditentukan oleh fungsinya. Sekalipun sebenarnya terdapat banyak fungsi modal sosial tetapi ia mengatakan bahwa pada dasarnya semuanya memiliki dua unsur yang sama, yakni: pertama, (1) modal sosial mencakup sejumlah aspek dari struktur sosial, dan (2) modal sosial memberi kemudahan bagi orang untuk melakukan sesuatu dalam kerangka struktur sosial tersebut. Selain itu Coleman mengidentifikasi terdapat tiga unsur utama yang merupakan pilar modal sosial. Pertama berkaitan terhadap kewajiban dan harapan merupakan kemunculan dari rasa saling percaya atau kepercayaan dalam lingkungan sosial masyarakat. Kemudian pilar kedua modal sosial menurut Coleman adalah pentingnya arus informasi dalam bentuk komunikasi yang lancar di dalam struktur sosial sehingga dapat mendorong berkembangnya kegiatan dalam masyarakat. Menjadi penting diketahui bahwa arus informasi yang tidak lancar cenderung menyebabkan orang menjadi tidak tahu atau ragu-ragu sehingga tidak berani melakukan sesuatu. Arus informasi merupakan salah satu bentuk interaksi sosial masyarakat. Pilar ketiga adalah norma-norma yang harus ditaati dengan sanksi yang jelas. Tanpa adanya seperangkat norma yang disepakati dan dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat maka yang muncul adalah keadaan anomie dimana setiap orang cenderung berbuat menurut kemauan sendiri tanpa merasa ada ikatan dengan orang lain. Juga tidak ada mekanisme untuk menjatuhkan sanksi karena tidak ada norma yang disepakati bersama berkaitan dengan sanksi tersebut. Dengan demikian pengembangan modal sosial pada dasarnya ditujukan untuk membangun ketiga pilar yang dimaksudkan Coleman itu.

D. Kajian Pustaka

Modal Sosial Dalam Perspektif Kebijakan Publik Edi Suharto, PhD (2005) dalam artikelnya menjelaskan bahwa kebijakan public yang di dalamnya terdapat kebijakan sosial dapat

dijadikan sebagai suatu instrument penting suatu negara dalam membangun dan meningkatkan modal sosial dalam suatu masyarakat. Pemerintah dapat menciptakan kondisi dengan berbagai daya dukung modal sosial yang ada pada masyarakat maupun komunitas untuk menjalankan berbagai macam program yang berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Program yang dilakukan oleh pemerintah pada masyarakat tertentu menjadi ukuran terhadap eksistensi modal sosial masyarakat setempat. Menurut Edi Suharto bahwa keberhasilan program pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat tertentu didukung adanya modal sosial yang bekerja di dalam masyarakat tersebut dalam melangsungkan program pemerintah. Keikutsertaan atau partisipasi masyarakat menjadi penopang keberhasilan program pemerintah. Selanjutnya pada penelitian Wedy Nasrul, Nursyirwan Effendi, Yonariza, Melinda Noer (2015) sama halnya dengan penelitian sebelumnya menggambarkan bentuk-bentuk modal sosial apa saja yang berpotensi melindungi pasar tradisional gambir sebagai dukungan sosial untuk melindungi dan memberdaya pasar gambir. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, ditemukan bentuk kerja sama dan tindakan kolektif yang merupakan kunci terciptanya dukungan sosial dari kelembagaan lokal yang terlibat untuk melindungi pasar tradisional gambir. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan analisis kasus yaitu dihadirkan bentuk antisipasi dalam menghadapi kendala-kendala yang akan muncul jika modal sosial tidak bisa dipertahankan dan dilestarikan keutuhannya atau dapat dikatakan melemah. Sehingga warga yang terlibat pada pasar tradisional gambir harus mampu melakukan antisipasi dalam menghadapi tantangan dan kendala-kendala yang dapat menjadi ancaman warga dalam melindungi eksistensi pasar tradisional gambir. Gambaran yang dapat direfleksikan secara kritis terhadap dua penelitian di atas bahwa pentingnya modal sosial dibangun dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat terutama berkaitan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Coleman sebagaimana telah diuraikan

sebelumnya bahwa “pilar utama modal sosial berupa struktur sosial yang menciptakan pengungkungan dalam sebuah jaringan sosial yang membuat setiap orang saling berhubungan sedemikian rupa, sehingga kewajiban-kewajiban maupun sanksi-sanksi dapat dikenakan kepada setiap orang yang menjadi anggota jaringan itu” (Coleman, 1988).

E. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif terhadap suatu kasus yang diteliti mengenai tentang peran modal sosial terhadap program restorasi lahan pasca tambang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan. Penelitian ini menggunakan strategi survey dan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian Desa Bukit Kijang. Hal ini dilakukan agar memperoleh gambaran umum mengenai Desa Bukit Kijang baik dari demografi desa, sumber mata pencaharian dan karakter penduduk serta dinamika interaksi yang berlangsung terhadap program yang ada di Desa Bukit Kijang. Tahapan selanjutnya yang dilakukan merujuk pada pemikiran Cresswell (2010) yang memiliki tujuan membantu peneliti pada saat proses turun lapangan. Selanjutnya, implementasi dari tahapan penelitian yang dilakukan memiliki dampak terhadap proses penelitian. Adapun proses penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Peneliti membawa konsep yang telah disusun sebelum turun lapangan, konsep yang diusung terlebih dahulu ini bukanlah bentuk hipotesis yang hendak dibuktikan di hasil penelitian, namun lebih sebagai mediator yang akan dinegosiasikan ulang berdasarkan temuan lapangan atau diskursus yang didapatkan mengenai peran modal sosial terhadap program restorasi lahan pasca tambang. Proses pengumpulan data diperoleh melalui eksperimen, pengamatan/observasi, historis dan

teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), selain itu penelitian ini melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap stakeholder masyarakat Desa Bukit Kijang seperti Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Insinyur (stakeholder pemerintah). Teknik pengumpulan data dilakukan secara deskriptif tentang hasil temuan lapangan mengenai fenomena masyarakat Desa Bukit Kijang terhadap program pemerintah yang sedang berlangsung di desa tersebut. Analisis deskriptif dilakukan bertujuan untuk menghasilkan gambaran dari data yang telah terkumpul berdasarkan hasil wawancara dari sejumlah informan baik informan kunci maupun biasa yang memiliki sudut pandang berbeda. Adapun strategi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yakni diawali dengan melakukan pengamatan secara langsung bagaimana kondisi Desa Bukit Kijang. Sehingga dapat diperoleh gambaran umum desa tersebut baik dari demografi desa, sumber mata pencaharian dan karakter penduduk serta dinamika interaksi yang berlangsung di Desa Bukit Kijang. Selanjutnya, mengunjungi kantor Kepala Desa Bukit Kijang dan melakukan wawancara secara mendalam.

F. Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti mengupas dan mendeskripsikan temuan di lapangan dalam menjawab rumusan masalah yang telah dikaji dan diperoleh di lapangan. Identifikasi modal sosial dapat dipicu adanya beberapa indikator yang terjadi di masyarakat Desa Bukit Kijang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Tipologi modal sosial yang ditemukan pada masyarakat desa tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat Desa Bukit Kijang

Partisipasi merupakan salah satu indikator dari modal sosial yang dapat ditemukan pada masyarakat desa maupun kota. Partisipasi menurut Coleman merupakan salah satu yang ditandai adanya interaksi yang dilakukan secara berulang dan intens

oleh individu atau komunitas masyarakat. Partisipasi merupakan salah satu indikator yang mendukung keberhasilan dari program yang sedang berlangsung di Desa Bukit Kijang. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dari beberapa informan di lapangan bahwa masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang rendah terhadap program yang sedang berlangsung di Desa Bukit Kijang. Hal ini dikarenakan kurangnya interaksi dan pemahaman masyarakat untuk bisa berpartisipasi guna dalam membangun ekonomi masyarakat berbasis kearifan lingkungan. Selain itu, kurangnya pemberdayaan yang dilakukan oleh aparat Desa Bukit Kijang kepada masyarakat dalam merespon program Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini disebabkan sinergitas antara Top Down (Bridging dan Linking) dan Bottom Up (Bonding) masih sangat rendah. Kolektifitas antara Top Down dan Bottom Up tentunya dapat menciptakan sikap partisipasi yang tinggi dalam membangun kemajuan Desa Bukit Kijang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu stakeholder penting di desa menjelaskan bahwa masyarakat di desa kurang aktif dalam melakukan kegiatan pertanian, apalagi dengan adanya program pemerintah terhadap restorasi lahan pasca tambang yang bekerjasama dengan pihak swasta seharusnya keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan². Namun masyarakat cenderung lebih memprioritaskan sumber mata pencaharian sektor tambang di Desa Bukit Kijang. Sumber mata pencaharian sektor tambang dirasakan lebih menguntungkan dan membantu perekonomiannya dibandingkan pertanian. Namun, hal ini hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Masyarakat tidak menyadari secara langsung akibat dari aktivitas tambang yang dilakukan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan di Desa Bukit Kijang. Selain itu, masyarakat

2 Sumber data : Informan Insinyur Dari Bogor Pak Didik (Januari 2017)

juga kurang memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki di Desa Bukit Kijang. Adapun potensi yang dimiliki pada masyarakat ini yakni agrowisata multicultural dan home industri.

Sementara itu rendahnya partisipasi yang terjadi juga disebabkan kurangnya sosialisasi dari aparat desa dalam mengelola dan membina masyarakat desa tersebut. Seyogyanya masyarakat akan dapat mengalami perubahan sosial apabila didukung adanya komunikasi yang interaktif dalam membangun perkembangan desa. Komunikasi yang interaktif maksudnya adalah komunikasi yang dipola secara berkelanjutan dengan pihak warga. Hal yang dapat mendorong terciptanya partisipasi sosial masyarakat seperti arus informasi yang lebih intens melalui komunikasi dengan masyarakat. Komunikasi dan sosialisasi pemahaman merupakan salah satu tindakan efektif dalam membangun struktur sosial di masyarakat Desa Bukit Kijang. Menurut Coleman jika arus informasi tidak lancar akan menyebabkan masyarakat menjadi apatis dan rendahnya rasa saling percaya. Sehingga akan berpengaruh terhadap program restorasi lahan pasca tambang yang sedang berlangsung di desa tersebut.

Sehingga adapun komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan tidak hanya bermanfaat, namun berkelanjutan dan juga memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat untuk dapat menjaga lingkungan di Desa Bukit Kijang. Pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh oleh masyarakat lambat laun dapat mengubah pola pikir masyarakat setempat dalam mengelola lingkungan secara baik dan tepat.

2. Rasa Saling Percaya

Coleman menjelaskan bahwa dalam merepresentasikan sumberdaya melalui hubungan-hubungan yang dibangun dan diatur oleh tingginya tingkat kepercayaan dan nilai-nilai bersama yang dimiliki oleh

masyarakat. Tingkat kepercayaan yang tinggi menjadi ukuran terhadap suatu keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat namun sebaliknya tingkat kepercayaan yang rendah menjadi penghambat terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat. Coleman menjelaskan bahwa pilihan rasional menjadi tolak ukur terhadap tinggi rendahnya tingkat kepercayaan seseorang dalam membangun kerjasama. Coleman menjelaskan teori pilihan rasional sangat bersifat individualistic yang memungkinkan seseorang memfilter hubungan untuk melakukan kerjasama. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan penjelasan dari salah satu informan kunci yakni Kepala Desa menjelaskan bahwa mayoritas dari masyarakat Desa Bukit Kijang memiliki rasa kecurigaan tinggi terhadap program yang sedang berlangsung di desa ini. Peneliti dapat menganalisa bahwa kecurigaan yang muncul akibat dari kurangnya pola interaksi dan partisipasi yang dibangun oleh masyarakat sehingga memunculkan rasa kekhawatiran dari masyarakat Desa Bukit Kijang. Kecurigaan yang muncul mengakibatkan masyarakat enggan untuk bisa berpartisipasi terhadap program yang sedang berlangsung di desa tersebut. Masyarakat memiliki pilihan yang dianggap rasional dapat membantu perekonomiannya dengan cara bertambang atau ngelimbang dibandingkan berpartisipasi pada program Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan menjelaskan bahwa mereka lebih cenderung mencari nafkah untuk kebutuhan ekonomi dengan cara ngelimbang timah. Masyarakat tidak menyadari secara langsung bahwa di Desa Bukit Kijang memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam membangun perekonomian masyarakat. Potensi-potensi yang dapat dikembangkan yakni antara lain seperti Agrowisata multicultural merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat mengenai lahan pasca

tambang yang dapat dijadikan sebagai lahan pertanian. Proses restorasi lahan pasca tambang ini di miliki oleh dua pemilik modal, yaitu lahan 8 hektar dimiliki oleh Kementerian Pertanian Bangka Tengah dan Kementerian Pertanian Bogor dan bekerja sama dengan gapoktan Bukit Kijang. Selain itu lahan 10 hektar juga dimiliki oleh PT Timah dan Polda yang bekerja sama dengan Gapoktan Desa Bukit Kijang dengan jumlah anggota sebanyak 10 anggota³. Selanjutnya *home industry* salah satu potensi yang menarik untuk dikembangkan yaitu keterampilan masyarakat dalam memproduksi gula merah, sapu kulit kelapa, keripik lumpia dan kemplang. Berbagai kegiatan produksi (*home industri*) yang dilakukan masyarakat Desa Bukit Kijang seperti gula merah, dengan bahan pokok air kabung dari pohon beluluk, sapu dari sisa kulit kelapa tua (*sabut*), serta keripik lumpia dan kemplang yang mereka produksi dari buah belinju dan ubi kayu. Hal ini cukup membuktikan adanya keterampilan yang dapat dikembangkan dan perlu perhatian dari pemerintah desa dan pemerintah daerah setempat.

3. Kerja Sama

Kerja sama merupakan salah satu elemen modal sosial yang dapat mendukung terjadinya pola interaksi yang dilakukan secara berulang baik dari pihak internal maupun eksternal. Seperti halnya yang dipaparkan oleh Coleman bahwa *trust* atau rasa saling percaya menjadi kekuatan atau basisnya dalam mencapai tujuan bersama (John Fiel:2013). Rasa saling percaya akan memudahkan seseorang atau komunitas masyarakat dalam membangun kerjasama. Analisis Coleman tentang pilihan rasional menjadi *factor* dalam menentukan hubungan kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Jika terjadi kerjasama makan tidak serta

merta kerjasama yang terbentuk berdasarkan kepentingan bersama, namun atas dasar kepentingan individu.

Kerjasama tidak akan terbentuk jika tidak memiliki rasa saling percaya antar sesama dari berbagai pihak. *Trust* yang dibangun oleh masyarakat merupakan bagian dari energi pembangunan ekonomi dalam masyarakat Desa Bukit Kijang. Sama halnya *trust* merupakan bagian dari unsur modal sosial yang dapat dijadikan sumber kekuatan dalam mempertahankan keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam kurun waktu jangka panjang. Jika adanya rasa saling percaya maka akan terbentuk komunikasi yang efektif antara aparatur desa serta stakeholder lainnya dengan warga mengenai pentingnya menjalankan program pemerintah dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam membangun ekonomi masyarakat yang berbasis kearifan lingkungan di Desa Bukit Kijang. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan beberapa informan yakni sekretaris desa dan insinyur dari Kementrian Pertanian Bogor menjelaskan bahwa untuk membangun dan meningkatkan ikatan kerjasama dengan masyarakat mengalami hambatan. Hubungan yang terbentuk antara Aparatur Desa, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Kementrian Pertanian Bogor hanya beberapa dari masyarakat Desa Bukit Kijang. Beberapa dari masyarakat tersebut masih bisa dihitung kapasitasnya yakni sebanyak 10 orang⁴ yang berpartisipasi dan peduli dengan lingkungannya. Realitas ini perlu perhatian penting bagi aparatur desa untuk dapat meningkatkan hubungan kerjasama antara warga dan para stakeholder terhadap program pemerintah melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk membangun relasi dan kerjasama serta berpartisipasi pada setiap kegiatan atau program yang dilakukan oleh

3 Sumber data Desa Bukit Kijang 2016

4 Hasil wawancara Sekretaris Desa Bukit Kijang (Februari 2017)

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Sementara itu terkait dengan norma masyarakat yang ada di Desa Bukit Kijang kurang dipatuhi dan dijalankan oleh sebagian masyarakat setempat. Norma merupakan salah satu produk atau elemen modal sosial yang melekat pada kehidupan masyarakat baik perdesaan maupun perkotaan. Norma merupakan salah satu aturan yang disepakati dan dipatuhi secara bersama oleh masyarakat tertentu dalam menjalankan kehidupan. Berdasarkan hasil wawancara dan realitas yang terjadi di lapangan meskipun aktivitas tambang dilarang oleh aparat desa namun masih ada sebagian dari masyarakat melakukan aktivitas tambang sebagai sumber mata pencaharian. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi yang mendesak sebagian dari masyarakat melakukan aktivitas tersebut. Aturan yang ada seperti dilarang untuk melakukan aktivitas tambang di sekitaran wilayah desa tidak dijalankan dan dipatuhi oleh sebagian masyarakat⁵. Sehingga hal tersebut berdampak pada kondisi lingkungan yang lambat laun menjadi rusak.

G. Analisis Data

Pembahasan bab sebelumnya mengantarkan pada sebuah refleksi kritis terhadap kondisi yang ada di Desa Bukit Kijang. Realitas yang menarik untuk dianalisa secara kritis berdasarkan perolehan data di lapangan bahwa ditemukan peran modal sosial tidak bekerja secara efektif baik bonding dan bridging social capitalnya, hal ini disebabkan karena masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa Bukit Kijang. Rendahnya partisipasi masyarakat memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap elemen-elemen modal sosial lainnya seperti pola interaksi, rasa saling percaya dan kerjasama. Oleh karenanya sulit bagi aparat desa dalam membangun komunikasi dengan masyarakat setempat untuk mensinergisitkan hubungan antara masyarakat dengan pihak-

pihak yang terlibat dalam program restorasi lahan pasca tambang. Program restorasi lahan pasca tambang merupakan salah satu program yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang bekerjasama dengan Aparatur Desa Bukit Kijang untuk memulihkan lahan-lahan pasca tambang dengan ditanami berbagai macam tanaman seperti cabai dan jagung berdasarkan uji kesuburan tanah yang dilakukan oleh salah satu insinyur tanah dari Bogor yakni Pak Didik beserta rekannya yang lain. Namun, pola pikir masyarakat belum seluruhnya terbuka (*open minded*) terhadap pembangunan yang ada di Desa Bukit Kijang saat ini. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya rasa memiliki dan peduli terhadap kelestarian lingkungan sangat rendah karena masyarakat hanya memprioritaskan kepentingan ekonomi dalam melangsungkan kehidupannya tanpa menghiraukan dampak dari aktivitas yang dilakukannya pada masa mendatang untuk generasi berikutnya.

Sinergisitas antara *top down* dan *bottom up* tidak berjalan efektif dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat hanya segelincir saja yang berasal dari aparat desa. Masyarakat di luar struktur desa kurang begitu peduli dan berpartisipasi terhadap program restorasi lahan pasca tambang yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kabupaten Bangka Tengah serta pihak swasta yakni PT. Timah. Sementara itu, program yang ada masih berlangsung meskipun hanya sebagian masyarakat yang berpartisipasi terhadap program tersebut. Berdasarkan temuan di lapangan salah satu informan menjelaskan bahwa diharapkan agar masyarakat dapat berpartisipasi dan peduli dengan lingkungan di Desa Bukit Kijang. Partisipasi masyarakat sangat membantu pemerintah dalam membangun desa tersebut⁶. Partisipasi merupakan elemen modal sosial yang sangat memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan analisa Coleman bahwa seseorang yang tidak memiliki modal sosial maka akan sulit menjalin hubungan dengan

5 Hasil wawancara Kepala Desa (3 Maret 2017)

6 Hasil wawancara : Pak Didik (3 Maret 2017)

pihak manapun. Artinya rendahnya pola interaksi dan partisipasi masyarakat maka sulit mencapai keuntungan materiil dan keberhasilan secara optimal.

H. Penutup

Peran modal sosial pada masyarakat Desa Bukit Kijang terhadap program restorasi lahan pasca tambang cukup menjadi perhatian penting bagi semua kalangan, baik masyarakat internal desa maupun pemerintah beserta stakeholder yang terlibat terhadap program yang sedang berlangsung di Desa Bukit Kijang. Berdasarkan temuan di lapangan dapat dideskripsikan kondisi sosial masyarakat desa tersebut bahwa dinamika hubungan atau relasi sosial yang terjadi di desa tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan karena rendahnya rasa saling percaya masyarakat internal desa dengan berbagai pihak pemerintah maupun stakeholder yang menjadi monitoring program restorasi lahan pasca tambang. Kepercayaan menjadi ukuran keberhasilan terhadap restorasi lahan pasca tambang yang merupakan model pembangunan desa menuju desa sejahtera berbasis kearifan lingkungan. Namun, realitas yang terjadi menjadi tolak ukur bahwa lingkungan menjadi korban akibat intervensi masyarakat demi mencapai kebutuhan ekonomi. Program restorasi lahan pasca tambang merupakan salah satu upaya pemulihan dan pemberdayaan terhadap kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin memprihatinkan yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta PT. Timah Tbk. Selain rendahnya tingkat kepercayaan yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat yakni kurangnya koordinasi atau arus informasi yang disampaikan oleh pihak Aparatur Desa Bukit Kijang dalam melakukan sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat dalam membantu dan menjalankan program restorasi lahan pasca tambang di Desa Bukit Kijang. Meskipun pernah dilakukan sosialisasi namun partisipasi masyarakat juga masih tetap

rendah. Hal ini memunculkan beberapa masukan dan saran bahwa sosialisasi yang dilakukan harus dilakukan secara rutin dan dikoordinir masing-masing RT yang ada di desa maupun dusun. Sehingga kondisi tersebut menciptakan komunikasi yang intens antara aparat desa dengan masyarakat beserta stakeholder yang terkait terhadap program restorasi lahan pasca tambang.

Daftar Pustaka

- Coleman, James S. 1988. *Social Capital in the Creation of Human Capital*. *American Journal of Sociology* 94: S95-S120.
- Coleman, James S. 1990. *Foundations of Social Theory*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Creswell W. Jhon. 2010. *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Field, John. 2013. *Modal Sosial*. Yogyakarta.: Kreasi Wacana.
- Mawardi, M.J. 2007. *Peranan Social Capital Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Komunitas 2, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam.
- Wahyu, Supriyadi Waskito. 2007. *Pergeseran Mata Pencarian Masyarakat Desa*. FISIP: UNS.

Penelitian

- Nasrul, Wedy dkk. 2015. *Dukungan Modal Sosial dari Kelembagaan Lokal untuk Melindungi Pasar tradisional Gambir*. Padang: Universitas Andalas.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Sosial dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

MENUNTASKAN KONSENSUS LOKAL-NASIONAL (YANG) BERKELANJUTAN:

(Membaca Ulang Rasionalisasi dan Idealisasi Pembangunan Model GBHN)

Rendy, M.A.¹

Abstract:

This paper analyses GBHN critically as an instrument of managing the concensus building to reinforce GBHN, the Pancasila state policy. It reviews the development of the GBHN model between idealization and rationalization. To present an ideal and adequate concept on framing ideal and rational model is very important toward the sustainable national development. GBHN is a manifestation of the doctrine of 'state-led economic development', a development plans model to the basis of the direction of a state development. Therefore, the effort to re-create the GBHN model development which is certainly different from the New Order context is important and relevant, especially the Pancasila-oriented GBHN. New GBHN model is a joint project to harmonize the long-term grand design of National development forward which is of course highly prioritizing discursive and democratic processes. Strengthening GBHN built on the basis of a consensus that involves the various parties actively and massively, especially the academic community as well as the non-government community is very urgent to be implemented.

Keywords :

GBHN model, Concensus Building, development plans, and sustainable national development.

1 Penulis adalah Staf Pengajar Program Studi Ilmu Politik FISIP UBB. Penulis juga aktif sebagai peneliti The Ilalang Institute (pusat kajian politik, kebijakan, dan demokrasi lokal).

A. PENDAHULUAN

Pembangunan model GBHN² menjadi diskursus publik yang kembali mencuat, sekaligus juga menjadi arena perdebatan serius terkait urgensi untuk menghadirkan ulang format dan skenario pembangunan berencana yang terarah serta berkelanjutan. Pembangunan model GBHN sendiri dianggap menjadi arena penting sekaligus sebagai kerangka strategis untuk meraih, sekaligus mengelola konsensus publik.

2 Istilah 'GBHN' sendiri merupakan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Ini menjadi model dan instrumen utama sebagai pendekatan pembangunan berencana dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan rezim Orde Baru yang saat itu terkenal sangat Jakartasentris, sentralistis, dan otoriter. Tulisan ini dikembangkan dari substansi paparan penulis yang pernah dipresentasikan bersama pihak Tim Pengkajian dari MPR RI, dan kerjasama antara pihak *Center for Electoral and Political Parties* (CEPP) FISIP UI bersama FISIP UBB pada medio 2016.

Adanya kehendak untuk kembali menghidupkan 'roh' pembangunan model GBHN bukan tanpa alasan. Beberapa tahun pasca tumbangannya rezim Orde Baru, sekaligus pasca gegap gempita reformasi, terkesan seolah tidak ada haluan jelas dan terarah pembangunan Nasional. Hal ini diperparah dengan praksis politik dan demokrasi kekuasaan yang justru tidak jarang menghadirkan rezim kuasa yang tidak stabil. Hal tersebut diakibatkan oleh berbagai praktik politik pembangunan yang sangat koruptif dan manipulatif.

Ini pada gilirannya menjadi dilema tersendiri bagi proses tumbuh-kembang demokrasi dan demokratisasi pembangunan, baik di aras lokal maupun nasional yang banyak menemui kondisi paradoks yang sangat rumit dan stagnan. Konteks ini bisa jadi akibat dari praktik pembangunan yang sarat KKN akibat dari adanya 'penjahat demokrasi' dalam setiap ruang dan dinamika

proses yang berlangsung.³

Ruang perdebatan terkait konsep dan konteks sistem ketatanegaraan saat ini memang menjadi relevan untuk menjadi bahan refleksi dan perdebatan diskursif semua pihak, khususnya dalam rangka mengupayakan gagasan ide dari semua pihak untuk pada akhirnya mencapai konsensus bersama tentang konteks ideal dan rasional bagi arah dan nasib pembangunan Indonesia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, khususnya dalam situasi rezim politik dan kekuasaan yang berubah-ubah. Oleh karena itu, maka menjadi harapan besar semua pihak, agar trajektori pembangunan antar rezim yang terus berubah tersebut, tidak saling menegasi, akan tetapi saling menopang dan memiliki konteks ketersambungan yang kuat dan selaras dengan visi misi pembangunan Nasional jangka panjang.

B. PEMBAHASAN

Di tengah gagapnya bangsa Indonesia dalam menjalani fase-fase perjalanan politik sebagai hasil pergulatan panjang amandemen UUD 1945, yang dalam praktiknya dianggap liberal, tentu ada begitu banyak konteks sistem dan praksis politik pembangunan yang perlu disikapi dan dikritisi bersama. Oleh karena itu, tentu menjadi perlu kembali memikirkan ulang model praksis yang ideal dan rasional bagi konteks pembangunan Nasional, khususnya yang berkaitan dengan perlu tidaknya kita menghadirkan kembali semacam haluan negara sebagai kerangka pembangunan Nasional.

Di tengah situasi yang terus berubah, memang tantangan pembangunan Nasional terus menghadapi kondisi yang paradoks dan sangat kompleks. Tentunya, hal tersebut juga berkaitan

erat dengan sistem kewenangan lembaga MPR dalam situasi perubahan sistem ketatanegaraan yang sudah terjadi selama ini. Untuk itu, penting sekali melakukan agenda penataan secara efektif dan reflektif, baik dalam konteks politis-yuridis ketatanegaraan, maupun yang menyesuaikan dengan realitas sosial historis kehidupan masyarakat.

Tulisan ini mencoba melakukan semacam refleksi kritis terkait dirkursus pembangunan Nasional. Tulisan ini bermaksud untuk menghadirkan sebuah kerangka berpikir kritis untuk mempertanyakan, menguji, sekaligus menimbang ulang GBHN sebagai model yang mengkerangkai sistem perencanaan pembangunan nasional, dan pada saat yang sama juga mencoba menghadirkan petunjuk sekaligus masukan akademis dalam rangka menimbang peluang dan tantangan atas ikhtiar besar perubahan terkait sistem ketatanegaraan bangsa ini.

Lebih lanjut, tulisan ini mencoba melakukan telaah kritis dalam rangka meninjau ulang terkait dinamika wacana reformulasi perencanaan pembangunan Nasional dengan model GBHN. Oleh karena itu, tentu menjadi sangat penting kemudian menghadirkan semacam konsep yang ideal dan memadai dengan tujuan mengkerangkai model ideal dan rasional terkait pembangunan Nasional yang berkelanjutan.

1. Konteks Ketatanegaraan

Debat wacana untuk kembali menguatkan model GBHN sebagai isu pokok dalam konteks ketatanegaraan merupakan respon diskursif yang berangkat dari realitas dinamika politik pembangunan yang terkesan bertumbuh secara liar dan tak terkendali. Selama ini terkesan seolah telah terjadi *overlapping concensus* Nasional-Lokal terkait diskursus model perencanaan pembangunan yang terlanjur terlekat dengan berbagai ketidakjelasan dan ketidakberesan: pragmatis-opportunis, koruptif-manipulatif, boros-mubazir, inefisiensi-inefektifitas, penerabasan aturan main dan entah apapun itu yang terlekat oleh berbagai stereotip negatif.

3 Istilah 'penjahat demokrasi' merupakan adagium yang dikembangkan oleh Verdi Hadiz dalam melihat adanya ancaman serius dan berpotensi besar membajak kehidupan demokrasi dan politik suatu negara akibat dari perilaku aktor atau elit-elit penyelenggara negara dari berbagai arena dan level kekuasaan, baik di pemerintahan maupun mereka dunia pebisnis. Baginya, politik dan demokrasi tetap akan menjadi 'mainan' elit (baca: *'Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat'*, J.Linz, Juan, 2001)

Tentu menjadi penting dan relevan untuk didiskusikan ulang terkait GBHN sebagai semacam manifestasi doktrin ‘*state-led economic development*’⁴ melalui pembangunan berencana tersebut, apakah kemudian masih relevan atau tidak? kalau iya, apa yang mesti dikoreksi dan dievaluasi? Apakah dan kemudian dengan konteks kekinian, apakah memang ada harapan dan peluang besar untuk menghadirkan semacam haluan pembangunan yang relevan dengan konteks penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk jangka panjang, khususnya yang berkorelasi kuat dengan konteks penguatan nilai-nilai Pancasila.

Bahwa, model dan paradigma pembangunan lokal-Nasional yang sejauh ini telah banyak memunculkan kondisi paradoksal, khususnya sejak bergulirnya era otonomi daerah, itu mungkin tidak bisa disangkal. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membela secara membabi-buta tentang model GBHN sebagai model ideal atau formula terbaik terkait sistem pembangunan Lokal-Nasional. Yang menjadi masalah yaitu, realitas arah pembangunan dalam satu dasawarsa lebih ini, tepatnya saat uuforia arus otonomi daerah terus berjalan, malahan menjadi tidak jelas, tidak terarah, seperti berjalan sendiri-sendiri, hebat sendiri-sendiri, dan ironisnya bagus dan berhasil menurut versi sendiri-sendiri pula. Kondisi ini diperparah dengan realitas kepemimpinan di aras lokal yang cenderung lebih banyak didominasi oleh orang-orang bermasalah.

Kondisi tersebut tentunya akan berpengaruh sedikit banyak terhadap upaya penataan dan penguatan ruang pembangunan yang sejalan dengan konteks Pancasila. Konteks yang memastikan sebesar-besarnya peluang bagi semua pihak, tanpa pembedaan dan dikotomi kelas atau strata sosial ekonomi, agar semua penduduk di berbagai wilayah dan daerah di Indonesia mampu merasakan konteks pembangunan berkeadilan yang digelorakan pemerintah pusat maupun daerah dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Persoalan ini tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan konteks pragmatisme politik elit di berbagai aras yang selama ini jamak ditemukan lebih banyak yang terjebak pada sikap perilaku politik yang pragmatis dan oportunis. Hal ini terjelaskan, misalnya saat sebagian besar para pejabat daerah yang terpilih, justru mereka sibuk terlibat pada mobilitas kampanye normatif yang tidak idealogis dan tidak jelas dan kuat visi misinya.

Hal tersebut terkait sekali dengan persoalan visi misi yang dibuat di daerah yang acapkali sangat formal-normatif dan kaku sekali. Visi misi nyaris tak pernah dijadikan instrumen penting, bahkan visi misi yang ada hanya bersifat teknokratis dan lebih sibuk pada isu-isu seksi yang punya daya *market* yang kuat.

Makanya, tidak heran ketika ada begitu banyak kepala daerah yang setelah dilantik, mereka linglung kebingungan, dan bahkan gagal menjalankan visi misinya karena berhadapan dengan banyak persoalan; misalnya harus berhadapan dengan regulasi, relasi dan realitas sosial, konektivitas anggaran dengan pusat, dan berbagai persoalan demografis, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu juga diakibatkan oleh berbagai konflik kepentingan, baik pribadi maupun kelompok yang memiliki fragmentasi yang sangat bermacam ragam.

Lebih lanjut, hal ini tentunya juga sangat terkait dengan beban para elit di daerah dengan tanggung jawab demi menyatukan kepentingan kolektif. Inilah konsekuensi dari warisan kondisi pemerintahan yang dalam kondisi tidak koheren, tidak seintegralistik yang dibayangkan sebelumnya. Jadi, siapapun elit yang berperan, maka akan dihadapkan pada pilihan yang sulit dan rumit oleh beragam model fragmentasi. Demikianlah mengapa justru para elit akan lebih banyak menghabiskan banyak energi untuk mencari rasionalitas yang lebih mendahulukan, sekaligus lebih menguntungkan kepentingan pribadi, dan kelompoknya dalam *setting* liberal yang memang memaksa mereka untuk saling berebut dan memastikan diri jadi pemenang

4 Lihat Purwo Santoso, 2016. ‘GBHN sebagai Kerangka Penggalangan Konsensus’.

dalam setiap ruang kontestasi dan kompetisi.⁵

2. Menelaah Kembali Model GBHN secara Cermat.

Munculnya desakan di berbagai aras, terkait diskursus GBHN sebagai model dan acuan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional, tentu sangat bertalian kuat dengan isu sentralisasi pemerintahan. Belakangan ini muncul beragam ekspresi, di satu sisi ada yang menangkap ini sebagai pertanda buruk bagi menguatnya kembali hasrat sentralisasi yang pernah mendominasi begitu lama sejak rezim Orde Baru.

Nyaris tidak ada peluang atau ruang sedikitpun waktu itu bagi konteks lokalitas untuk bisa berdaya dan berkeaktivitas. Ini juga menandai betapa lemah dan buruknya daulat rakyat. Yang pasti, semuanya seolah serba dikendalikan oleh Jakarta. Sementara itu, di sisi lain, ada yang menangkap ini sebagai momentum besar untuk mengembalikan ruh pembangunan yang lebih terkonsolidasi untuk jangkauan nasib bangsa dan negara dalam jangka panjang. Ini diharapkan menjadi ruang lebar dan leluasa bagi proses deliberasi politik yang berbasis kedaulatan rakyat.⁶ Ini semua berangkat dari realitas perpolitikan pada masa Orde Baru yang sudah terlampau lama melumpuhkan daulat rakyat untuk ikut terlibat menentukan nasib, kepentingan, dan apa saja yang baik untuk mereka.

Demikianlah mengapa pada konteks selanjutnya muncul tarik-menarik kepentingan yang begitu kuat antara pusat dan daerah, hingga akhirnya munculnya ledakan gerakan yang menghendaki adanya pemencaran kekuasaan lewat proyek desentralisasi, atau kemudian disebut sebagai

otonomi daerah. Persoalan lain yang kemudian muncul juga tidak kalah kompleks, apalagi jika merujuk Smith⁷, yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan desentralisasi tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pemerintah pusat, melainkan juga dalam rangka kepentingan lokal. di antara kepentingan daerah yang penting itu diantaranya yaitu terwujudnya persamaan politik (*political equality*), pemerintahan lokal yang bertanggung jawab (*local accountability*), responsifitas masyarakat setempat (*local responsiveness*) terhadap berbagai persoalan publik di aras lokal.

Persoalannya adalah model perencanaan dan pertumbuhan pembangunan justru terkesan terpisah dengan berbagai irisan kebijakan dan arah pembangunan lokal yang berbeda-beda pula, terkesan seolah tidak ada tujuan dan proyek bersama demi kemajuan lokal-nasional yang seimbang dan setara. Inilah kemudian yang dianggap sebagai gagalnya *concensus building* dalam kancah politik pembangunan di negeri ini.

Lalu, dengan berbagai motif sebagai latar belakangnya, fenomena ini menggejala dengan sangat kuat. Yang pasti, realitas politik pembangunan dalam beberapa tahun terakhir memang telah menghadirkan paradoks tersendiri terkait model perencanaan model pembangunan yang terkesan yang gampang berubah-ubah, terkesan adanya inkonsistensi dari setiap adanya perubahan rezim. Dengan model GBHN, maka muncul harapan dan desakan di berbagai aras.

Dengan begitu, setiap kebijakan yang terlahir dari pusat pemerintah Nasional di Jakarta, maka akan bisa diikuti oleh daerah. Itu tentu dilandasi oleh konsensus bersama Lokal-Nasional. Termasuk dalam memperlakukan daerah yang berkarakteristik berbeda-beda tentu harus dikerangkai secara kuat dengan model pembangunan Nasional yang sensitif lokal. Hal ini hanya bisa dilakukan secara optimal jika ruang intervensi tersebut betul-betul mampu pada akhirnya membuka ruang diskursif dan ‘deliberatif’⁸ bagi khalayak publik.

7 Lihat dalam Samsuddin Haris (2002), *”Otonomi Daerah, Demokratisasi, dan Pendekatan Alternatif Resolusi Konflik Pusat-Daerah”*.

8 Model ini tentu berkiblat pada model demokrasi delib-

5 Purwo Santoso, 2012.

6 Ruang baru yang dimaksud yaitu spirit dan model yang tentunya harus jauh lebih berbeda dibandingkan saat diberlakukan pada konteks rezim Orde Baru, yang faktanya jika mengutip hasil kajian Samsuddin Haris (2002) yang menyatakan bahwa hal itu justru telah mengakumulasi kekecewaan rakyat terhadap arah dan kecenderungan pembangunan yang eksploitatif, memarginalkan peran serta kontribusi publik lokal di dalamnya di satu pihak, serta rasa keadilan masyarakat di lain pihak.

Upaya penyatuan sistem pembangunan Nasional model GBHN tersebut pada gilirannya sangat menghendaki hadirnya proses membangun konsensus secara masif. Hal ini tentunya harus melibatkan banyak aktor, tidak hanya di lingkungan pemerintahan, akan tetapi juga instrumen di luar pemerintahan, seperti elemen-elemen ‘*Civil Society*’, dan sebagainya.

3. Lalu, Resentralisasi Model Apa Lagi ?

Spirit dan ikhtiar terkait wacana reformulasi perencanaan pembangunan Nasional dengan model GBHN pada prinsipnya bisa ditangkap sebagai upaya pemerintah pusat untuk mendorong berlangsungnya periode kepemimpinan politik yang bisa saling mendorong dan berkontribusi secara aktif dan masif pula demi mengakselerasi tujuan-tujuan krusial pembangunan Nasional. Untuk itulah mengapa muncul gagasan diskursif terkait pentingnya model perencanaan dan kebijakan yang berkelanjutan (*sustainable policy*). Pada akhirnya, kebijakan tersebut diarahkan mampu memberi petunjuk jelas terkait bagaimana kebijakan pada semua level pemerintahan bisa bersumbu pada sumbu pemerintahan pusat di Jakarta. Seluruh visi misi lokal harus sejalan dan bernalar selaras beriringan dengan konteks yang ada di pusat.

Memang harus diakui pula bahwa selama ini faktanya, justru ada banyak kepala daerah yang visi misinya di daerah justru bertolak belakang dengan visi misi Presiden. Ada visi misi di daerah yang tidak konek dengan pusat. Untuk itu, perlu

eratif yang digagas oleh Jurgen Habermas terkait ruang deliberatif sebagai ruang publik. Kalau Irish Marion Young, lebih menyebutnya sebagai *communicative democracy*, sementara John S Dryzek, menyebutnya sebagai *discursive democracy*. Ini bisa dimaknai sebagai peluang positif bagi berdayanya *people power* (Lihat F.Budi Hardiman:2009; Larry Diamond:2003).

- 9) Berbicara soal *Civil Society* tentu tidak sekedar dari aspek aksi kolektif saja, akan tetapi perlu juga melihat ‘kepadatan asosiasi sipil’ model Touevillean. Termasuk dalam konteks ini bisa berkiblat dari pengalaman efektivitas pemerintahan daerah di Italia Utara yang demokratis dengan padatnya jaringan kerja keterlibatan sipil yang dikembangkan oleh asosiasi sipil setempat. Lihat pengantar Sutoro Eko dalam buku Larry Diamond (2003), ‘*Developing Democracy: Toward Consolidation*’ (terjemahan).

adanya penguatan koneksi atas relasi pusat dan daerah.

Ikhtiar pemerintah yang termaktub dalam Undang-Undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 2005 yang arasnya adalah bermaksud untuk memangkas otoritas lokal di daerah, khususnya daerah tingkat II. Kemudian, mengembalikan otoritas yang dipangkas tersebut ke pemerintah provinsi. Ini artinya level pemerintah daerah akan sangat kuat berada di level gubernur, yang sekaligus juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan presiden. Bisa jadi kalau begini, akan muncul konflik diskursus soal kemungkinan akan kembalinya Pilkada ke konteks parlemen.

Yang menarik dicermati di sini yaitu terkait isi dan substansi dari revisi UU N.32 Tahun 2015 yang dianggap sebagai babakan baru untuk kembali menguatkan isu resentralisasi politik. Jadi ada semacam mobilisasi wacana untuk menarik lagi kewenangan ke pusat. Nanti kebijakan harus didasarkan pada konsensus bersama yang sudah termaktub di dalam GBHN.

Dengan begitu, daerah tidak lagi bisa ‘macam-macam’ atau dalam artian tidak begitu patuh dan sejalan dengan tujuan jangka panjang pemerintahan secara Nasional. Model kepatuhan yang dibangun bukanlah sentralisasi yang represif dan kaku, yang seolah dipaksa menerima begitu saja apa yang dipikirkan di Jakarta sehingga terkesan tidak sensitif dan tidak menerima berbagai inisiatif yang terlahir di tingkat lokal. Adapun model ideal yang hendak dibangun semestinya merupakan model ideal yang dibangun dari spirit deliberasi politik yang diseriuisi secara mendalam.

4. Menimbang Ulang Kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN.

Sebenarnya, sejak awal sudah terbangun kesadaran para tokoh pemimpin bangsa di masa lalu, yang menyadari betul bahwa nyaris selalu ada konteks keterbatasan waktu pada saat itu untuk menetapkan sebuah ketetapan atau aturan. Pun demikian, jelas bahwa harus selalu upaya untuk menyempurnakannya. Jadi

konteks amandemen tidak lagi bisa dihindarkan. Pengalaman romantisme Orde Baru memang tidak bisa kita ulang kembali dalam rangka membangun pembangunan. Apalagi jika melihat konteks ketimpangan pembangunan yang jika merujuk pada pengalaman GBHN yang begitu lama, buktinya ada begitu banyak yang telah menyisakan kegagalan.¹⁰

Kaitannya dengan konteks implementasi dan dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia, maka terlihat bahwa sampai saat ini sudah ada 3 periodisasi presiden kita yang konteks dan realitasnya tanpa GBHN. Konteks ini terlihat bahwa Negara tanpa adanya haluan yang jelas, telah menyebabkan model dan arah pembangunan tidak jelas dan berkelanjutan. Hal ini diakibatkan oleh ‘rezimisasi’ kekuasaan, jadi setiap ganti pejabat atau pemimpin otomatis juga berubah arah pembangunannya. Jika dikaitkan dengan adanya desakan untuk segera menghidupkan kembali GBHN sebagai haluan negara, tentu yang tidak bisa dihindari dari publik yaitu konteks kecurigaan yang tidak bisa dihindari sebagai akibat dari efek traumatik kolektif politik.

Jadi, dalam hal ini yang penting ditegaskan sekaligus dikomitmenkan yaitu praksis GBHN harus mampu memperkuat konteks kemakmuran yang adil dan merata. Perlu konsensus dan kejelasan bersama untuk mewujudkan hal tersebut.

Pun demikian, konteks publik dalam hal ini haruslah diarusutamakan karena publik rakyatlah selaku pemegang daulat tertinggi dalam konstitusi negara. Sejauh ini realitasnya, publik justru kerap diabaikan dan tidak ada ruang yang memadai bagi keterlibatan publik secara aktif dan diskursif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kajian pembangunan.

Sementara itu, tugas dan kewenangan MPR diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 17 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). MPR secara politis dapat mengambil prakarsa-prakarsa untuk mewujudkan kehendak politik rakyat Indonesia. MPR merupakan lembaga negara yang cukup bergengsi karena MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Mereka

dipilih secara langsung sehingga MPR bisa dikatakan sebagai lembaga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Lalu, terkait adanya keinginan MPR untuk diberikan kewenangan kembali untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, itu bisa saja dilakukan asal tidak dibarengi dengan keinginan untuk mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Keinginan untuk menghidupkan GBHN murni dikarenakan untuk menentukan arah pembangunan nasional ke depan.

Lebih lanjut, rumusan model perencanaan pembangunan nasional menjadi sebuah ruang pertarungan jangka panjang bagi nasib pembangunan di berbagai aras. Oleh karena itu, maka inkonsistensi pembangunan oleh perubahan rezim akan menyebabkan nasib pembangunan terjebak dalam kemandegan pembangunan yang tak jelas arah. Oleh karena itu, hadirnya wacana reformulasi perencanaan pembangunan nasional model GBHN sebaiknya dijadikan momentum untuk lebih menjadikan nalar pembangunan sebagai bagian sakral yang sangat mementingkan rasionalitas jangka panjang pembangunan.

Dengan begitu, maka diperlukan komitmen kuat semua pihak untuk terus-menerus membangun konsensus bersama terkait model perencanaan pembangunan yang benar-benar sensitif dan terbuka terhadap berbagai gagasan deliberatif dan diskursif dari publik.

Yang tidak kalah pentingnya yaitu dalam proses penyusunan GBHN bercitarasa Pancasila haruslah mampu menghadirkan ruang dan peluang yang luas bagi publik lintas unsur daerah, setidaknya harus mampu membuka proses diskursif terkait rangkaian kajian yang melibatkan banyak pihak dan pakar dalam menggarap kajian yang lebih kritis, teliti dan komprehensif. Yang tidak kalah penting tentu yaitu hasil proses deliberasi politik dan ruang publik diskursif jangan sampai kemudian menghilangkan atau mengabaikan banyak rekomendasi dan catatan kritis yang sempat muncul di berbagai aras lokal.¹¹

10 Rendy, 2016., “*Ketatanegaraan Transformatif*”.

11 Realitas kekhawatiran ini bukan tanpa alasan mengingat kembali pengalaman rezim Orde Baru, bahkan saat

C. PENUTUP

Beberapa poin penting yang bisa menjadi rujukan dalam rangkaian dari penulisan ini, diantaranya yaitu:

Pertama, MPR pada gilirannya memang perlu diberi wewenang kembali untuk menyusun GBHN untuk kemudian ditetapkan bersama sebagai haluan negara dalam melakukan berbagai program pembangunan Nasional. Tentu model GBHN ini sangat berbeda dibandingkan dengan konteks Orde Baru. Bedanya, GBHN dalam konteks saat ini dan nanti tentu harus diupayakan menjadi model GBHN yang berhaluan Pancasila. Lebih lanjut, upaya penguatan lembaga DPD RI juga sangat mendesak dalam rangka mengimbangi proses politik dan distribusi wewenang secara seimbang dan proporsional bersama pihak DPR RI.

Dalam konteks tersebut, maka menjadi relevan kemudian bagi seluruh *stakeholders* untuk mempersiapkan proses dan langkah menuju amandemen UUD 1945.

Untuk itu, tentu sangat diperlukan sinergitas model kontrol dan kerjasama yang kuat dan konsolidatif agar GBHN benar-benar mampu menggiring model perencanaan pembangunan yang sensitif lokal dan berkelanjutan. Begitu juga kaitannya dengan konteks otonomi daerah, tentu dengan model GBHN ini, nantinya akan mampu mengurangi tensi dan potensi konflik horizontal antar unsur pemerintah daerah.

Kedua, perlu sekali mengkerangkai model

era reformasi, justru konteks hilang dan terputusnya harapan, ide dan gagasan publik di aras lokal akibat dari politik pembahasan di level elit di kabupaten, provinsi, dan bahkan di tingkat pusat acapkali mengebiri proses saluran komunikasi yang sudah sempat di masyarakat dalam berbagai tingkatan terkecil sekalipun. Konteks ini bisa terlihat dari model pembahasan mulai dari Musrenbangdes yang banyak *missing link* ketika sudah berada di tingkatan yang lebih tinggi. Kondisi juga ditambah dengan buruknya sistem representasi suara akar rumput ketika proses pembahasan perencanaan pembangunan yang sangat elitis dan terkesan sangat normatif sehingga tidak jarang justru hanya menjadi ajang pembahasan yang kurang mengakar, baik secara politis maupun emosional. Untuk lebih jauh lihat model deliberasi politik ruang publik Habermas yang diinterpretasi oleh F. Budi Hardiman (2009); '*Demokrasi Deliberatif*'.

pembangunan yang fokusnya kuat, yang dikerangkai dengan konsep Repelita yang ada dalam GBHN. Pun demikian itu semua harus tetap diseriusi serta dikerangkai dengan pelibatan komunitas akademik secara serius dan masif, termasuk juga dalam menangkap sekaligus memahami sedalam mungkin realitas makna dan harapan yang perlu telaah akademik untuk memahami '*real need*' dari masyarakat yang beragam itu sendiri. Jadi tidak akan memadai jikalau hanya mengandalkan nalar para anggota parlemen dalam merumuskan sebuah isu dan kebijakan strategis tanpa adanya mobilisasi pendekatan akademis yang '*teliti dan hati-hati*'.

Ketiga, perlu ikhtiar serius semua pihak, khususnya institusi politik formal untuk sepenuh hati dan tulus dalam mengapresiasi kehadiran '*ruang*' politik informal untuk kemudian bisa dimanfaatkan dan diinstitusionalisasi kultur dan watak berpikirnya yang selama ini jelas sekali begitu efektif, dan sangat sensitif terhadap berbagai kepentingan publik yang sangat plural.

Intinya, perlu menjelatahkan diri secara serius dan mendalam terkait model diskursif yang terbangun di ruang-ruang informal, seperti misalnya: di warung kopi, di ruang-terbuka yang sangat memungkinkan publik dengan berbagai keragaman dan kerumitan yang ada, mampu menghasilkan derajat konsensus yang lebih bermutu tinggi.

Keempat, perlu sekali mendorong semua pihak di berbagai aras untuk bisa menghadirkan sekaligus memperkuat model kepemimpinan yang kuat '*sense of public accountability*-nya'. Itu bisa dilakukan dengan tetap melakukan pendelegasian wewenang dalam rangka memperkuat prakarsa dan kreativitas lokalitas dalam mengakselerasi tujuan pembangunan Nasional. Untuk itu, perlu dibangun konsensus secara serius dan mendalam.

Kelima, perlu dan mendesak sekali untuk memperkuat basis kemitraan (*partnership*) dengan semua *stakeholders* di pemerintahan maupun swasta, termasuk dengan pihak masyarakat pemangku adat dalam rangka mengafirmasi sekaligus mengakselerasi tujuan pembangunan Nasional.

3.1 Kesimpulan

Semestinya memang seluruh ikhtiar pembangunan bisa berjalan sinergis dan berkelanjutan walaupun periode kepemimpinan politik berubah. Oleh karena itu, perlu kemudian untuk kembali memperkuat posisi, eksistensi, tugas dan wewenang MPR sebagai salah satu lembaga tertinggi negara yang bertugas menyusun dan menetapkan GBHN yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk Repelita.

Menjadi penting dan mendesak juga kemudian untuk menghadirkan konteks GBHN yang berhaluan Pancasila, agar model pembangunan ini bisa berkontribusi kuat dalam menyelaraskan berbagai ikhtiar pembangunan fisik maupun nir-fisik dengan menjadikan setiap nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap silanya bisa terejawantahkan secara kuat dan bermakna, dan tentunya dengan tetap memastikan setiap proses yang berlangsung bisa berdimensi demokratis.

Pun demikian, tentu harus terjalin konsolidasi serius dan sepuh hati yang bisa menjadi arus utama dalam kerangka berpikir dan praksis politik para anggota parlemen. Ini tentunya harus diikuti ikhtiar semua pihak, khususnya dalam harmonisasi politik parlemen, eksekutif di aras lokal dan nasional. Ini tentu menjadi proyek ambisius untuk modeling otonomi daerah ideal yang tetap dikerangkai dengan model GBHN. Itu artinya akan ada dan memang perlu dilakukannya amandemen konstitusi oleh MPR RI.

Model perencanaan pembangunan nasional menjadi sebuah ruang pertarungan jangka panjang bagi nasib pembangunan di berbagai aras. Inkonsistensi pembangunan oleh perubahan rezim akan menyebabkan nasib pembangunan terjebak dalam kemandegan pembangunan yang tak jelas arah. Oleh karena itu, hadirnya wacana reformulasi perencanaan pembangunan nasional model GBHN sebaiknya dijadikan momentum untuk lebih menjadikan nalar pembangunan sebagai bagian sakral yang sangat mementingkan rasionalitas jangka panjang pembangunan. Untuk

itu, diperlukan komitmen kuat semua pihak untuk terus-menerus membangun konsensus bersama terkait model perencanaan pembangunan yang benar-benar sensitif dan terbuka terhadap berbagai gagasan deliberatif dan diskursif dari publik. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi di berbagai aras dan penegasan kembali haluan negara agar penyelenggaraan negara, dari pusat hingga daerah, berjalan lebih fokus dan kompak.

GBHN model baru adalah proyek bersama untuk menyelaraskan *grand design* jangka panjang pembangunan Nasional. Memperkuat konteks GBHN yang dibangun dengan basis di atas konsensus yang melibatkan secara aktif dan masif berbagai pihak, khususnya komunitas akademik dan juga komunitas gerakan dan swadaya masyarakat menjadi sangat mendesak dilakukan.

Daftar Pustaka

Sumber buku/dokumen:

- Diamond, Larry, 2003 (terjemahan)., *“Developing Democracy: Toward Consolidation*, IRE Press, Yogyakarta.
- F.Budi Hardiman, 2009., *“Demokrasi Deliberatif: Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’* dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas, Pustaka Filsafat-Kanisius, Yogyakarta.
- Riswandha Imawan, dkk, 2002., *“Konflik dan Kinerja Pemerintah Daerah”*, Jurnal Ilmu Politik AIPI, Jakarta.
- Rendy Hamzah, 2016., (Desember) *“Transformasi Kewenangan MPR”*, paper makalah pembahas Workshop Pancasila, Konstitusi, dan Ketatanegaraan’. Kerjasama Badan Pengkajian MPR RI dan UBB.
- Rendy Hamzah, 2016., (April) *“Paper FGD ‘Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model*

GBHN, kerjasama Center For Electoral and Political Parties (CEPP) FISIP Universitas Indonesia bersama FISIP Universitas Bangka Belitung.

<http://m.suarakarya.id/2015/09/15/negara-tanpa-haluan.html?replytocom=7507>, didownload pada 17 April 2016, 19.30.

Rendy Hamzah, 2016., (oktober) “Ketatanegaraan Transformatif: Meretas Konsensus, Ruang, dan Peluang-Membendung Traumatik Politik Publik”. Paper Diskusi Ketatanegaraan, Kerjasama Badan Pengkajian MPR RI dan UBB.

Abdul Munir Mulkhan, dkk, 2007., “Teori Demokrasi Deliberatif”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisipol UGM Vol.11, No.1 Juli 2007, Yogyakarta

J.Linz, Juan, 2001, ‘Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain. Mizan, Bandung.

J. Linz, Juan, 2001, Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain. Bandung, Mizan

Sumber internet:

Purwo Santoso. “Melepas Bingkai Pemikiran Patologis: Membaca Ulang Dinamika Elit Lokal Dalam Pemerintahan Daerah”, didownload dari http://www.academia.edu/paperupload/melepas-bingkai-pemikiran-patologis:_membaca-ulang-dinamika-elit-lokal-dalam-pemerintahan-daerah.html; didownload pada Minggu, 17 April 2016, 19.00.

Purwo Santoso, https://www.academia.edu/24503010/GBHN_Sebagai_Kerangka_Penggalangan_Konsensus. Didownload pada 19 Juni 2017. Pukul 13.18.

<http://www.ugm.ac.id/id/berita/4481pakar:.gbhn.dihapus.pembangunan.nasional.mengalami.kemunduran>; didownload pada Jumat, 15 April 2016, 19.25

PENGARUH EFIKASI DIRI DAN KECERDASAN MENGHADAPI RINTANGAN TERHADAP NIAT BERWIRAUSAHA PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

Imam Ghozali, S.Psi.,M.Si¹ · Dr. Alimatus Sahrah, M.M.,M.Si²

¹Program Magister Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

²Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

E-mail: dhavy_alruslian@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi pengaruh efikasi diri dan kecerdasan menghadapi rintangan terhadap niat berwirausaha pada mahasiswa fakultas ekonomi di Universitas Bangka Belitung. Subjek penelitian ini berjumlah 75 mahasiswa dengan karakteristik subjek adalah mahasiswa aktif fakultas ekonomi Universitas Bangka Belitung dan telah mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala niat berwirausaha, skala efikasi diri dan skala kecerdasan menghadapi rintangan. Teknik analisis statistik penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berwirausaha dengan $p = 0.000$ ($p < 0.01$), dan koefisien determinannya sebesar 41.7 %. Kecerdasan menghadapi rintangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berwirausaha dengan $p = 0.000$, nilai koefisien determinasi sebesar 18.3%. Secara simultan menunjukkan ada pengaruh efikasi diri dan kecerdasan menghadapi rintangan secara bersama-sama terhadap niat berwirausaha dengan p sebesar 0.000 ($p < 0.01$). Koefisien determinasi sebesar 0.419. Hal ini berarti bahwa faktor efikasi diri dan kecerdasan menghadapi rintangan mampu memprediksi variabel niat berwirausaha sebesar 41.9 %, sedangkan 58.1 % diprediksi oleh variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Efikasi Diri, Kecerdasan Menghadapi Rintangan, Niat Berwirausaha

ABSTRACT

The objective of this study is to predict the effect of self-efficacy and adversity intelligence of the intention of entrepreneurship among students in Faculty of Economy, Bangka Belitung University. Subjects of the study were 75 students with characteristics of active students in Faculty of Economy, Bangka Belitung University, and attending the subject of entrepreneurship. The data used in the study were collected using an entrepreneurship intention scale, a self-efficacy scale, and adversity intelligence. The data were analyzed by using a multiple linear regression technique. Results of the study indicate that the self-efficacy had a significantly positive effect on entrepreneurship intention with $p = 0.000$ ($p < 0.01$) and a determinant coefficient of 41.7%, while the adversity intelligence had a significantly positive effect on entrepreneurship intention with $p = 0.000$ and a determinant coefficient of 18.3%. Moreover, the result also shows that both self-efficacy and adversity intelligence simultaneously had a significantly positive effect on entrepreneurship intention with p of 0.000 ($p < 0.01$) and a determinant coefficient of 0.419. This means that self-efficacy and adversity intelligence were able to predict the entrepreneurship intention of 41.9%, while 58.1% was predicted by other variables that were not measured in the study.

Keywords: Self-Efficacy, Adversity Intelligence, Entrepreneurship Intention

A. Latar Belakang

Pengembangan kewirausahaan beberapa tahun terakhir memang telah menjadi isu lembaga-lembaga ekonomi mulai dari tingkat daerah, nasional bahkan internasional. Kewirausahaan memiliki kontribusi besar bagi perekonomian suatu negara. Kewirausahaan diyakini bahwa merupakan kunci untuk sejumlah hasil sosial yang diinginkan, termasuk pertumbuhan ekonomi, pengangguran yang lebih rendah dan modernisasi teknologi (Baumol, *et al.* 2007).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam kurun waktu satu tahun tingkat pengangguran di Indonesia mengalami pertambahan sebanyak 300 ribu jiwa. Pengangguran untuk lulusan strata satu (S1) pada Februari 2015 menjadi 5,34 persen dibanding Februari tahun lalu yang hanya 4,31 persen. Begitu juga lulusan diploma mengalami peningkatan pengangguran dari 5,87 persen menjadi 7,49 persen. Serta pengangguran lulusan SMK yang bertambah dari 7,21 persen menjadi 9,05 persen (CNN Online, 2015).

Lebih lanjut, berdasarkan data yang dirangkum oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bangka Belitung (Babel) dari berbagai kabupaten/kota menyebutkan angka pengangguran pada bulan September 2012 turun menjadi 3,4 persen dari April 3,6 Persen. Tingkat pengangguran di Babel pada angka 3,4 persen dari jumlah penduduk sekitar 1,3 juta jiwa. Jadi plus minus hanya sekitar 21 ribu yang masih masuk dalam kategori pengangguran. Angka pengangguran tertinggi berada pada usia produktif seusia menamatkan pendidikan sekolah berkisar umur 18-25 tahun (Radar Bangka, 2012).

Berdasarkan hasil wawancara lebih mendalam peneliti kepada 15 mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung pada tanggal 20 Juni 2016 diperoleh keterangan terkait dengan beberapa dimensi niat berwirausaha sebagai berikut: a) memilih jalur usaha daripada bekerja pada orang lain. Hal ini teridentifikasi dari mereka lebih baik bekerja kepada orang lain, karena bekerja dengan orang lain uang

perbulannya jelas. b) memilih karir sebagai wirausaha. Hal ini teridentifikasi dari sumber daya yang ada disekitar mereka terutama keluarga banyak menjadi karyawan, sehingga memilih karir sebagai karyawan saja ketimbang berniat membuka usaha sendiri. c) perencanaan untuk memulai usaha. Hal ini dapat terlihat dari jika nanti lulus nanti dari perkuliahan, belum punya rencana ingin membuka usaha sendiri, karena rencana kedepan ingin melamar pekerjaan di kantor pemerintahan atau perusahaan.

Berhadapan dengan kenyataan di atas, maka pembentukan dan peningkatan niat berwirausaha menjadi sesuatu yang penting. Pentingnya dilakukan penelitian niat berwirausaha bagi mahasiswa di fakultas ekonomi Universitas Bangka Belitung adalah untuk meningkatkan niat berwirausaha para mahasiswa tersebut. Adanya niat berwirausaha yang tinggi diharapkan membawa dampak positif bagi perguruan tinggi maupun negara. Bagi perguruan tinggi mempersiapkan masa depan peserta didik (SDM) yang tampil unggul dalam persaingan pasar tenaga kerja memberikan dampak baik untuk calon konsumen (mahasiswa) memilih perguruan tinggi tersebut. Konsumen akan berusaha memilih perguruan tinggi yang mampu memenuhi atau memuaskan harapan. Para mahasiswa yang puas cenderung menjadi loyal terhadap perguruan tinggi yang bersangkutan, selanjutnya mahasiswa tersebut merekomendasikan kepada para calon mahasiswa terhadap perguruan tinggi tersebut (Frederica & Marvianta, 2013). Sedangkan dampak positif bagi negara adalah agar mencapai Indonesia yang berdaya saing tinggi, dibutuhkan para wirausaha muda (mahasiswa) yang kreatif.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi niat berwirausaha menurut Indarti (2004): a) faktor kepribadian: dapat ditunjukkan dari beberapa variabel seperti *self efficacy*, *risk taking*, kreativitas, inovasi, *locus of control* serta berbagai indikator kecerdasan seperti IQ, EQ, SQ dan yang terbaru adalah AQ (*Adversity Quotient*) atau AI (*Adversity Intelligent*) atau kecerdasan menghadapi rintangan. b) faktor lingkungan, yang dilihat pada tiga elemen kontekstual: akses

kepada modal, informasi dan jaringan sosial; dan c) faktor demografis: jender, umur, latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja.

Dari sekian banyak faktor-faktor yang mempengaruhi niat berwirausaha, maka disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat dua faktor yang mempengaruhi niat berwirausaha mahasiswa di fakultas ekonomi Universitas Bangka Belitung yakni faktor efikasi diri dan faktor kecerdasan menghadapi rintangan. Kedua faktor tersebut penting diteliti untuk mengetahui pengaruhnya dengan niat berwirausaha. Pentingnya efikasi diri dalam niat berwirausaha menurut pendapat Hacket dan Betz (dalam Wiyanto, 2014) efikasi diri dalam diri seseorang adalah domain yang menggambarkan pendapat pribadi seseorang dalam hubungannya dengan proses pemilihan dan penyesuaian karir.

Selain faktor efikasi diri, faktor lain yang penting diteliti untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi niat berwirausaha adalah kecerdasan menghadapi rintangan. Kecerdasan menghadapi rintangan penting diteliti sebagai faktor yang mempengaruhi niat berwirausaha dengan pendasaran pada penelitian menurut Wijaya (2007) dan Zahreni & Pane (2012) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap niat berwirausaha.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini meliputi: bagian pertama apakah terdapat korelasi antara tingkat efikasi diri dengan niat untuk berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Bangka Belitung. Bagian kedua apakah terdapat korelasi antara tingkat kecerdasan menghadapi rintangan dengan niat untuk berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Bangka Belitung. Bagian ketiga apakah terdapat sinergi tingkat efikasi diri dan kecerdasan menghadapi rintangan dalam memprediksi tingkat niat untuk berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Bangka Belitung.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi

pengaruh efikasi diri dan kecerdasan menghadapi rintangan terhadap niat berwirausaha pada mahasiswa fakultas ekonomi di Universitas Bangka Belitung.

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yakni :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang psikologi khususnya psikologi industri dan organisasi, khususnya tentang pengaruh efikasi diri dan kecerdasan menghadapi rintangan terhadap niat berwirausaha pada mahasiswa. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik dan komprehensif yang berkaitan dengan efikasi diri, kecerdasan menghadapi rintangan dan niat berwirausaha.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan kepada universitas khususnya Universitas Bangka Belitung dalam upaya meningkatkan jumlah dan mutu calon wirausaha muda (SDM) dengan cara mendorong budaya berwirausaha pada mahasiswa yakni dengan meningkatkan niat mahasiswa untuk berwirausaha melalui efikasi diri dan kecerdasan menghadapi rintangan

C. Tinjauan Pustaka

1. Niat Berwirausaha

Menurut Fishbein & Ajzen (1975) intensi merupakan komponen dalam diri individu yang mengacu pada keinginan untuk melakukan tingkah laku tertentu. Menurut Krueger (dalam Tanjungsari & Hani, 2013), intensi berwirausaha mencerminkan komitmen seseorang untuk memulai usaha baru dan merupakan isu sentral yang perlu diperhatikan dalam memahami proses kewirausahaan pendirian usaha baru. Intensi

berwirausaha dapat diartikan sebagai proses pencarian informasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembentukan suatu usaha.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa niat berwirausaha adalah keinginan atau niat seseorang untuk mencoba dan merencanakan dalam melakukan suatu tindakan wirausaha.

2. Dimensi-Dimensi Niat Berwirausaha

Menurut Ramayah & Harun (dalam Paulina & Wardoyo, 2012) Intensi berwirausaha dapat ditinjau dari tiga dimensi, yaitu

- a. Memilih jalur usaha daripada bekerja pada orang lain. Dimensi ini menjelaskan bahwa individu lebih baik memilih jalur untuk berwirausaha daripada bekerja kepada orang lain, membuka lapangan pekerjaan sendiri
- b. Memilih karir sebagai wirausaha. dimensi ini menjelaskan bahwa individu lebih memilih karirnya sebagai wirausahawan ketimbang harus mencari karir yang lain diluaran
- c. Perencanaan untuk memulai usaha. Dimensi ini menjelaskan bahwa individu sudah merencanakan untuk memulai usahanya sejak memutuskan berwirausaha.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Berwirausaha

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi niat berwirausaha menurut Indarti (2004):

- a. Faktor kepribadian: dapat ditunjukkan dari beberapa variabel seperti *self efficacy*, *risk taking*, kreativitas, inovasi, *locus of control* serta berbagai indikator kecerdasan seperti IQ, EQ, SQ dan yang terbaru adalah AQ (*Adversity Quotient*) atau AI (*Adversity Intelligent*) atau kecerdasan menghadapi rintangan.

- b. Faktor lingkungan

Lingkungan antara lain lingkungan keluarga, teman, sekolah. Lingkungan sekitar mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan individu. dilihat pada tiga elemen kontekstual yaitu akses kepada

modal, informasi dan jaringan sosial

- c. Faktor demografis: jender, umur, latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja.

4. Efikasi Diri

Menurut Bandura (dalam Andika & Madjid, 2012) mendefinisikan efikasi diri adalah sebagai kepercayaan seseorang atas kemampuan dirinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau dengan kata lain, kondisi motivasi seseorang yang lebih didasarkan pada apa yang dipercaya daripada apa yang secara obyektif benar. Persepsi pribadi seperti ini memegang peranan penting dalam pengembangan intensi seseorang.

5. Dimensi-Dimensi Efikasi Diri

Menurut Bandura (1977) menjelaskan bahwa efikasi terdiri dari beberapa dimensi-dimensi yaitu

- a. *Magnitude* (Tingkat Level)

Dimensi ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika individu merasa mampu untuk melakukannya.

- b. *Strength* (Kekuatan)

Mengacu pada ketahanan dan keuletan individu dalam menyelesaikan masalah. Individu yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan masalah akan terus bertahan dalam usahanya meskipun banyak kesulitan dan tantangan.

- c. *Generality* (Generalisasi)

Mengacu pada penilaian efikasi individu berdasarkan aktivitas keseluruhan tugas yang pernah dijalaninya.

6. Kecerdasan Menghadapi Rintangan

Menurut Stoltz (2000), teori kecerdasan menghadapi rintangan adalah suatu kemampuan untuk mengubah hambatan menjadi suatu peluang keberhasilan mencapai tujuan. Kecerdasan dalam menghadapi rintangan dapat menentukan siapa yang akan berhasil melampaui harapan-harapan atas kinerja dan potensi-potensi yang ada (Stoltz, 2000).

7. Dimensi - Dimensi Kecerdasan Menghadapi Rintangan

Menurut Stoltz (2000), kecerdasan dalam menghadapi rintangan individu memiliki empat dimensi yaitu :

a. *Control* (Kendali)

Dimensi ini ditunjukkan untuk mengetahui seberapa banyak kendali yang dapat kita rasakan terhadap suatu peristiwa yang menimbulkan kesulitan.

b. *Origin and Ownership* (Asal usul dan Pengakuan)

Dimensi ini mempertanyakan siapa atau apa yang menimbulkan kesulitan dan sejauh mana seseorang menganggap dirinya mempengaruhi dirinya sebagai penyebab dan asal usul kesulitan.

c. *Reach* (Jangkauan)

Kemampuan individu dalam menjangkau dan membatasi masalah agar tidak menjangkau bidang-bidang yang lain dari kehidupan individu.

d. *Endurance* (Daya Tahan)

Dimensi *endurance* mempertanyakan dua hal, yaitu berapa lamakah suatu kesulitan akan berlangsung dan berapa lama penyebab dari kesulitan akan berlangsung.

Peneliti menggunakan dimensi-dimensi kecerdasan menghadapi rintangan dari teori Stoltz (2000) dengan alasan bahwa teori ini terperinci dan dimensi-dimensi ini penting untuk mengukur tingkat kecerdasan menghadapi rintangan pada mahasiswa.

8. Pengaruh Efikasi Diri dan Kecerdasan Menghadapi Rintangan Terhadap Niat Berwirausaha Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Di Universitas Bangka Belitung

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi niat berwirausaha menurut Indarti (2004): a) faktor kepribadian: dapat ditunjukkan dari beberapa variabel seperti *self efficacy*, *risk taking*, kreativitas, inovasi, *locus of control* serta berbagai indikator kecerdasan seperti IQ, EQ, SQ dan yang

terbaru adalah AQ (*Adversity Quotient*) atau AI (*Adversity Intteligent*) atau kecerdasan menghadapi rintangan. b) faktor lingkungan, yang dilihat pada tiga elemen kontekstual: akses kepada modal, informasi dan jaringan sosial; dan c) faktor demografis: jender, umur, latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja.

Dari sekian banyak faktor-faktor yang mempengaruhi niat berwirausaha, peneliti memilih faktor efikasi diri sebagai salah satu variabel independen. Pentingnya efikasi diri dalam niat berwirausaha merujuk Hacket dan Betz (dalam Wiyanto, 2014) efikasi diri dalam diri seseorang adalah domain yang menggambarkan pendapat pribadi seseorang dalam hubungannya dengan proses pemilihan dan penyesuaian karir. Variabel independen lainnya adalah kecerdasan menghadapi rintangan. Hal ini dapat didukung oleh penelitian menurut Wijaya (2007) dan penelitian menurut Zahreni & Pane (2012) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kecerdasan menghadapi rintangan terhadap niat berwirausaha.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasinya adalah mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung angkatan 2013-2015. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 75 orang mahasiswa dengan karakteristik subyek a) Mahasiswa aktif fakultas ekonomi Universitas Bangka Belitung dari angkatan 2013-2015. b) Mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Bangka Belitung yang telah mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa tersebut telah memiliki suatu pandangan terhadap ilmu ekonomi terutama tentang kewirausahaan. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan skala sebagai alat pengumpulan data. Adapun skala

yang digunakan adalah skala niat berwirausaha, yang penyusunan skalanya didasarkan pada penelitian menurut (Ramayah & Harun, dalam Paulina & Hardoyo, 2012) a. memilih jalur usaha sendiri daripada bekerja pada orang lain, b. memilih karir sebagai wirausaha dan c. perencanaan untuk memulai usaha, sebagaimana terungkap dalam skala niat berwirausaha.

Selain skala niat berwirausaha, penelitian ini juga menggunakan skala efikasi diri dan kecerdasan menghadapi rintangan. Penyusunan skala efikasi diri didasarkan penelitian menurut Bandura (1977) yang terdiri dari a. *magnitude* (tingkat kesulitan), b. *strength* (kekuatan), dan c. *generality* (generalisasi), sebagaimana terungkap dalam skala efikasi diri. Untuk kecerdasan menghadapi rintangan penyusunan skalanya didasarkan pada penelitian Stoltz (2000) yaitu a. *Control* (kendali), b. *Origin and Ownership* (asal usul dan pengakuan), c. *Reach* (jangkauan), d. *Endurance* (daya tahan), sebagaimana terungkap dalam skala kecerdasan menghadapi rintangan.

Skala ini disusun menurut model skala Likert yang terdiri dari beberapa pernyataan. Tiap butir pernyataan disediakan empat buah pernyataan *favorable* dan *unfavorable*. Dari hasil uji coba, diperoleh laporan bahwa besarnya validitas aitem niat berwirausaha diperoleh dari korelasi item total yang telah dikoreksi berkisar antara 0.307-0.737; dan koefisien reliabilitas alpha sebesar 0.910. Hasil uji validitas skala efikasi diri berkisar 0.308-0.816, dengan nilai koefisien reliabilitas alpha sebesar 0.949, sedangkan untuk skala kecerdasan menghadapi rintangan dapat dilaporkan besarnya validitas aitem berkisar antara 0.351-0.790 ; dan koefisien reliabilitas alpha sebesar 0.950, Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis statistic dengan teknik analisis regresi.

E. Pembahasan

1. Uji Asumsi Data Penelitian

Mengacu pada kondisi data penelitian yang terdistribusi normal, linear, dan memenuhi asumsi multikolinearitas, maka analisis untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat diteruskan

dengan menggunakan teknik analisis regresi.

2. Uji Hipotesis Penelitian

a. Uji Hipotesis Secara Simultan (Hipotesis Mayor)

Hasil Uji F Regresi Linier Berganda

Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
2261.682	2	1130.841	25.938	.000^a
3138.985	72	43.597		
5400.667	74			

Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai nilai $p = 0,000$ atau nilai $p < 0,01$, Maka dapat disimpulkan bahwa efikasi diri dan kecerdasan menghadapi rintangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap niat berwirausaha. Dengan demikian hipotesis mayor dalam penelitian ini diterima.

Koefisien determinasi (sumbangan efektif) dari ketiga variabel bebas untuk memprediksi variabel dependen dapat kita analisa dari nilai R^2 yang tampak pada tabel berikut :

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.647 ^a	.419	.403	6.603

Berdasarkan tabel didapatkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,419, hal ini berarti bahwa faktor efikasi diri dan kecerdasan menghadapi rintangan mampu memprediksi variabel niat berwirausaha sebesar 41.9 %, sedangkan 58.1 % diprediksi oleh variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.

Persamaan garis regresi yang didapatkan dari analisa regresi ganda hasil uji statistik dapat kita lihat berdasarkan tabel berikut:

Nilai Persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	16.417	10.902		1.506	.136
EF	.813	.150	.693	5.405	.000
KMR	.077	.148	.066	.519	.606

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut telah menghasilkan koefisien-koefisien regresi (*unstandardized*) dengan rumus : $Y = + + K$ maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut. $Y = 16.417 + 0.813 X_1 + 0.077 X_2$

a. Uji Hipotesis Secara Parsial (Hipotesis Minor 1)

Derajat signifikansi yang digunakan adalah < 0,01. Hasil analisis uji F regresi linear sederhana dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Hasil Uji F Regresi Linear Sederhana

Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
2249.958	1	2249.958	52.130	.000^a
3150.709	73	43.160		
5400.667	74			

Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai $p = 0,000$ atau nilai $p < 0,01$. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif antara efikasi diri dengan niat berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Bangka Belitung. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Hasil Koefisien Determinasi X1 dengan Y

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.645 ^a	.417	.409	6.570

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,417, hal ini berarti bahwa faktor efikasi diri mampu memprediksi variabel niat berwirausaha sebesar 41,7 %, sedangkan 58,3 % diprediksi oleh variabel yang lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.

b. Uji Hipotesis Secara Parsial (Hipotesis Minor 2)

Hasil Uji F Regresi Linear Sederhana

Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
988.065	1	988.065	16.346	.000^a
4412.602	73	60.447		
5400.667	74			

Berdasarkan hasil analisa data di atas diperoleh nilai $p = 0,000$ atau nilai $p < 0,01$. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif antara kecerdasan menghadapi rintangan dengan niat berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Bangka Belitung. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Koefisien determinasi (sumbangan efektif) dari kecerdasan menghadapi rintangan untuk memprediksi niat berwirausaha dapat dilihat dari nilai R square (R^2) yang tampak pada tabel berikut:

Hasil Koefisien Dermininasi X2 dengan Y

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.428 ^a	.183	.172	7.775

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.183, hal ini berarti bahwa faktor kecerdasan menghadapi rintangan mampu memprediksi variabel niat berwirausaha sebesar 18,3 %, sedangkan 81,7 % diprediksi oleh variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pada hipotesis satu berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh p sebesar 0.000 ($p < 0.01$) artinya ada pengaruh positif antara efikasi diri dengan niat berwirausaha pada mahasiswa di fakultas ekonomi Universitas Bangka Belitung. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri pada mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Bangka Belitung berada dalam kategori tinggi yakni sebesar 61.33 % atau 46 orang sedangkan 38.67 % atau 29 orang berada dalam kategori sedang. Sementara, sumbangan efektif (R^2) sebesar 0,417, hal ini berarti bahwa faktor efikasi diri mampu memprediksi variabel niat berwirausaha sebesar 41.7 %, sedangkan 58,3 % diprediksi oleh variabel yang lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Ini berarti bahwa

sebagian besar mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Bangka Belitung dengan tingkat efikasi diri yang tinggi.

Hal ini dapat teridentifikasi dari dimensi-dimensi menurut Bandura (1977) terlihat bahwa mahasiswa yang memiliki efikasi diri yang tinggi mampu untuk melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan batas kemampuannya (*Magnitude*) sehingga memberikan keyakinan pada mahasiswa untuk berniat memilih jalur usaha daripada harus bekerja kepada orang lain, memilih untuk berkarir menjadi wirausaha dan berencana untuk memulai berwirausaha (Ramayah & Harun dalam Paulina & Hardoyo, 2012).

Temuan selanjutnya, mahasiswa memiliki keyakinan yang kuat (*Strength*) terhadap kemampuannya dan semangat pantang menyerah untuk menyelesaikan masalah dalam usahanya. Semakin tinggi keyakinan mahasiswa maka semakin berniat untuk memilih jalur usaha daripada bekerja kepada orang lain, memilih untuk berkarir menjadi wirausaha dan berencana untuk memulai usaha.

Hipotesis kedua berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh p sebesar 0,000 ($p < 0.01$) artinya bahwa ada pengaruh positif antara kecerdasan menghadapi rintangan dengan niat berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Bangka Belitung. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan menghadapi rintangan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Bangka Belitung berada dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 58,67 % atau sebanyak 44 orang. Sedangkan subyek yang memiliki kecerdasan menghadapi rintangan pada kategori sedang sebanyak 41,33% atau sebanyak 31 orang. Sementara, sumbangan efektif (R^2) sebesar 0.183, hal ini berarti bahwa faktor kecerdasan menghadapi rintangan mampu memprediksi variabel niat berwirausaha sebesar 18,3 %, sedangkan 81,7 % diprediksi oleh variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.

Hal ini dapat teridentifikasi melalui dimensi dimensi menurut Stoltz (2000) terlihat dari

mahasiswa memiliki kecerdasan menghadapi rintangan yang tinggi mampu mengendalikan (*control*) situasi tertentu dalam hal ini berwirausaha dengan pemahaman bahwa sesuatu apapun itu dapat dikendalikan dan dilakukan. Kendali (*control*) merupakan optimisme individu mengenai situasi yang dihadapi, apabila situasi berada dalam kendali individu maka dalam diri individu akan membentuk intensi menyelesaikan masalah. Individu yang memiliki kendali yang tinggi akan berinisiatif menangkap peluang yang ada dengan memilih jalur usaha daripada bekerja pada orang lain, memilih berkarir sebagai wirausaha dan merencanakan untuk memulai usaha (Ramayah dan Harun dalam Paulina & Hardoyo, 2012)..

Adapun temuan selanjutnya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi usul dan pengakuan (*origin dan ownership*) yang merupakan faktor awal tindakan individu. Mahasiswa yang menganggap wirausaha bagian dari masalah dalam dirinya maka akan memiliki kreativitas, kemandirian untuk memilih berwirausaha daripada bekerja pada orang lain, memilih karir sebagai wirausaha dan merencanakan untuk memulai usaha.

Mahasiswa mampu menjangkau (*reach*) dan membatasi masalah agar tidak menjangkau bidang-bidang yang lain seperti ketika ada masalah dalam menjalankan usaha, individu mampu menjangkau agar masalah tersebut tidak mengganggu aktivitas yang lain. Ketika individu mampu menjangkau dan membatasi masalah, memiliki niat untuk memilih jalur usaha daripada bekerja pada orang lain, memilih untuk berkarir menjadi wirausaha dan merencanakan dengan matang untuk berwirausaha.

Temuan berikutnya adalah mahasiswa mampu untuk bertahan (*endurance*) dalam waktu yang lama dalam menghadapi permasalahan dengan menciptakan ide dalam mengatasi masalah sehingga ketegaran hati dan keberanian dalam penyelesaian masalah dapat terselesaikan dengan baik. Individu yang menganggap peluang wirausaha bukan suatu masalah yang menghabiskan waktu akan berupaya memilih

jalur usaha daripada bekerja pada orang lain, memilih wirausaha sebagai karir dan melakukan perencanaan untuk memulai usaha (Ramayah dan Harun dalam Paulina & Hardoyo, 2012).

Hipotesis ketiga, berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh hasil $p = 0.000$ ($p < 0.01$) artinya bahwa variabel efikasi diri dan kecerdasan menghadapi rintangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap niat berwirausaha mahasiswa. Semakin tinggi efikasi diri dan kecerdasan menghadapi rintangan maka niat berwirausaha mahasiswa tinggi, sebaliknya makin rendah efikasi diri dan kecerdasan menghadapi rintangan mahasiswa, maka semakin rendah niat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Bangka Belitung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumbu-bangan efektif dari efikasi diri dan kecerdasan menghadapi rintangan terhadap niat berwirausaha sebesar 0.419, hal ini berarti bahwa faktor efikasi diri dan kecerdasan menghadapi rintangan mampu memprediksi variabel niat berwirausaha sebesar 41.9%, sedangkan 58.1% diprediksi oleh variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini misalnya misalnya faktor kepribadian dapat ditunjukkan dari beberapa variabel seperti *risk taking*, kreativitas, inovasi, *locus of control*. faktor lingkungan, yang dilihat pada tiga elemen kontekstual: akses kepada modal, informasi dan jaringan sosial; dan faktor demografis: jender, umur, latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja (Indarti, 2004).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa secara bersama-sama, jika efikasi diri dan kecerdasan menghadapi rintangan tinggi maka niat berwirausaha pada mahasiswa juga tinggi, sebaliknya jika efikasi diri dan kecerdasan menghadapi rintangan rendah maka niat berwirausaha mahasiswa juga akan rendah.

Setelah diketahui prediksi dari variabel efikasi diri dan kecerdasan menghadapi rintangan terhadap niat berwirausaha, baik secara parsial maupun simultan, peneliti juga melihat secara khusus bagaimana hubungan antara efikasi diri dengan kecerdasan menghadapi rintangan. Dari hasil uji interkorelasi diketahui bahwa efikasi diri

berpengaruh terhadap peningkatan kecerdasan menghadapi rintangan. Hal ini berarti efikasi diri penting untuk meningkatkan kecerdasan menghadapi rintangan dan niat berwirausaha menjadi tinggi. Namun sebaliknya, kecerdasan menghadapi rintangan tidak berpengaruh terhadap efikasi diri. Hal ini berarti kecerdasan menghadapi rintangan tidak begitu penting untuk meningkatkan efikasi diri. Efikasi diri tetap memiliki pengaruh yang tinggi terhadap niat berwirausaha tanpa harus melihat atau dikontrol dengan kecerdasan menghadapi rintangan.

F. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

1. Ada pengaruh antara efikasi diri dan kecerdasan menghadapi rintangan dengan niat berwirausaha pada mahasiswa fakultas ekonomi di Universitas Bangka Belitung. Artinya bahwa variabel efikasi diri dan kecerdasan menghadapi rintangan secara bersama-sama meningkatkan niat berwirausaha mahasiswa.
2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara efikasi diri dengan niat berwirausaha pada mahasiswa fakultas ekonomi di Universitas Bangka Belitung. Artinya bahwa semakin tinggi efikasi diri maka semakin tinggi niat berwirausaha mahasiswa, sebaliknya semakin rendah efikasi diri maka semakin rendah pula niat berwirausaha mahasiswa.
3. Ada pengaruh positif dan signifikan antara kecerdasan menghadapi rintangan dengan niat berwirausaha pada mahasiswa fakultas ekonomi di Universitas Bangka Belitung. Artinya bahwa semakin tinggi kecerdasan menghadapi rintangan maka semakin tinggi niat berwirausaha mahasiswa, sebaliknya semakin rendah kecerdasan menghadapi rintangan maka semakin rendah pula niat berwirausaha mahasiswa.

b. Saran

1. Bagi Pihak Perguruan Tinggi

Dari hasil penelitian yang dilakukan

oleh peneliti, ternyata efikasi diri lebih tinggi pengaruhnya terhadap niat berwirausaha mahasiswa, sehingga hendaknya bagi pihak perguruan tinggi perlu meningkatkan efikasi diri mahasiswa dengan cara memberikan arahan kepada mahasiswa melalui kegiatan seminar dan pelatihan dan memperbanyak praktek kerja lapangan tentang kewirausahaan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan daya prediksi dua variabel independen (efikasi diri dan kecerdasan menghadapi rintangan) dengan variabel dependen (niat berwirausaha) masih rendah, maka disarankan agar peneliti selanjutnya meneliti faktor lain yang mempengaruhi niat berwirausaha seperti faktor kepribadian: dapat ditunjukkan dari beberapa variabel seperti *risk taking*, kreativitas, inovasi, *locus of control*; faktor lingkungan, dan faktor demografis: jender, umur, latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja. Dalam penelitian yang peneliti lakukan memiliki kelemahan. Dalam Penelitian ini fokus meneliti tentang niat berwirausaha mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung saja, belum membandingkan dengan Fakultas Ekonomi lain di beberapa Universitas di Indonesia. Sehingga bagi peneliti selanjutnya bisa lebih luas lagi meneliti niat berwirausaha mahasiswa fakultas ekonomi di beberapa Universitas di Indonesia.

Daftar Pustaka

Andika, M. & Madjid, I. (2012). Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subyektif dan Efikasi Diri Terhadap Intensi Berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala). *Eco-Entrepreneurship Seminar & Call for Paper "Improving Performance by Improving Environment"*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri

Semarang

- Bandura, A. (1977). Self Efficacy Toward a Unifying Theory of Behavioural Change. *Journal of Phycological*, 84 (2), 191-215.
- CNN Indonesia.(2015). Ekonomi Melambat, Pengangguran Indonesia Bertambah. Diunduh dari [http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150505150630-78-51318/ekonomi-melambat-pengangguran-indonesia-bertambah/tanggal 20 Mei 2015](http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150505150630-78-51318/ekonomi-melambat-pengangguran-indonesia-bertambah/tanggal%20Mei%202015).
- Farzier Barbara and Linda S Neihm. (2008). FCS Students' attitudes and intentions toward entrepreneurial careers, *Journal of Family and Consumer Sciences*, 100 (2) ,Academic Research Library pg 17
- Fishbein, Ajzen. (1975). *Belief, Attitude, Intention and Behavior introduction to theory and Research*. Phillipphines : Addison Wesley Publishing Company, Inc.
- Flavius, T. E. (2010). Gender, entrepreneurial self-efficacy, and entrepreneurial attitude orientations: The case of the Caribbean. *International Business & Economics Research Journal*, 9 (13), 17–31.
- Fradani, Ayis Crusma. (2016). Pengaruh Dukungan Keluarga, Kecerdasan Adversitas dan Evikasi Diri Pada Intensi Berwirausaha Siswa SMK Negeri 2 Bojonegoro. *Jurnal Edutama*, 3 (1), 47-61.
- Frederica, D & Marvianta, Y, B, A. Peran Dukungan Emosi dan Rangsangan Positif Terhadap Niat Berwirausaha (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen dan Akuntansi). *Journal & Proceeding feb UNSOED*. 3 (1), 1-8.
- Handaru, A, G.; Parimita, W,; Mufdhalifah,I,W. (2015). Membangun Intensi Berwirausaha Melalui Adversity Quotient, Self Efficacy, dan Need For Achievement. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 17(2), 145-166.
- Indarti, N. (2004). Factors affecting entrepreneurial intentions among Indonesian students. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19 (1), 57-70.
- Indarti, N. & Rostiani, R. (2008). Intensi

- Kewirausahaan Mahasiswa: Studi Perbandingan Antara Indonesia, Jepang dan Norwegia. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Indonesia*, 23(4), 1-27.
- Paulina, I., & Wardoyo. (2012). Faktor Pendukung Terhadap Intensi Berwirausaha pada Mahasiswa. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 3 (1), 1-10.
- Radar Bangka. (2012). Angka Pengangguran Babel tinggal 3,4 %. Diunduh dari <http://www.radarbangka.co.id/berita/detail/global/12473/angka-pengangguran-babel-tinggal-34.html> tanggal 25 Mei 2015
- Rustiyaningsih, S. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Kewirausahaan. *Jurnal Widya Warta*, 2 (2), 255-267.
- Sarwoko, E. (2011). Kajian Empiris Entrepreneur Intention Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. 16 (2), 126-135
- Sumarsono, H. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Wirausaha Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. *Jurnal Ekuilibrium*, 11(2), 62-88
- Stoltz. (2000). *Adversity Intelligence*. Yogyakarta : Liberty.
- Tanjungsari, H., dan Hani. (2013). Pengaruh Faktor Psikologis dan Kontekstual terhadap Intensi Berwirausaha pada Mahasiswa. *Proceeding Seminar Nasional dan Call For Paper Sancall*. Universitas tarumanagara.
- Vemmy, S, C. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Berwirausaha Siswa SMK. *Jurnal Pendidikan Vokasi*. 2 (1), 117-125
- Wijaya, T. (2007). Hubungan Adversity Intelligence dengan Intensi Berwirausaha (Studi Empiris pada Siswa SMKN 7 Yogyakarta). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 9 (2), 117-127
- Wiyanto, H. (2014). Pengaruh Efikasi Diri dan Lingkungan Terhadap Niat Berwirausaha Mahasiswa (Studi pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara). *Jurnal Manajemen*. 18 (1), 114-129.
- Zahreni, S & Pane, R, S, D. (2012). Pengaruh Adversity Quotient terhadap Intensi Berwirausaha. *Jurnal Ekonom*, 15 (40), 173-178.

PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS BUDAYA LOKAL DI DUSUN PEJAM KABUPATEN BANGKA

*Tim Jarlit Kebudayaan Bappeda Prov.Kep.Bangka Belitung
Jamilah Cholillah*

Abstract

Forests have an important and substantial significance for the survival of the Lom. Without the forest, Orang Lom can not guarantee his life well and prosperous. Prosperous here has two important meanings, namely the outer welfare that is; They live and work together with the forest, part of the forest, by cultivating, gardening, farming, and taking the raw materials to support life such as wood, rattan, honey, medicine and water supply as well as fruits, Fruits. In the context of the soul, the forest is a guarantee of spiritual welfare for the realm of belief that we call the natural theology of the Lom. The forest is the home of life, and also a place of freedom and sacred worship.

Keywords; *Forest, Local Knowledge, code of conduct*

A. Latar Belakang

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hutan merupakan kawasan luas yang mencakup 40,03 % dari luas daratan sebesar 1.642.214 hektar. berdasarkan Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi jenis pepohonan dalam persekutuan dengan lingkungannya, yang satu dengan lain tidak dapat dipisahkan.

Sistem pengetahuan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan pada umumnya bersifat dinamis dan mengalami perubahan seiring perubahan zaman. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, misalnya aturan kebijakan pemerintah, tekanan pertumbuhan penduduk, tekanan ekonomi pasar dan sebagainya. Kebijakan pemerintah yang menyebabkan alih fungsi lahan seperti aturan-aturan konsensi Peraturan Pemerintah Pemberian Hak Pengusahaan Hutan (PP HPH), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), pembukaan lahan perkebunan dan pertambangan, begitu pula pengaruh penambahan penduduk, kebutuhan akan pemenuhan suplai pangan dan luas lahan produksi, dan perubahan paradigma dalam

masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan, dan permintaan pasar, semuanya menjadi faktor yang mempengaruhi dalam strategi adaptasi budaya dan pengetahuan lokal masyarakat setempat.

Meskipun secara umum, bentuk dan pengetahuan pengelolaan hutan mengalami evolusi perubahan, tidak jarang dijumpai masyarakat yang masih menerapkan pengetahuan lokal dengan prinsip seperti konservasi, manajemen, dan eksploitasi sumber daya alam secara berkelanjutan. Contoh-contoh pengelolaan alam dan hutan terlihat pada masyarakat Baduy di gunung Halimun, Banten Selatan, masyarakat Wana di Sulawesi Tengah yang menerapkan sistem tradisional terutama dalam berladang, dimana kelompok masyarakat ini menerapkan suatu pola siklus pertanian yang teratur dan tertib dengan seperangkat aturan, pantangan, larangan adat. juga terlihat pada masyarakat Dayak, Kalimantan Timur yang mempraktekkan pola perladangan secara adat yang dikenal Umaq 'hutan persediaan'. Pola pengelolaan hutan Kaliwo atau Kalego di Sumba Barat, Pelak di pergunungan Kerinci, Jambi. Contoh lainnya juga tampak pada kearifan tradisi suku Muyu, Irian dalam hubungannya antar manusia dalam mengelola lahan dengan cara menerapkan batasan dan pemilihan lahan

dan tanaman yang boleh dan tidak untuk ditebang dan dikembangkan. Kesemua ini menunjukkan pengelolaan alam, hutan, air, tanah yang berbasis kearifan tradisi dan pengetahuan lokal memiliki keberlanjutan bagi upaya kelestarian lingkungan alam dan menunjang keberadaan budaya kelompok sosial setempat.

Pada masyarakat provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat sistem pengelolaan hutan berbasis pengetahuan lokal. Pengetahuan tersebut terkait dengan pengelolaan lahan dan hutan dalam kegiatan mata pencaharian. Merunut catatan etnografi Belanda (1819 – 1935), kegiatan ini telah ada sejak zaman dahulu, terlihat pada pola masyarakat dalam suatu wilayah dari sebuah kampung yang ditinggalkan (Verlaten Kampong), mereka meninggalkan daerah tersebut dalam rangka mengusahakan perladangan baru (Horsfield, 1848). Dalam pandangan teori evolusi sosialkultural, pola ini sesungguhnya merupakan warisan kelompok sosial bermata pencaharian bercocok tanam (shifting cultivation), mereka berpindah dari lahan satu ke daerah lainnya secara berotasi dengan acuan sistem pengetahuan tradisional.

Dewasa ini, persoalan terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan hutan di Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan masyarakat mengalami perubahan. Secara ekologis, menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kondisi hutan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kerusakan dan menjadi lahan kritis. Data Dinas kehutanan tahun 2011 menunjukkan, luas lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai 114.836 ha (kritis 88.212 ha dan sangat kritis 26.624 ha). Menurut Permenhut p.36 2011 dinyatakan bahwa lahan kritis adalah lahan yang dikategorikan sangat kritis dan kritis yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS. Ini artinya pengetahuan tentang pengelolaan hutan sesungguhnya mulai hilang dan mengalami degradasi dari memori kolektif masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

Dari uraian di atas, meskipun secara umum pengetahuan lokal dalam pengelolaan hutan mengalami perubahan, masih dijumpai hutan yang dijaga dan dipelihara oleh kelompok masyarakat tertentu yang berdasarkan pengetahuan lokal warisan nenek moyang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memberi gambaran bentuk pengelolaan hutan berbasis budaya setempat.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengetahuan lokal dalam pengelolaan hutan berdasarkan budaya lokal?
2. Bagaimana upaya pelestarian dan penerapan pengetahuan lokal terhadap pengelolaan hutan tersebut?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mencoba memberi gambaran tentang ragam macam pengetahuan lokal dan sistem penerapannya secara tradisional dari masyarakat lokal, kasus di tiga tempat di kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap stakeholder yang berkepentingan dalam kaitannya pelestarian pengetahuan lokal dan kelestarian hutan di Kepulauan Bangka Belitung.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebudayaan

Menurut Koentjaraningrat, ada tiga wujud kebudayaan, pertama wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai, atau norma. Keberadaannya yang abstrak tidak dapat dilihat. Wujud ini ada dalam alam pikiran masyarakat. Kedua, wujud kebudayaan sebagai aktifitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat. Wujud ini dapat berupa sistem sosial masyarakat. Sedangkan wujud kebudayaan yang ketiga adalah kebendaan (wujud fisik/material). Pada wujud ketiga ini, kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia, wujud ini bersifat kongkret karena

merupakan benda-benda dari segala hasil ciptaan, karya, tindakan, aktivitas, dari perbuatan manusia dalam masyarakat.

Terkait dengan pengelolaan hutan, kebudayaan sebagai produk hasil karya, rasa, cipta masyarakat maka sesungguhnya terdapat 3 wujud budaya yaitu pola kompleksitas nilai, gagasan, norma (wujud ideal), seperangkat aktivitas kelakuan berpola dari masyarakat (sistem sosial), dan terakhir adalah perwujudan kebendaan hasil dari karya manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, pengelolaan hutan merupakan gambaran budaya lokal dalam memperlakukan hutan yang terlihat pada cara dan tindakan yang digunakan sebagai pedoman masyarakat tersebut, pedoman tersebut menjadi acuan untuk melakukan interpretasi lingkungan yang dihadapinya. Ini menunjukkan kemampuan budaya ideal dan adat istiadat setempat dalam mengatur dan memberi arah perbuatan pada masing-masing kelompok sosial masyarakat tersebut, sehingga tercipta lah pola perbuatan dari cara berfikir dalam memandang arti hutan dan membentuk lingkungannya.

2. Masyarakat lokal dan pengetahuan Lokal

Masyarakat lokal adalah Komunitas yang leluhurnya dianggap pemula, tinggal di suatu wilayah tertentu, memperoleh penghidupan dari sumberdaya lokal. Mereka merupakan satu kesatuan berdasarkan kesamaan keturunan, adat, bahasa, hukum, pola hidup yang diwarisi dari kearifan leluhurnya. Tidak selalu mengenal kepemimpinan struktural, tidak harus dipimpin oleh kepala adat, tidak selalu mengenal konsep pemerintahan adat. (Konvensi ILO No. 169, 27 Juni 1989, tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat). Masyarakat lokal dapat pula di artikan sebagai penduduk yang masih memegang atau memiliki tradisi secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam kurun waktu yang lama, ratusan hingga ribuan tahun, tinggal dan berinteraksi dengan lingkungan lokal secara terus menerus (Iskandar, 2013)

Lebih jauh, Berkes, menyebutkan pengetahuan lokal dalam aspek ekologis dan

juga pengetahuan lokal tentang sistem nafkah (mata pencaharian), sangat penting perannya pada konservasi biodiversity, dalam arti bahwa dengan sistem pengetahuan tersebut akah diperoleh ‘.. sustainable use for human benefit without compromising the interests of future generation..’, menurut Berkes kekuatan utama sistem pengetahuan lokal dalam aspek ini adalah:

- iii Ehrlich, Paul R.1981. Ledakan Penduduk. Jakarta : Obor Indonesia
- iii Scott, James C. 1983. Moral Ekonomi Petani. Jakarta : LP3ES.
- iii Adimiharja, Kusnaka. 2008 Dinamika Budaya Lokal. Bandung. Pusat KAJIAN LBPB
- iii Dishut.Provbabel. 2011

1. self interest, dalam arti pengetahuan lokal menjadi kunci penting upaya konservasi, karena kekutannya datang dari ‘dalam’ bukan dari ‘luar’.
2. sistem pengetahuan yang akumulatif, dalam arti bahwa pengetahuan lokal merupakan akumulasi atas pola adaptasi ekologis komunitas lokal yang telah berlangsung berabad- abad.
3. pengetahuan sangat potensial untuk membantu mendesain upaya konservasi sumber daya yang efektif, karena dukungan lokal dan tingkat adaptasi serta pertimbangan practicability nya yang tinggi

Di sisi lain, Berkes membagi kerangka tingkatan analisis pengetahuan lokal ke dalam beberapa kategori yang saling berkaitan satu sama lainnya. Pertama, pengetahuan mengenai lahan, beraneka macam flora dan fauna yang meliputi identifikasi, klasifikasi, siklus hidup, distribusi spesies, dan hubungan antara spesies dan lingkungan fisiknya. Kedua, lahan dan sistem pengelolaan sumber daya mencakup praktek, peralatan, dan teknik. Ketiga, institusi sosial, yang mencakup seperangkat aturan, norma, dan kebiasaan sosial dan budaya. Keempat, pandangan hidup dan falsafah religius, meliputi cara pandang dan pemberian makna terhadap lingkungannya. Kecenderungan utama yang terdapat dalam penduduk lokal bahwa mereka

menganut cara pandang holistik terhadap alam, yaitu suatu pandangan yang menganut dirinya saling terkait satu sama lainnya antara makhluk binatang, tumbuhan, bentang alam dan manusia lainnya.

Dengan demikian sistem pengetahuan lokal merupakan gambaran nilai-nilai lokalitas atau teritorial tertentu baik yang didukung sistem pengetahuan yang bersifat asli maupun yang telah beradaptasi dengan nilai-nilai luar, dengan tingkatan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya.

3. Pengelolaan Hutan

Hutan bagi sebagian masyarakat menjadi sumber kehidupan dan masa depan keturunannya. Spurr, mendefinisikan bahwa hutan merupakan sekumpulan pohon-pohon atau tumbuhan berkayu lainnya yang pada kerapatan dan luas tertentu mampu menciptakan iklim setempat serta keadaan ekologis berbeda dengan di luarnya. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan kepemilikannya, hutan dibagi dalam dua kelompok, yaitu hutan negara dan hutan hak (milik, guna usaha, pakai, ulayat, adat). Hutan negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik, adapun hutan hak ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik. Hutan negara kemudian dibedakan berdasarkan fungsi hutan tersebut, yaitu:

- a. Hutan produksi, yaitu hutan yang mampu menghasilkan kayu, rotan, dan getah. Hasil ini dapat dimanfaatkan untuk bermacam-macam kebutuhan seperti industri, perdagangan (sebagai sumber devisa), juga digunakan sebagai bahan bakar.
- b. Hutan lindung, yaitu hutan yang dilindungi oleh pemerintah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Hutan ini juga membentuk humus yang berarti dapat menambah kesuburan tanah, dan melindungi tanah dari erosi dan banjir, serta mengatur tata air. Pohon-pohon di hutan lindung tidak boleh ditebang.
- c. Hutan konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai

fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan konservasi melekat padanya kawasan hutan suaka alam (cagar alam, suaka margasatwa), kawasan hutan wisata (taman wisata, dan taman buru).

Dalam Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan pula, bahwa hutan negara dapat pula berupa hutan adat. Hutan adat tersebut ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya dengan berbagai syarat. Pernyataan tersebut kemudian diperjelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menyatakan “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Berdasarkan keputusan MK, maka, hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat (hak ulayat) dan hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara.

Di masyarakat kepulauan Bangka Belitung, hutan yang banyak dikelola masyarakat yang berkaitan dan berhubungan dengan sistem mata pencaharian dan tradisi selalu berada dalam ruang hutan produksi. Akan banyak dijumpai berbagai ragam hutan yang dikelola masyarakat secara tradisional dan adat tradisi leluhur nenek moyang. Di kepulauan Bangka Belitung secara umum dikenal beberapa istilah seperti:

- Rimbek
hutan belantara yang masih alami dan lebat. Contoh Rimbek Mambang di Desa Dalil Kab. Bangka.
- Hutan Lareng
hutan yang didalamnya berlaku peraturan adat pantang larang dalam pengolahan hutan dan sistem penebangan pohon dan kayu. Contoh Hutan Adat Bukit Tabun di kawasan Benak Pejem Desa Gunung Pelawan Kab. Bangka. contoh hutan larangan pun akan banyak dijumpai di daerah Bangka Selatan.

- Hutan Haminte / Hutan Cadangan hampanan hutan yang dimiliki oleh suatu kampung atau gabungan dari beberapa kampung. Contoh Hutan Bukit Tukak, Wek Kertik Bebar Akip, Canon Rinti Abit / Bingak di Desa Pangkalniur Kab. Bangka.
- Kelekak Hutan yang hampir merata dapat dijumpai di kepulauan Bangka Belitung. Adalah hutan bekas pemukiman lama yang telah lama ditinggalkan dan berubah menjadi hutan tanaman berbuah. Contoh Kelekak Lukok di Desa Kemuja, Kelekak Lubuk Bunter di Desa Kimak, dan Kelekak Ketipeng di Desa Pangkalniur.

C. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendiskripsikan secara terperinci tentang fenomena pengelolaan hutan adat di daerah Kepulauan Bangka Belitung. Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Melalui pendekatan ini, akan digali sebanyak-banyaknya informasi, yaitu data tentang pengetahuan lokal dari segi bahasa, peralatan, mata pencaharian, organisasi sosial, kesenian, kepercayaan, pengetahuan tentang alam dan tanaman, dari masyarakat atau komunitas setempat, yang tetap menerapkan pengetahuan tersebut dalam pengelolaan hutan di daerah mereka sebagai mana adanya secara utuh. Dengan demikian akan dapat teridentifikasi berbagai pengetahuan lokal, yang akan memberi gambaran bentuk-bentuk pengelolaan hutan masyarakat tersebut. Selain itu, pendekatan ini juga menguraikan tentang ragam bentuk pelestarian dan kondisi perlindungan terhadap keberagaman pengetahuan lokal tersebut, baik dari komunitas atau masyarakat pelaku dan pemerintah daerah, sehingga secara keseluruhan akan teridentifikasi kondisi terkini dari eksistensi hutan dengan seperangkat pengetahuan masyarakat pendukungnya.

Untuk mewujudkan perolehan data tersebut penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan

data melalui wawancara, yaitu mengumpulkan keterangan dan informasi tentang ragam pengetahuan lokal dalam pengelolaan hutan. Wawancara dilakukan kepada :

- a) Tokoh masyarakat yaitu kepala desa dan aparat desa yang mengetahui perkembangan kehidupan masyarakat.
- b) Tokoh adat yaitu orang yang memiliki otoritas adat atau memiliki peran penting di wilayah desa yang mampu memengaruhi masyarakat dalam mengambil suatu keputusan.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini berlandaskan pada analisa induktif. Analisis ini dilakukan berdasarkan pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara kemudian disusun fakta-fakta lapangan untuk kemudian ditarik kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

1. Pengetahuan Dan Aspek Pengelolaan Hutan; Kasus Dusun Pejam Kabupaten Bangka

Pejam, merupakan sebuah dusun di ujung utara Belinyu yang masuk ke dalam Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu. Pejam merupakan sebuah dusun yang dihuni oleh mayoritas penduduk yang disebut sebagai Orang Lom atau Orang Mapur. Orang Mapur atau Orang Lom merupakan komunitas tradisional yang tinggal di wilayah dua kecamatan, yakni Belinyu dan Riau Silip. Di kecamatan Belinyu mereka tinggal di Desa Gunung Pelawan, tepatnya di Dusun Pejem. Sementara di Kecamatan Riau Silip tinggal di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda dan Dusun Tuing Desa Mapur. Di tiga wilayah ini mereka tinggal dan membangun kehidupan bersama masyarakat di sekitarnya. Ada Orang Lom yang tinggal di perkampungan seperti bentuk kampung biasa yang kita lihat di desa-desa pada umumnya. Tempat tinggal orang lom dalam

area perladangan umumnya dengan bangunan bersifat nonpermanen, dengan ragam nilai dan pemaknaan. Sebagian lainnya tinggal di ladang dan kebun yang mereka bangun sebagai tempat untuk bercocok tanam dan membangun sistem perekonomian dan sistem mata pencaharian. Sebagian lainnya tinggal di pesisir pantai Tengkalat dan juga di tengah pedalaman hutan Benak yang berdekatan dengan lereng Gunung Pelawan dan Gunung Cundong. Karakter Orang Lom di tiga wilayah ini (Pejam, Air Abik, dan Tuing-Mapur) tidak sama, begitu juga dengan koloni Orang Lom yang tinggal di kampung-kampung dan pedalaman hutan.

Orang Lom yang tinggal di wilayah pedalaman memiliki karakter sangat tertutup dan kehidupannya bergantung dengan alam. Waktunya dihabiskan dengan urusannya bercocok tanam, membuka lahan, mencari ikan, dan jarang keluar hutan untuk kembali ke kampung atau desa. Di sini, Orang Lom cukup kuat mempertahankan tradisi dan kepercayaannya sebagai Orang Lom murni. Sangat sulit bagi mereka untuk mengizinkan anak-anaknya menikah dengan orang luar dan berbeda keyakinan. Ladang dan kebun dikuasai oleh keluarga besar secara turun-temurun. Tingkat pendidikan sangat rendah, begitu juga dengan taraf kehidupan yang begitu sederhana.

Orang Lom yang tinggal di perkampungan seperti di Dusun Pejam, lebih terbuka dan adaptif terhadap perubahan. Begitu juga dengan keyakinan, mereka cukup banyak untuk mengkonversikan keyakinannya ke agama Islam. Orang Lom yang tinggal di Dusun Air Abik, justru sebaliknya, meskipun taraf kehidupan dan ekonomi lebih maju dari Dusun Pejam, Orang Lom Air Abik memiliki karakter tertutup dengan orang luar, pemerintah, organisasi, dan individu asing. Di sini, mereka cukup kuat mempertahankan tradisi dan kepercayaannya sebagai insan Lom yang murni. Aturan pernikahan diatur oleh adat, begitu juga dengan kelahiran dan kematian. Tidak mudah di sini menemukan Orang Lom yang berkonversi ke agama Islam atas inisiatif sendiri dan juga tidak terlalu terbuka

dengan nilai-nilai dan tradisi Islam. Kebanyakan pernikahan dilaksanakan dalam hukum adat dan juga memilih pasangan yang berasal dari satu etnis. Orang Lom yang tinggal di wilayah Tuing-Mapur, memiliki karakteristik yang hampir sama dengan wilayah Dusun Pejam. Lebih terbuka dan berasimilasi dengan penduduk setempat dan juga kaum pendatang.

2. Pengetahuan (Code of Conduct Mapur) dalam pengelolaan hutan di Dusun Pejam

Hutan memiliki arti penting dan substansial bagi keberlangsungan hidup Orang Lom. Tanpa hutan, Orang Lom tidak dapat menjamin hidupnya dengan baik dan sejahtera. Sejahtera di sini memiliki dua arti penting, yaitu sejahtera secara lahiriah yaitu; mereka menjalani aktivitas dan kehidupan bersama dengan hutan, bagian dari hutan, dengan bercocok tanam, berkebun, berladang (berumeh), dan mengambil bahan baku untuk menunjang kehidupan seperti kayu, rotan, madu, obat-obatan, dan cadangan air bersih dan juga buah-buahan hutan. Di hutan, mereka melakukan aktivitas berburu untuk mendapatkan daging hewan, mengambil rotan untuk membuat peralatan beraktivitas dan wadah makanan dan alat-alat rumah tangga, juga madu serta tanaman obat-obatan untuk digunakan sendiri, sedikitnya dijual untuk mendapatkan uang.

Dalam konteks bathiniah, hutan merupakan jaminan kesejahteraan spiritual bagi ranah keyakinannya yang kita sebut sebagai teologi natural Orang Lom. Hutan adalah rumah kehidupan, dan juga tempat peribadatan yang bebas dan sakral. Orang Lom memercayai bahwa alam murni dan hutan merupakan tempat kekuatan ghaib bermukim dan hidup. Mereka menjaga hutan, sumber air, gunung, pohon, kebun, sungai, laut, batu, angin, rumah serta kuburan. Hutan merupakan sumber kesejahteraan spiritual yang menghubungkan mereka dengan Tuhan. Untuk itu, Orang Lom tidak sembarangan dalam membatasi hutan dan juga melakukan semua aktivitas di dalam hutan. Semua yang mereka lakukan sudah diatur oleh kode etik yang disebut dengan pantang larang Orang Lom/

Orang Mapur.

Sistem pengelolaan hutan di Pejam, tepatnya di wilayah Benak difungsikan sebagai kebun dan ladang berpindah yang mempunyai kurun waktu tertentu. Pada masa awal mereka membangun ladang (berumeh) dengan menanam padi darat, kemudian di sebalahnya mereka berkebun, menanam umbi-umbian, kacang-kacangan, sayuran seperti keladi, timun darat, dan beberapa jenis cabe. Ada juga yang menanam jenis tanaman keras seperti karet dan lada. Setelah beberapa tahun difungsikan, lahan ini ditinggalkan dan menjadi hutan kembali dengan komposisi baru yang lebih komunal.

Dalam mengelola lahan dan hutan, masyarakat lom mengenal dan mempraktekkan beberapa pemanfaatan hutan dengan jenis-jenis tanamannya. Pengetahuan ini tentunya telah diperoleh dan diwariskan secara turun menurun dari leluhur mereka. Ragam pemanfaatan dan pengetahuan tentang jenis tanaman seperti pada tabel. 1 dibawah ini **Tabel 1**

Ragam pemanfaatan hutan dan pengetahuan tentang jenis tanaman

Pemanfaatan	Jenis tanaman /tumbuhan
Sistem Berladang (berumeh)	<ul style="list-style-type: none"> • Padi darat • Umbi-umbian (mengalo, ubi jalar, keladi butir, kemilik, temu lawak) • Jagung • Timun darat sejenis Blewa • Kacang-kacangan • Cabe • Pucot (bahan baku alat-alat rumah tangga dan alas) • Purun (bahan baku alat-alat rumah tangga da alas)
Sistem Kelekek	<ul style="list-style-type: none"> • Durian • Binjai • Cempedak
Hutan Keramat (Hutan Ijer dan Bukit Tabun)	<ul style="list-style-type: none"> • pohon primer • Tumbuhan rotan • Tanaman obat • Kulit kayu
Sistem berkebun	Sahang atau lada Karet

Hutan Padang Sapu-sapu (hutan cadangan alami)	Batang kayu untuk penopang tanaman sahang atau lada (kayu junjung), Tiang rumah kebun, Kayu bakar
---	---

(Sumber: Toha; Sam; Deqy, wawancara, 28 september 2015)

Aktivitas masyarakat di hutan dilandasi dengan berbagai macam tujuan dan dapat dilakukan secara berkelompok. Bagi kelompok masyarakat yang membuka ladang baru diawali dengan menentukan luas lahan yang akan digarap. Aktivitas kedua kemudian menebangnya dan membakarnya. Setelah ditinggal beberapa waktu, pohon-pohon yang ditebang dikumpulkan ke titik tertentu. Setelah itu baru dilakukan proses nugal (menanam padi). Sistem perladangan Orang Lom adalah sistem ladang berpindah sesuai dengan lahan yang sudah ditentukan. Ladang yang lama ditinggalkan dan menjadi hutan kembali setelah beberapa waktu.

Pola berkebun dengan jenis tanaman umbi-umbian dan sayuran merupakan sistem mata pencaharian yang membangun ekonomi jangka pendek. Pola berladang dengan jenis tanaman padi darat merupakan sistem mata pencaharian yang membangun sistem perekonomian jangka menengah, sedangkan pola berkebun dengan jenis tanaman keras merupakan sistem mata pencaharian yang membangun sistem perekonomian jangka panjang. Hutan, merupakan sebuah ranah yang membangun sistem spiritual untuk menjamin kesejahteraan lahiriah dan bathiniah, dan Gunung Pelawan merupakan sumber kesejahteraan spiritual dan juga sumber kesejahteraan perekonomian dan kehidupan. Ketika musim panen padi tiba, Orang Lom melaksanakan upacara Njuhu Jerami setiap bulan April atau Mei. Upacara tradisional ini merupakan perlambang rasa syukur kepada Sang Pencipta atas hasil padi yang mereka dapatkan. Upacara Njuhu Jerami dilaksanakan di tengah lapangan terbuka dan dilangsungkan dari dalam rumah adat yang mereka buat. Prosesi ritual acara ini dipimpin oleh seorang tokoh adat atau pemangku adat. Tradisi Njuhu Jerami merupakan salah satu kekayaan budaya Bangka

yang berasal dari masyarakat tradisional Orang Lom. Ketersediaan lahan dan hutan merupakan jaminan bahwa tradisi ini akan terus ada dan hidup dan menjadi identitas budaya Bangka.

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, khususnya dalam melakukan pengelolaan lahan dan hutan, masyarakat Lom memiliki pengetahuan, kepercayaan dan nenek moyang terhadap alam yang harus dipelihara dan dijaga. Nilai tersebut terwujud pada aturan pantangan dan larangan yang telah menjadi kesepakatan (*Code of Conduct*), dan harus dipatuhi semua warga komunitas Lom. *Code of Conduct* mengatur tiga divisi yang berhubungan dengan pengelolaan hutan untuk berladang, yaitu: aturan membuka ladang, aturan memelihara ladang beserta tanamannya, dan aturan memelihara hewan dan memburunya. Kita dapat memahami secara cermat mengenai isi kode etik yang sudah diatur oleh hukum adat dalam ranah Orang Lom, bahwa aturan tradisional ini begitu kuat dalam hal bagaimana caranya mengelola hutan dengan baik, serta menghitung dampak ekologisnya baik terhadap manusia, tumbuhan, dan juga hewan di sekitarnya. Di bawah ini dijelaskan aturan membuka ladang yang diatur dalam *code of conduct* orang Lom/orang mapur (tabel. 2)

Tabel 2

Aturan dalam membuka ladang dan hutan

No.	C o d e of Conduct Divisi Ladang (Field Division) (Local Significance)	Fungsi (Utility)	Makna Lokal	S a n g s i (Sanction)
1.	Tidak boleh ada aliran air disudut ladang yang mengumpul disatu titik	Pemeliharaan Ladang (Field Maintenance)	S u m - ber tumbek (mata air) bagi makhluk halus	Mendapatkan penyakit
2.	Tidak boleh ada pusek (gundukan tanah berbukit) di sudut ladang	M e m - berikan ruang bagi tanaman	Pemeliharaan hubungan rumah manusia dan rumah makhluk halus	Mendapatkan kemarahan makhluk halus

3.	Tidak boleh ada dua aliran air di tengah ladang	Cadangan air tidak habis dan tidak rusak	Jembatan makhluk halus untuk berjalan menuju alam manusia	Tanaman akan berpenyakit
4.	Tidak boleh ada pusek yang diambil setengah untuk ladang	G u n - d u k a n t a n a h sering kali ditempati hewan melata seperti ular dan tikus, jika dirusak sarang mereka akan menyebar kemana-mana	R u m a h makhluk halus tidak boleh diganggu dan dibelah, akan bergentayangan dan mengganggu	Manusia akan dilanda rasa takut dan gelisah (penyakit bathin)
5.	Tidak boleh ada kayu tumbang yang mengarah ke sudut ladang	M e n u - t u p mata air dan titian hewan seperti monyet dan lutung (hama besar) bagi tanaman	S e b a g a i jembatan bagi makhluk halus yang beraliran jahat dan perusak	Tanaman akan dirusak dan padi tidak bernas (berkualitas)
6.	Aliran air harus ada di tengah ladang dan membentuk huruf T terbalik	Distribusi cadangan air dan aliran air me m - b a n t u m e - nyeimbangkan pertumbuhan tanaman	Dua aliran makhluk halus yang jahat dan baik tidak boleh berdampingan	M e n g - g a n g g u jiwa peladang menjadi tidak stabil dan nasib tanaman tidak jelas

(sumber : Toha; Sam; Aen; Deq, wawancara, 28 september 2015)

Tidak hanya itu, dalam proses pemeliharaan tanaman perladangan masyarakat Lom pun tetap menjaga dan masih mengikuti aturan nenek moyang. Pantangan dan larangan, dengan separangkat sangksi, dimana sangksi yang diberikan lebih dari sekedar sifat sosial,

melainkan sangksi dari kekuatan alam dan sekitarnya yang dapat menyebabkan kerugian akan hasil dari tanaman mereka tersebut. Di bawah ini dijelaskan aturan memelihara ladang dan tanaman yang diatur dalam *code of conduct* orang Lom/orang mapur.

Tabel 3
Aturan memelihara ladang dan tanaman

No.	Code of Conduct Divisi Ladang (<i>Field Division</i>) dan Pemeliharaan Tanaman Ladang (<i>Field Maintenance</i>)	Fungsi (Utility)	Makna Lokal (<i>Local Significance</i>)	Sangksi (<i>Sanc-tion</i>)
1.	Tidak boleh bersiul malam hari di tengah ladang	Memelihara ladang dari gangguan ladang seperti angin	Bersiul akan memanggil angin ribut dan makh-luk halus yang jahat. Dengan berdi-am akan memberikan ruang bagi tanaman untuk tenang dan tumbuh kembang	Tanaman akan di-rusak an-gin ribut
2.	Jika menanam tebu, tidak boleh dimakan sambil berjalan dan jangan membuang sisa tebu yang dimakan disepanjang jalan	Memelihara tanaman dari hewan pengusik	Akan memunculkan jenis Kera' S u r e (Kera besar di sore hari) yang g a n a s setelah dua jam	Akan merusak tanaman yang di-tanam
3.	Tanaman Betik atau Mentimun, tidak boleh dimakan sambil berjalan dan kulitnya dibuang di jalan	Memelihara tanaman dari hewan pengusik	Akan memunculkan jenis tikus hama yang ganas selang dua jam	Akan merusak tanaman yang di-tanam

4.	Tidak boleh melakukan Ani-ani (berdongeng) di tengah ladang, dengan menceritakan tentang perahu dan layang-layang atau cerita pelayaran	Memelihara kearifan lokal	Menjaga n a s i b tanaman yang ditanam agar berhasil, tidak seperti layang-layang yang akan kandas dan tidak seperti perahu yang pergi dan hilang	P a d i yang di-tanam ataupun tanaman lainnya a k a n bernasib seperti perahu d a n layang-layang, hilang dan kandas (padi pergi jauh)
5.	Menyanyikan lagu ruh padi di tengah ladang (S e m p a y o , S e n g k a t e , Serimbang, Timang Malang, Timang Bulan, Timang Mengkadung)	Memelihara unsur bathiniah tanaman	Lagu ini mempunyai nuansa magis tertentu, mewakili rasa kesedihan, kesunyian, kesepian, k e r i n - d u a n , dan p e n g - h a r a p a n . Seperti sebuah <i>lament</i> (ratapan) dari ladang, y a n g m e n g - h a r a p k a n t a n a m t u m b u h mereka b e r h a - s i l dan berkah	P a d i a k a n k e r d i l dan tidak bernas jika nyanyian seperti ini tidak di l a k - s a n a k a n

(Sumber : Toha; Sam;Aen; Deqy, wawancara, 28 september 2015)

Pengetahuan, kepercayaan dan teknik pengelolaan lahan dan hutan tersebut diatas, sesungguhnya telah menjadi petunjuk dan pegangan bagi kelompok masyarakat lom bahwa dalam memperlakukan alam dan lingkungan harus tetap memperhatikan keseimbangan alam sekitarnya. Pengetahuan, kepercayaan tersebut,

menjadi sangat bermanfaat, tentunya juga dalam pemenuhan kebutuhan subsisten dan ekonomis mereka sehari-hari.

Lebih dari itu, banyak ragam tanaman yang dapat mereka olah dan manfaatkan dari hutan. Hutan merupakan rumah alami yang menyediakan sumber bahan baku untuk kebutuhan mereka Di hutan Benak misalnya, banyak terdapat sumber bahan baku yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan menunjang perekonomian mereka, di antaranya tumbuhan rotan, kulit kayu, pucot dan purun, serta daun-daunan untuk membuat atap seperti daun mengkuang. Ragam tanaman dan pemanfaatnya seperti tabel 4. Berikut :

Tabel 4

Nama tanaman dan pemanfaatnya di hutan Benak

No.	Nama Jenis	Manfaat
1.	Rotan	digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga seperti suyak, kiding, penampi, keruntung, supit. Hasil anyaman ini juga dapat dijual ke pasar lokal sebagai bentuk kerajinan tangan Orang Lom.
2.	Daun Rumbia dan Daun Mengkuang	digunakan untuk membuat berbagai macam jenis tikar, seperti peliser (tikar halus), tikar belungkar atau kelipang (tikar kasar dengan anyaman besar), dan tikar geladak (tikar berukuran besar dan lebar).
3.	Kulit Kayu	digunakan sebagai bahan untuk dinding rumah, dapat juga dijual dengan harga yang cukup tinggi
4.	Madu Pelawan	merupakan hasil sumber daya hutan yang dapat diperoleh dari hutan Benak, juga seringkali dijual ke pasar lokal dengan harga yang kompetitif
5.	Kulat dan jamur	merupakan hasil alam musiman yang juga menjadi sumber kekayaan alami yang secara ekonomi mampu membantu masyarakat
6.	Kayu junjung untuk sahang atau lada untuk perkebunan masyarakat.	Ketersediaan hutan alami merupakan harapan besar dan jaminan keberlangsungan kehidupan dan siklus ekonomi jangka panjang masyarakat. Seluruh masyarakat yang menanam sahang atau lada, mengambil kayu untuk junjung dari hutan yang ada. Pohon-pohon berukuran sedang ditebang dan dijadikan kayu penyanggah untuk tanaman lada.

7.	k a n - cil atau pelanduk, menjangan atau kijang, rusa, ayam hutan atau tugang	merupakan salah satu kegiatan tradisional masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya akan daging hewan. Selain berburu hewan mamalia, masyarakat juga melakukan aktivitas berburu di sungai untuk mendapatkan ikan
8.	pohon sapu-sapu tumbuhan yang komunal	sebuah kawasan yang menghasilkan kayu junjung untuk tanaman sahang atau lada merupakan sumber pengobatan tradisional yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit
9.	tumbuhan Kantung Semar (Nepenthes-Nepenthaeae)	merupakan tumbuhan tropika yang unik dan langka. Tumbuhan ini masuk ke dalam tumbuhan yang dilindungi di dalam undang-undang tentang flora langka, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Budaya Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah no.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dan hal ini sejalan dengan regulasi Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), dari 103 spesies kantong Semar di dunia. Tumbuhan ini digolongkan ke dalam jenis tanaman karnivora karena ia memangsa serangga. Organ ini disebut Pitcher atau kantong. Dalam bahasa lokal disebut ketakong atau ketuyut yang seringkali batangnya disamakan dengan fungsi rotan untuk mengikat sesuatu dan dikeringkan menjadi tali temali. Kantong dari tanaman ini terdapat air murni yang seringkali diminum oleh masyarakat yang beraktivitas di hutan, dan terkadang airnya digunakan untuk obat mata yang sakit dan pandangan kabur. Ada tujuh jenis tumbuhan Nepenthes atau Kantung Semar di Hutan Benak, yaitu Nepenthes Tentaculata atau ketuyut terompet besar, Nepenthes Rafflesiana atau ketuyut babi, Nepenthes Maxima atau ketuyut besak, Nepenthes Mirabilis atau ketuyut terompet merah, Nepenthes Spectabilis Danser atau ketuyut bebulu, Nepenthes Tobaica Danser atau ketuyut kuros, Nepenthes Ampullaria atau ketuyut cangkir raja. Dari tujuh jenis tumbuhan Kantung Semar yang terdapat di Hutan Benak, perlu dilakukan pelestarian hutan dan pemantauan perkembangan spesies Nepenthes agar tidak punah. Jika spesies tumbuhan ini telah dilindungi oleh undang-undang, maka kawasan hutan yang menaunginya pun harus dilindungi oleh pemerintah.

dari hasil wawancara dengan informan, dinyatakan secara adat dan tradisi, dalam menjalankan tradisi dan ajaran leluhur di area hutan, terdapat beberapa wilayah yang harus dijaga salah satunya adalah wilayah Benak. Wilayah Benak, merupakan wilayah hutan yang memiliki potensi yang menjamin keberlangsungan kehidupan Orang Lom. Hutan yang tersisa ini menjadi tempat mereka untuk bernaung dan menggantungkan harapan bagi mereka dan generasi berikutnya untuk tetap hidup dengan layak dan alami. Berdasarkan jenis-jenis tanah hutan dari pengolahan hutan dari masyarakat lom, maka wilayah benak sesungguhnya menjadi Hutan primer, bagi kepercayaan masyarakat lom hutan di area tersebut adalah sakral, yang diistimewakan dan harus dilindungi secara adat (Bukit Tabun dan Ijer.). Selain Ijer dan Bukit Tabun, ada wilayah sakral lainnya yang disebut dengan Rebang Telang dan Kasak Tade. Di wilayah ini terdapat air terjun yang berbentuk pintu gerbang berwarna putih yang dipercaya sebagai tempat seorang wali yang bertugas untuk menjaga wilayah ini. Oleh sebab itu, masyarakat lom sangat berhati-hati dan tidak sembarangan untuk mengganggu dan merusak wilayah hutan-hutan tersebut.

Potensi alam di sini sebetulnya dapat dikembangkan sebagai hutan wisata dan hutan sakral yang memberikan nilai tradisi serta budaya yang patut dilestarikan. Jenis flora dan fauna di dalam hutan ini harus dilestarikan dari kepunahan dan perburuan liar yang melanggar aturan adat. Di sekitarnya terdapat beberapa pemukiman Orang Lom yang sangat khas dengan arsitektur rumah panggung yang masih alami. Wilayah ini dapat diusulkan sebagai kampung budaya Orang Lom beserta tradisinya. Orang Lom di dalam hutan ini membuat berbagai macam kerajinan tangan yang terbuat dari rotan, tanaman pucot dan purun.

Dalam sebuah legenda dan kepercayaan masyarakat lom, terdapat sebuah hutan yang meninggalkan jejak sejarah leluhur dari masyarakat lom sendiri (gambar 4). Di wilayah hutan sapu-sapu terdapat sebuah peninggalan sejarah masa lalu tepatnya pada

masa Lanun atau Bajak Laut, yaitu terdapat sebuah sumur yang disebut dengan Perigi Musoh yang berarti sumur musuh yang dibuat oleh para Lanun. Di pedalaman hutan sapu-sapu ini terdapat sebuah wilayah yang disebut dengan Padeng Lanun yang bermakna rumahnya para Lanun yang bermukim di sini. Di ujung sungai ini, para Lanun menambatkan kapal-kapalnya dan melakukan aktivitasnya. Di sungai inilah, terdapat sebuah cerita tentang Nipah Bolong yang menandakan letak makam Akek Ketiris yang dipercayai sebagai Pemimpin Lanun masa itu. Di ujung Tuing, tepatnya di Tanjung Samak, terdapat empat situs megalitik Akek Antak yang menjadi situs sakral bagi masyarakat. Empat situs megalitik tersebut adalah : batu telapak kaki Akek Antak, Batu Pare Akek, Batu Sabek, dan Batu Gendang. Posisi keempat situs ini terletak di pesisir pantai Tuing tepatnya di Tanjung Samak.

3. Aspek pengelolaan hutan di Dusun Pejam

Hutan di wilayah Benak, Air Abik, Tuing, merupakan sebuah kawasan hutan yang menaungi kehidupan Orang Lom. Hutan merupakan elemen yang paling mendasar dalam perikehidupan masyarakat adat, dan ini sudah diatur dalam hukum adat orang Lom mengenai aturan-aturan dalam menggunakan dan memanfaatkan hutan. Hukum adat mengatur cara berladang dan berkebun serta memelihara tanaman. Dalam hukum adat juga mengatur bagaimana cara membuka lahan, menentukan titik air, dan perlakuan terhadap makhluk sekitarnya. Untuk itu, hutan memerlukan perlindungan yang kuat dari pihak pemerintah.

Sekarang ini masyarakat komunitas lom mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mata pencaharian perladangan, serta dalam menjaga tradisi kepercayaan hutan mereka. Salah satu penyebabnya adalah hilang dan berkurangnya lahan leluhur yang dikelola secara turun temurun, yang masuk dalam kawasan hutan produksi pemerintah Kabupaten Bangka. Di daerah Dusun Pejam, Dusun Air Abik, dan Dusun Tuing-Mapur, hutan sudah

semakin sedikit karena perkebunan kelapa sawit dan karet yang dilakukan oleh perusahaan GPL (Gunung Pelawan Lestari), IKK (Istana Kawi Kencana), PT.Indo Perhutani, dan lain-lain. Dengan keberadaan perusahaan kelapa sawit yang semakin hari semakin meluaskan perkebunannya.

Dalam sistem kepercayaan wilayah dan hutan pada Masyarakat lom, terdapat 3 konsep wilayah adat yang bernama Karang Lintang, Terbentang dari simpang 3 dusun Bubus- Pejam-Tuing- Mapur- Air Abik. Pada masing-masingnya terdapat area lahan dan hutan yang dijaga secara adat dan tradisi. Dengan masuknya perusahaan tersebut, menyebabkan berkurang dan mulai tergerusnya sistem pengetahuan lahan dan hutan dimasyarakat lom sendiri. Selain itu, wilayah pemukiman mereka yang terpencar-pencar di belantara hutan terpaksa ditinggalkan akibat ekspansi perkebunan sejak tahun 1990-an. Hutan telah menjadi milik perusahaan perkebunan sawit dan karet. Sampai sekarang konflik lahan masih saja terjadi, baik di lahan apl maupun kawasan hutan negara. Hutan telah menjadi milik perusahaan perkebunan sawit dan karet.

Dalam komunitas masyarakat lom terdapat struktur (perangkat) adat yang berperan penting dalam melaksanakan tradisi adat dan menjaga kepercayaan turun temurun mereka. Para tokoh adat tradisional ini merupakan tokoh yang dipilih dan dipercayai masyarakat dan dianggap figur yang dapat memberi contoh dan solusi akan permasalahan dari masyarakat lom itu sendiri. dengan adanya tetua adat, dukun kampung, dukun berobat, dan kepatuhan masyarakat sendiri, maka keteraturan dan eksistensi masyarakat lom tetap terpelihara dan terjaga. Tetua adat berperan sebagai pemimpin kesehari-harian dan dihormati masyarakat dusun. Tetua adat berperan dalam pernikahan, pemakaman, memimpin doa, ritual adat tradisi, dan sebagainya. Dukun kampung memainkan peranan besar terkait dengan kegiatan atau hal berhubungan terhadap lahan dan hutan. Seorang warga lom yang ingin mengambil hasil hutan, misalnya rotan, harus meminta izin dan petunjuk dari dukun kampung. Hal ini bertujuan

untuk menghindari gangguan gaib dari hutan, dan dukun kampung di anggap mampu melindungi warga lom tersebut. Selain itu, dalam tradisi masyarakat lom terdapat sebuah tradisi adat, dikenal dengan tradisi Upacara Nujuh Jerami. Tradisi ini diadakan setiap tahun dilaksanakan pada bulan April atau Mei. Upacara ini merupakan ciri khas kebudayaan Orang Lom tentang upacara panen padi yang sudah turun temurun dilaksanakan. Keberlangsungan kegiatan tradisional ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan lahan perladangan yang mereka garap. Seorang tetua adat akan memainkan peranan dalam memimpin acara tradisi dimasyarakat lom tersebut.

Dalam sistem pengolahan lahan tradisional masyarakat lom di hutan Benak dan Gunung Cundong, dikenal beberapa jenis kepemilikan lahan yang digarap dengan ciri seperti :

1. Mereka memiliki kebun utama tanaman keras seperti cempedak, durian, karet, dan lada. Sistem kebun ini digarap oleh kedua orangtua mereka dan anak tertua yang usia lahan ini sudah tua dan bersifat warisan, dengan kata lain lebih mendekati kelekak yang fungsi dan ruang lainnya ditanami tanaman baru untuk membuat tanah jadi lembut. Di sini mereka membangun rumah kebun utama berbentuk panggung yang cukup besar dan mampu menampung banyak anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki kebun sendiri dengan tanaman yang berbeda dan mereka bertugas mengurusnya dengan arahan dan pantauan dari orangtua. Mereka biasanya membagi-bagi anggota keluarganya ke beberapa lahan yang digarap, dan setiap lahan memiliki pondok kebun sederhana, kecuali rumah kebun utama tempat mereka berkumpul. Sistem penguasaan hutan dan lahan, dikuasai oleh keluarga yang terdiri dari orangtua, anak, menantu, dan cucu. Jarang sekali wilayah Benak dikuasai oleh orang di luar etnis ini, kecuali yang sudah menjadi bagian anggota keluarga mereka melalui konversi pernikahan dan agama. Ketika orang luar menjadi bagian keluarga mereka, yaitu

menantu, secara otomatis sang menantu akan diberikan bagian lahan dan diberikan kepercayaan untuk menggarapnya.

2. Mereka memiliki ladang utama tempat mereka menanam padi (berume) yang dikerjakan oleh semua anggota keluarga, terutama saat membuka lahan, menebang (nebas), membakar, membongkar tanah, menugal (menanam padi) dan memanen.
3. Anak-anak mereka menanam tanaman ringan seperti ubi (mengalo), keladi butir, kemilik, temu lawak, kunyit, lengkuas, jahe, kencur, sayuran seperti terong, kacang, betik (mentimun), cabe, dan buah seperti semangka, jagung, dan pisang.
4. Bagi perempuan yang sudah berusia tua, mereka terkadang memerhatikan tanaman selingan seperti jenis pucot dan purun (tanaman untuk bahan pembuat alat-alat rumah tangga seperti sumpit (tempat nasi) dan juga suyak. Hal ini sangat lazim dilakukan oleh masyarakat tradisional. Setelah dipanen, tanaman ini dikeringkan agar kuat dan dianyam menjadi berbagai macam bentuk alat-alat rumah tangga.
5. Untuk membangun pondok, mereka bergotong royong antar anggota keluarga dan juga sesama penghuni ladang dan kebun. Untuk pondok kebun atau pondok ladang yang hanya dihuni oleh 1-2 orang, dibuat secara sederhana dan tidak terlalu besar (3 x 3,5 m). Setiap anggota keluarga yang sudah bisa dianggap bekerja dengan rentang usia (15 tahun ke atas) diberikan kepercayaan berupa sebuah lahan dan beberapa jenis tanaman permulaan.
6. Sistem penguasaan hutan dan lahan, dikuasai oleh koloni keluarga yang terdiri dari orangtua, anak, menantu, cucu, dan keponakan. Setiap bidang perbukitan seperti di area Gunung Cundong dan Gunung Pelawan, dikuasai oleh para orangtua yang memiliki hubungan darah antar satu dengan yang lain. Daerah ini kedua sisinya berbatasan langsung dengan wilayah Benak dan Air Abik, sehingga kedua sisi ini

dikuasai oleh masyarakat Lom

E. KESIMPULAN

Pengetahuan masyarakat lokal di daerah Bangka Belitung tentang keanekaragaman tanaman, hewan, lahan dan hutan masih cukup mendalam. Seperti tanaman untuk pangan, pohon tahunan, tanaman sayuran, pengobatan yang terpelihara berbungkus budaya dan ekosistem lokal dimana mereka berada. Meskipun demikian ancaman perubahan lingkungan merupakan hal serius dari keberadaan dan eksistensi hutan dan pengetahuan mereka tersebut.

Target Kebijakan adalah Mempertahankan hutan adat sebagai titik tolak pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. **Pertama**, Strategi Pelestarian Hutan Adat meliputi pengembangan sektor industri dan atau perdagangan dengan menjadikan hutan adat sebagai objek, seperti industri pariwisata, Mereorientasi masyarakat sekitar tentang fungsi ekonomi dari hutan adat berdasarkan prinsip ekonomi modern. **Kedua**, Strategi Penekanan Pertumbuhan Ekonomi meliputi Memperkenalkan variasi produk-produk pertanian dan atau produk kehutanan bertitik tolak dari karakteristik hutan adat yang ada, Memberdayakan masyarakat sekitar berdasarkan pada varietas produk pertanian dan atau kehutanan. **Ketiga**, Strategi keseimbangan pelestarian dan pertumbuhan ekonomi meliputi Memberdayakan masyarakat sekitar melalui pengembangan produksi hutan dengan sistem siklus cocok tanam. Pemberdayaan masyarakat sekitar dengan pada strategi pemasaran produk pertanian dari hutan lokal

DAFTAR PUSTAKA

- Adimiharja, Kusnaka. 2008 *Dinamika Budaya Lokal*. Bandung. Pusat KAJIAN LBPB
- Asiah. 2009. *Pengetahuan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan*. Skripsi. IPB
- Dinas Kehutanan. 2011. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Elmira Safitri. 2009. *Identifikasi Dan Inventarisasi Pengelolaan Hutan Rakyat Di Kecamatan Biru-Biru*. Skripsi. USU
- Koenjaraningrat. 1990. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Koentjaraningrat. 1992. *Antropologi Sosial. Dian Rakyat*. Jakarta. hal 48-64
- Oding Affandi, S.Hut, *Tinjauan Antropologi Pelibatan Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kehutanan*. Makalah. Universitas Sumatera Utara
- Permana, Sidik. 2015. *Kampung Naga*. Plantaxia. Yogyakarta
- Rahmawati, R.Et.Al. *Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi Dan Ekologi Manusia Vol.2 2008*
- Scott, James C. 1983. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta : LP3ES.
- Sunaryo dan Laxman Joshi. 2003. *Peranan Pengetahuan Ekologi Lokal Dalam Sistem Agroforestri*. World Agroforestry Centre (ICRAF). Bogor
- Utari, Ayu Dewi. 2012. *Penerapan strategi Hutan Rakyat*. Cakrawala. Yogyakarta.
- Yasa. *Fungsi Kelelak Dalam Layanan Ekologi, Sosial-Budaya Dan Ekonomi*. Tesis.

Mobilisasi Sumberdaya dalam Gerakan Literasi (Studi Pada Gerakan Vespa Pustaka)

Oleh: Luna Febriani, S.Sos., M.A

ABSTRAK

Perilaku literasi merupakan upaya memanfaatkan informasi dari bahan bacaan untuk menjawab beragam persoalan kehidupan manusia sehari-hari, dalam artian ini perilaku literasi bukan sekedar membaca, tapi menulis dan memanfaatkan informasi juga. Di Indonesia, perilaku literasi berada dalam posisi yang memprihatinkan. Dari data yang ada, Indonesia menempati peringkat ke 60 dari 61 negara di dunia terkait perilaku literasi. Rendahnya perilaku literasi di Indonesia ini menjadikan beberapa kelompok masyarakat maupun individu untuk melakukan gerakan dalam rangka meningkatkan perilaku literasi. Salah satunya adalah gerakan Vespa Pustaka, gerakan ini merupakan gerakan literasi yang diinisiasi oleh pemuda di Kabupaten Bangka Selatan. Uniknya, gerakan ini dilakukan dengan cara menyelenggarakan perpustakaan jalanan di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dengan menggunakan sarana motor vespa. Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana gerakan ini dapat eksis dan diterima oleh masyarakat di kabupaten Bangka Selatan atau dengan kata lain mobilisasi apa saja yang digunakan oleh Vespa Pustaka dalam melakukan gerakan literasi ini. Dalam membedah penelitian ini digunakan teori mobilisasi sumber daya. Sehingga, dapat dilihat bentuk mobilisasi sumber daya yang digunakan oleh Vespa Pustaka dalam melakukan gerakannya,

Kata Kunci: Literasi, mobilisasi, gerakan, pemuda

A. Pendahuluan

Perilaku literasi di Indonesia berada dalam posisi yang memprihatinkan. Berdasarkan data yang didapatkan, peringkat literasi Indonesia berada pada posisi kedua terbawah atau peringkat 60 dari 61 negara yang diteliti oleh Central Connecticut State University (2015). Fakta ini juga didukung oleh survei yang dilakukan oleh BPS mengenai minat baca dan menonton anak-anak Indonesia yang menyatakan bahwa hanya 17,66% anak-anak Indonesia yang memiliki minat baca, sementara itu sebesar 91,76% anak-anak Indonesia memiliki minat menonton (<http://www.femina.co.id/trending-topic/peringkat-literasi-indonesia-nomor-dua-dari-bawah>).

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa perilaku literasi di Indonesia terbilang kecil. Perilaku literasi merupakan upaya memanfaatkan informasi dari bahan bacaan untuk menjawab beragam persoalan kehidupan manusia sehari-

hari. Dengan kata lain, perilaku literasi merupakan suatu kontinum, yakni mulai dari kemampuan membaca; kemudian membaca dan menulis, diteruskan membaca menulis dan berbahasa dan akhirnya membaca menulis berpikir kritis dan berbahasa lisan yang dimanfaatkan untuk belajar sepanjang hayat baik dirumah, ditempat kerja maupun dalam masyarakat (Suyono, 82).

Untuk meningkatkan perilaku literasi masyarakat Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah (GSL). Gerakan ini dilakukan dengan cara membaca buku nonpelajaran selama 15 menit sebelum waktu belajar dimulai. Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dikuasai secara lebih baik. Selain muncul gerakan literasi yang diinisiasi oleh pemerintah, muncul pula gerakan dan organisasi yang digagas oleh beberapa

kelompok masyarakat maupun individu untuk dapat menggiatkan perilaku literasi. Salah satunya adalah gerakan literasi Vespa Pustaka yang berlokasi di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.

Gerakan literasi Vespa Pustaka merupakan gerakan literasi yang diinisiasi oleh kelompok pemuda-pemuda yang ada di Toboali, Kabupaten Selatan. Pemuda merupakan Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang. Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2009 Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Definisi yang kedua, pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil

Sejarah bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh pemuda. Kehadiran gerakan pemuda yang sarat nilai dan diapresiasi oleh lapisan masyarakat inilah, yang kemudian harus dikembangkan sedemikian rupa. Sehingga pergerakan bangsa menjadi semakin dinamis, dan perbaikan kehidupan bernegara dalam setiap dimensi kehidupan selalu berkesinambungan (Dewanata, 2008: 139)

Kemunculan Vespa Pustaka yang merupakan gerakan literasi Vespa Pustaka ini tidak dapat dilepaskan dari rendahnya perilaku literasi di Kabupaten Bangka Selatan,. Selain itu, minimnya akses dan ruang untuk masyarakat dalam mengakses buku atau bahan bacaan menjadikan dasar dari gerakan literasi pemuda ini. Hadirnya gerakan literasi Vespa Pustaka mendapatkan respon positif oleh masyarakat sekitar, sehingga hingga saat ini di usianya yang menginjak 3 tahun kehadiran Vespa Pustaka tetap mendapatkan ruang dalam masyarakat sehingga sampai saat ini gerakan literasi masih tetap ada

dan berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mencari tahu bagaimana Vespa Pustaka mengembangkan gerakan literasinya, atau dengan kata lain sumberdaya apa saja yang digunakan gerakan literasi Vespa Pustaka sehingga mereka dapat bertahan dan berkembang hingga saat ini.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana mobilisasi sumberdaya yang dilakukan Vespa pustaka dalam mengembangkan gerakan Vespa Pustaka?

C. Kerangka Teoritis

Dalam mengkaji tulisan ini, peneliti menggunakan salah satu jenis teori dari teori gerakan sosial yakni teori mobilisasi sumber daya. Menurut Giddens (gerakan sosial merupakan upaya kolektif untuk mengejar suatu kepetingan bersama, atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan (Suharko, 2014:15). Konsep dan teori tentang Gerakan Sosial mengalami perkembangan pesat pada dekade 60an dan semakin kaya memasuki abd ke-21.

Teori mobilisasi sumber daya manusia merupakan salah satu bagian teori dari teori gerakan sosial baru. Munculnya gerakan sosial baru ditandai dengan semakin beragamnyapelaku gerakan sosial seperti mahasiswa/i, kalangan profesional, perempuan dan tidak lagi menjadi fortopolio buruh dan petani dan juga isu yang hendak dicapai seperti hak asasi manusia, demokratisasi, perempuan, lingkungan hidup, ketidakadilan membuat studi gerakan sosial bergeser, dari terpusat menjadi menyebar ke berbagai pusat-pusat disiplin ilmu baik dikalangan akademisi maupun pelaku perubahan (Situmorang, 2013: 10)

Secara umum, studi-studi gerakan sosial di Indonesia banyak mengacu pada kerangka teoritis dari pandangan Rajendra Singh, yang mana menurut Singh peta teori gerakan sosial

terdiri dari: (1) Klasik, (2) neo-klasik dan (3) Gerakan Sosial Baru (Sukmana, 2016: 8). *Classical social movements* meliputi studi tentang perilaku kolektif seperti kerumunan, kerusuhan dan penolakan yang berbasis pada akar psikologi sosial klasik. Sementara, tradisi neo klasik dihubungkan dengan teori gerakan sosial lama yang mana teori memiliki dua model, yaitu fungsional dan dialektika Marxis. Sedangkan teori gerakan sosial baru atau gerakan sosial kontemporer memiliki cara pandang tersendiri tentang logika dari tindakan yang berbasis dalam politik, ideologi, kultur, etnisitas, jender dan seks sebagai akar dari tindakan-tindakan kolektif. Sedangkan teori gerakan sosial lama menganggap bahwa hal yang paling penting dari aktor sosial didefinisikan oleh relasi-relasi kelas yang berakar dalam proses produksi dan identitas sosial lainnya yang memberntuk aktor-aktor kolektif (Sukmana, 2015: 118).

Tulisan tentang pemuda dan gerakan literasi ini akan dibedah dengan teori mobilisasi sumberdaya yang diperkenalkan oleh Anthony Oberschall. Teori mobilisasi sumberdaya memfokuskan perhatiannya pada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan. Teori ini berasumsi bahwa faktor penting kelompok melakukan mobilisasi karena memiliki jaringan komunikasi yang sudah mapan, terdapatnya anggota dengan kemapanan kepemimpinan dan adanya partisipasi tradisional dari anggotanya. Selain itu, dalam kelompok juga terdapat pemimpin, anggota, terdapat pertemuan, kegiatan rutin, rantai sosial, dan berbagai kepercayaan, simbol serta bahasa yang sama.

Sehingga, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor determinan dalam suatu gerakan sosial menurut teori mobilisasi sumberdaya, yakni:

1. Organisasi gerakan sosial, merupakan sistem nilai bersama, perasaan dari komunitas, norma tindakan dan struktur organisasi.
2. Pemimpin dan kepemimpinan, pemimpin didefinisikan sebagai pembuat keputusan strategis yang menginspirasi dan mengorganisais orang lain untuk ber-

partisipasi, sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok melalui pencapaian tujuan.

3. Sumberdaya dan mobilisasi sumberdaya, terdapat lima tipe sumberdaya dalam gerakan sosial, yakni: sumberdaya moral, sumberdaya kultural, sumberdaya organisasi sosial, sumberdaya manusia dan sumberdaya material,
4. Jaringan dan partisipasi, jaringan sosial merupakan faktor pelekat bagi sebagian besar anggota dalam berbagai organisasi.
5. Peluang dan kapasitas masyarakat.perspektif ini mengacu pada kemampuan masyarakat lokal untuk mengorganisir suatu tindakan kolektif.

Teori mobilisasi sumberdaya diatas akan melihat sejauh mana gerakan yang dilakukan oleh Vespa Pustaka di Kabupaten Bangka Selatan dapat diterima oleh asyarakat dan dapat bertahan hingga sekarang ini.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan riset naratif. Czarniawska (dalam Craswell) mendefinisikan riset naratif sebagai tipe sedain kualitatif yang spesifik yang narasinya dipahami sebagai teks yang dituturkan atau dituliskan dengan menceritakan tentang peristiwa/aksi atau rangkaian peristiwa. aksi, yang terhubung secara kronologis (Craswell, :201596). Prosedur pelaksanaan riset ini dimulai dengan memfokuskan pada pengkajian terhadap satu atau dua individu dan penyusuna kronologis atas makna dari pengalaman tersebut.

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, pengamatan, dokumen-dokumen terkait, gambar dan sumber data kualitatif lainnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis secara sistematis, yakni dengan menggunakan metode analisis data interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari (Idrus, 2002):

1. Reduksi data merupakan tahap pemilihan,

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan

2. Penyajian data merupakan tahap penyusunan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan merupakan proses akhir dimana terjadi penarikan arti atau makna dari data yang telah ditampilkan.

E. Hasil dan Pembahasan

Perilaku literasi di Indonesia menempati posisi yang memprihatinkan, berdasarkan data yang ada perilaku literasi Indonesia menempati posisi ke 60 dari 61 negara di dunia. Rendahnya perilaku literasi ini kemudian menjadikan beberapa kelompok masyarakat dan individu membentuk dan menggiatkan gerakan-gerakan literasi, salah satunya adalah gerakan Vespa Literasi. Vespa Pustaka merupakan salah satu gerakan literasi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Kabupaten Bangka Selatan. Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Toboali sebagai ibukotanya.

Kelahiran gerakan Vespa Pustaka ini diinisiasi oleh salah seorang pemuda dari Toboali, yakni Agam Primadi. Dibentuknya gerakan literasi Vespa Pustaka didasari oleh beberapa hal, yakni:

1. Untuk mengatasi persoalan minimnya perilaku literasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bangka Selatan. Bangka Selatan termasuk dalam Kabupaten yang rendah akan tingkat literasinya.
2. Untuk memberikan ruang membaca kepada masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan umumnya dan Toboali khususnya karena selama ini di Kabupaten Bangka Selatan masih minimnya ruang membaca bagi masyarakat. Selain tidak adanya ruang untuk membaca bagi masyarakat, sulitnya akses untuk mendapatkan buku-buku bacaan

dikarenakan buku-buku yang harganya relatif tinggi juga mendasari lahirnya gerakan Vespa Pustaka.

Alasan tersebut menjadikan Agam sebagai pemuda Bangka Selatan untuk menggagas rumah baca bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan, sehingga berawal dari perpustakaan pribadi yang dimilikinya ia kemudian membentuk rumah baca yang dibuka bagi masyarakat umum. Kemunculan rumah baca ini mendapatkan respon baik bagi masyarakat, karena setidaknya telah ada ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan-bahan bacaan. Selain mendapatkan respon baik dari masyarakat, kemunculan rumah baca ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan buku-buku mereka untuk dapat dibaca oleh masyarakat banyak.

Adanya respon yang baik dari masyarakat ini kemudian menjadikan sang penggiatnya untuk memperbesar dan memperluas jaringan rumah baca. Oleh karena itu, di tahun 2014 penggiat rumah baca komunitas ini melakukan penjajakan dengan beberapa pengendara sepeda motor jenis vespa yang tergabung dalam komunitas Scooter Toboali di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Penjajakan ini dilakukan untuk memperluas akses rumah baca komunitas agar seluruh element masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka Selatan dapat menikmati fasilitas dan merasakan manfaat dari kehadiran rumah baca ini. Kerjasama ini kemudian disambut baik oleh para pengendara motor vespa yang tergabung dalam Scooter Toboali, yang kemudian tepat pada tanggal 8 Mei 2015 terbentuklah gerakan literasi yang diberi nama Vespa Pustaka.

Seiring terbentuknya Gerakan Vespa Pustaka, maka dibentuk pula struktur organisasi kepengurusannya. Dibentuknya struktur organisasi ini untuk memudahkan dan memperjelas pembagian kerja para anggota dan untuk melegalisasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Vespa Pustaka. Organisasi ini diketua oleh penggiat dari gerakan Vespa Pustaka itu sendiri dan memiliki 23 anggota yang mana anggota-anggota tersebut juga merupakan anggota

Scooter Toboali. Pelibatan pengendara Vespa dalam melakukan gerakan literasi dikarenakan beberapa hal, yakni:

1. Anggota pengendara vespa merupakan pemuda-pemuda yang memiliki semangat tinggi dan enerjik
2. Untuk mengisi waktu luang para pengendara-pengendara vespa, karena selama ini pengendara vespa dianggap hanya
3. Untuk mengubah image atau citra para pengendara vespa yang selama ini cenderung dipandang negatif oleh masyarakat sekitar. Dengan melibatkan para pengendara vespa ini diharapkan image masyarakat terhadap pengendara motor vespa menjadi positif.

Dalam melakukan gerakannya, ada beberapa kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh gerakan Vespa Pustaka, yakni; rumah baca, literasi jalanan, serta diskusi-diskusi tematik. Rumah baca Vespa Pustaka merupakan perpustakaan bagi masyarakat yang hendak meminjam dan membaca buku-buku yang disediakan. Rumah baca ini memiliki koleksi 1500an yang terdiri dari buku sosial, psikologi, ekonomi, motivasi, seri remaja dan anak-anak. Rumah baca ini dibuka setiap hari dari mulai pukul 15.00 s.d 17.45 WIB. Untuk literasi jalanan dilakukan oleh Vespa Pustaka dengan cara membuka lapak atau perpustakaan buku di jalanan. Perpustakaan jalanan ini dilakukan dalam waktu 3-4 kali dalam seminggu dan bertempat di depan dan Gedung Nasional, Toboali. Sedangkan untuk diskusi tematik dilakukan di rumah baca sesuai dengan tema-tema yang sedang berkembang.

Gerakan Vespa Pustaka yang digagas oleh pemuda-pemuda Vespa di Toboali Kabupaten Bangka Selatan mendapat tanggapan atau respon positif bagi masyarakat sekitar. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat untuk mengunjungi rumah baca dan perpustakaan jalanan yang digerakkan oleh Vespa Pustaka. Keberhasilan dalam melakukan gerakan literasi oleh Vespa Pustaka tidak dapat dilepaskan dari kemampuan gerakan tersebut dalam memobilisasi sumberdaya yang sifatnya internal

maupun eksternal yang ada dalam lingkungan masyarakat sekitar. Menurut McCarthy dan Zald (dalam Sukmana 2010:157) menyatakan bahwa perkembangan gerakan sosial dipandang sebagai produk dari kekuatan-kekuatan lingkungan baik bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal meliputi: kepemimpinan, tingkat ketersediaan sumberdaya, ukuran kelompok dan tingkat organisasi internal. Sedangkan faktor-faktor eksternal meliputi: tingkat represi dari masyarakat, tingkat simpatisan eksternal, serta jumlah dan kekuatan kelompok politik.

Dari paparan diatas, maka dapat dirumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan gerakan Vespa Pustaka antara lain:

1. Organisasi Gerakan Sosial

Menurut McLaughlin (Sukmana, 2016) karakteristik yang menonjol dari suatu gerakan sosial adalah meliputi adanya sistem nilai bersama, perasaan dari komunitas, norma tindakan dan struktur organisasi. Faktor organisasi gerakan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi dalam gerakan literasi Vespa Pustaka, dimana di dalam gerakan ini dibangun sebuah organisasi dengan struktur yang jelas dan didalamnya terdapat sistem nilai bersama, perasaan dari komunitas serta norma dan tindakan. Sistem nilai bersama yang dimiliki dan dijaga oleh Vespa Pustaka adalah nilai kepercayaan dan kesukarelaan. Nilai kepercayaan mengacu pada adanya rasa percaya terhadap sesama anggota komunitas serta para peminjam buku. Untuk nilai kesukarelaan dapat dilihat dari anggota-anggota yang terlibat dalam gerakan literasi Vespa Pustaka merupakan para sukarelawan yang tidak dibayar, bahkan mereka harus iuran setiap bulannya untuk menjamin keberlangsungan gerakan literasi ini. Hal inilah yang kemudian menjadikan mereka dapat menjaga soliditas antara sesama, karena hubungan yang terjalin dalam gerakan literasi Vespa Pustaka bukan berdasarkan material, melainkan berdasarkan hubungan kekeluargaan.

2. Pemimpin dan Kepemimpinan

Menurut Morris dan Staggenborg (Sukmana, 2016), para pemimpin sangat penting dalam gerakan sosial, mereka menginspirasi komitmen, memobilisasi sumber-sumber, menciptakan dan memahami kesempatan, menyusun strategi dan mempengaruhi hasil-hasil. Pemimpin gerakan di definisikan sebagai pembuat keputusan strategis yang menginspirasi dan mengorganisasi orang lain untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial. Sedangkan kepemimpinan adalah kemauan untuk mempengaruhi kelompok melalui pencapaian tujuan. Dalam gerakan literasi Vespa Pustaka, pemimpin memiliki peranan penting dalam mengembangkan dan memajukan gerakan ini. Pemimpin gerakan Vespa Pustaka termasuk dalam dapat menginspirasi para anggota gerakan, serta dapat memobilisasi sumber-sumber yang ada untuk memajukan gerakan ini, seperti jaringan. Dimana, pemimpin gerakan Vespa Pustaka ini pernah menjadi pemuda pelopor yang mewakili pemuda Bangka Belitung ke Tingkat nasional, sehingga jaringan sudah banyak terbangun.

3. Sumberdaya dan Mobilisasi Sumberdaya

Menurut Edwards dan McCarthy (Sukmana, 2016), terdapat lima sumberdaya yakni: sumberdaya moral, sumberdaya kultural, sumberdaya organisasi sosial, sumberdaya manusia dan sumberdaya material. Dalam melakukan dan mengembangkan gerakan literasi, gerakan Vespa Pustaka memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada dalam lingkungan masyarakat sekitar. Sumberdaya moral disini merupakan dukungan-dukungan simpati dan dukungan orang atau tokoh-tokoh terkenal. Dukungan simpati ini dapat dilihat dari banyaknya donasi-donasi buku yang diberikan oleh masyarakat dalam rangka mendukung gerakan literasi. Selain itu gerakan literasi juga didukung oleh banyak

pihak, baik yang berasal dari masyarakat maupun dari tokoh-tokoh birokrasi.

Kedua, sumberdaya kultural, dapat dilihat dari bagaimana gerakan ini memanfaatkan dan memiliki kompetensi atau pengetahuan khusus yang dapat menjadi nilai untuk suatu gerakan sosial. Dalam hal ini kompetensi kultural yang dimobilisasi oleh Vespa Pustaka adalah dengan cara melibatkan pemuda-pemuda daerah dalam menggerakkan organisasi dan kegiatan Vespa Pustaka. Dilibatkannya pemuda daerah menjadi nilai penting, karena pemuda merupakan orang yang masih memiliki kemauan dan semangat yang tinggi dalam menjalankan kegiatan organisasi. Keuntungan lainnya dengan melibatkan pemuda daerah adalah interaksi dengan pembaca atau pengunjung akan lebih mudah dan cepat dilakukan, karena berasal dari kebudayaan yang sama. Selain pelibatan pemuda daerah, mobilisasi kultural lainnya adalah dengan melakukan literasi di jalan, dimana gerakan Vespa Pustaka aktif menjemput bola para pembaca yang tidak memiliki waktu luang untuk berkunjung ke rumah baca. Dengan melakukan literasi jalanan, maka mereka memanfaatkan ruang jalanan yang biasanya didatangi dan disukai anak-anak muda untuk menghabiskan waktunya, sehingga banyak anak muda yang tertarik dengan literasi jalanan yang digagas oleh Vespa Pustaka. Selain itu sumberdaya kultural yang digunakan oleh gerakan Vespa Pustaka adalah penggunaan media-media sosial yang digunakan untuk sarana promosi dan informasi kepada masyarakat luas tentang eksistensi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Vespa Pustaka.

Ketiga, sumberdaya organisasi sosial meliputi: jaringan sosial dan organisasi. Gerakan literasi Vespa Pustaka memanfaatkan dan memobilisasi sumberdaya ini untuk mengembangkan gerakannya, seperti pemanfaatan jaringan sosial. Tidak dapat dipungkiri Vespa Pustaka memiliki banyak

jaringan dengan organisasi-organisasi baik dalam lingkup lokal maupun dalam lingkup luar, seperti KNPI, HIPMI, PBNU serta jaringan rumah baca yang ada diluar kota. Banyaknya jaringan sosial yang dimiliki oleh gerakan Vespa Literasi ini dirasakan dapat membantu keberlangsungan dan prasarana yang dibutuhkan, seperti baru-baru ini Vespa Pustaka mendapat bantuan ratusan buku dari salah satu penerbit yang ada di Pulau Jawa. Selain bantuan buku, ada pula bantuan-bantuan lainnya yang bantuan dana dari Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan lain sebagainya.

Keempat, mobilisasi sumber daya manusia. Tidak dapat dipungkiri sumberdaya manusia lebih nyata dan lebih muda diapresiasi dibandingkan sumberdaya moral, sumberdaya kultural dan sumberdaya organisasi sosial. Mobilisasi sumberdaya manusia dapat dilihat dari kualitas sumberdaya manusia yang ada dalam gerakan tersebut dimana hampir sebagian besar sumberdaya manusia yang tergabung dalam gerakan Vespa Pustaka merupakan orang yang berpendidikan dan sedang menempuh pendidikan strata 1, bahkan ada pula yang sedang menempuh pendidikan strata 2, yakni ketua Vespa Pustaka. Sehingga, setiap anggota Vespa Pustaka memiliki kompetensi masing-masing sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka.

Terakhir, sumberdaya material merupakan sumberdaya yang bersifat modal atau finansial. Sumber daya material merupakan bagian penting, karena dari sumberdaya ini eksistensi dapat berlangsung. Tidak dapat dipungkiri, dalam melakukan gerakan literasinya, hampir sebagian besar sumberdaya finansialnya dikeluarkan dari kantong pribadi ketua organisasi. Namun, selain dari bantuan uang pribadi pemimpin organisasi, sumberdaya finansial gerakan ini juga ditopang oleh iuran para anggotanya dimana setiap bulannya anggota diwajibkan untuk membayar iuran sebesar Rp. 20.000,-

(dua puluh ribu rupiah). Iuran ini secara tidak langsung dapat membantu kegiatan operasional yang dilakukan oleh Vespa Pustaka.

Pendayagunaan mobilisasi sumberdaya seperti yang telah dipaparkan diatas menjadikan gerakan Literasi Vespa Pustaka ini dapat ada bertahan dan diterima oleh masyarakat. Mobilisasi sumberdaya merupakan pemanfaatan sumberdaya yang ada dilingkungan sekitar baik yang sifatnya internal maupun eksternal untuk mendukung dan mengembangkan suatu gerakan sosial. Selain mobilisasi sumberdaya diatas, masih banyak sumberdaya yang sesungguhnya dapat dikembangkan oleh gerakan Vespa Pustaka. Oleh karena itu diperlukan inventarisir sumberdaya dan strategi mobilisasi sumberdaya agar pemanfaatannya lebih optimal.

F. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap gerakan literasi Vespa Pustaka yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan Vespa Pustaka mendapat respon positif dan antusias yang tinggi bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan Vespa Pustaka memberikan ruang dan akses bagi masyarakat Toboali dan Bangka Selatan umumnya untuk dapat membaca. Penerimaan masyarakat terhadap gerakan literasi Vespa Pustaka ini tidak dapat dilepaskan dari kemampuan gerakan literasi tersebut dalam memobilisasi sumberdaya yang ada. Mobilisasi sumberdaya merupakan pemanfaatan sumberdaya yang ada dilingkungan sekitar baik yang sifatnya internal maupun eksternal untuk mendukung dan mengembangkan suatu gerakan sosial.

Menurut McCarthy dan Zald (dalam Sukmana 2010:157) menyatakan bahwa perkembangan gerakan sosial dipandang sebagai produk dari kekuatan-kekuatan lingkungan baik bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal meliputi: kepemimpinan, tingkat ketersediaan sumberdaya, ukuran kelompok dan

tingkat organisasi internal. Sedangkan faktor-faktor eksternal meliputi: tingkat represi dari masyarakat, tingkat simpatian eksternal, serta jumlah dan kekuatan kelompok politik. Adapun mobilisasi sumberdaya yang dilakukan oleh gerakan Vespa Pustaka antara lain:

1. Sumberdaya moral disini merupakan dukungan-dukungan simpati dan dukungan orang atau tokoh-tokoh terkenal. Dukungan simpati ini dapat dilihat dari banyaknya donasi-donasi buku yang diberikan oleh masyarakat dalam rangka mendukung gerakan literasi. Selain itu gerakan literasi juga didukung oleh banyak pihak, baik yang berasal dari masyarakat maupun dari tokoh-tokoh birokrasi.

2. Pemimpin dan Kepemimpinan

Menurut Morris dan Staggenborg, para pemimpin sangat penting dalam gerakan sosial, mereka menginspirasi komitmen, memobilisasi sumber-sumber, menciptakan dan memahami kesempatan, menyusun strategi dan mempengaruhi hasil-hasil. Pemimpin gerakan Vespa Pustaka (Agam Primadi) menurut para anggota kelompok Vespa Pustaka merupakan orang atau sosok pimpinan yang dapat menginspirasi para anggota gerakan, memiliki kompetensi akademik serta dapat memobilisasi sumber-sumber yang ada untuk memajukan gerakan ini, seperti jaringan. Dimana, pemimpin gerakan Vespa Pustaka ini pernah menjadi pemuda pelopor yang mewakili pemuda Bangka Belitung ke Tingkat nasional, sehingga jaringan sudah banyak terbangun.

3. Sumberdaya dan Mobilisasi Sumberdaya

- Sumberdaya moral disini merupakan dukungan-dukungan simpati dan dukungan orang atau tokoh-tokoh terkenal. Dukungan simpati ini dapat dilihat dari banyaknya donasi-donasi buku yang diberikan oleh masyarakat dalam rangka mendukung gerakan literasi. Selain itu gerakan literasi juga didukung oleh banyak pihak, baik yang berasal dari masyarakat maupun dari tokoh-tokoh birokrasi.

- Sumberdaya kultural, dalam hal ini kompetensi kultural yang dimobilisasi oleh Vespa Pustaka adalah dengan cara melibatkan pemuda-pemuda daerah dalam menggerakkan organisasi dan kegiatan Vespa Pustaka. Dilibatkannya pemuda daerah menjadi nilai penting, karena pemuda merupakan orang yang masih memiliki kemauan dan semangat yang tinggi dalam menjalankan kegiatan organisasi. Kaum muda dianggap memiliki keunggulan dibandingkan kelompok sosial lain. Mereka lahir dari kelas menengah perkotaan yang memiliki modal sosial dan budaya dibandingkan kelompok sosial lainnya. Modal sosial seperti kemampuan teknologi informasi, keterampilan berjejaring, serta prestasi akademik dan pendidikan telah memungkinkan mereka membangun kekuatan sosial melalui gerakan sosial (Suharko dkk, 2014; 24).

Keuntungan lainnya dengan melibatkan pemuda daerah adalah interaksi dengan pembaca atau pengunjung akan lebih mudah dan cepat dilakukan, karena berasal dari kebudayaan yang sama. Selain pelibatan pemuda daerah, mobilisasi kultural lainnya adalah dengan melakukan literasi di jalan, dimana gerakan Vespa Pustaka aktif menjemput bola para pembaca yang tidak memiliki waktu luang untuk berkunjung ke rumah baca.

- Ketiga, sumberdaya organisasi sosial meliputi: jaringan sosial dan organisasi. Gerakan literasi Vespa Pustaka memanfaatkan dan memobilisasi sumberdaya ini untuk mengembangkan gerakannya, seperti pemanfaatan jaringan sosial. Tidak dapat dipungkiri Vespa Pustaka memiliki banyak jaringan dengan organisasi-organisasi baik dalam lingkup lokal maupun dalam lingkup luar, seperti KNPI, HIPMI, PBNU serta jaringan rumah baca yang ada diluar kota.
- Keempat, mobilisasi sumber daya manusia. Tidak dapat dipungkiri sumberdaya manusia lebih nyata dan lebih muda diapresiasi

dibandingkan sumberdaya moral, sumberdaya kultural dan sumberdaya organisasi sosial. Mobilisasi sumberdaya manusia dapat dilihat dari kualitas sumberdaya manusia yang ada dalam gerakan tersebut dimana hampir sebagian besar sumberdaya manusia yang tergabung dalam gerakan Vespa Pustaka merupakan orang yang berpendidikan dan sedang menempuh pendidikan strata 1, bahkan ada pula yang sedang menempuh pendidikan strata 2.

- Terakhir, sumberdaya material merupakan sumberdaya yang bersifat modal atau finansial. Sumber daya material merupakan bagian penting, karena dari sumberdaya ini eksistensi dapat berlangsung. Tidak dapat dipungkiri, dalam melakukan gerakan literasinya, hampir sebagian besar sumberdaya finansialnya dikeluarkan dari kantong pribadi ketua organisasi. Namun, selain dari bantuan uang pribadi pemimpin organisasi, sumberdaya finansial gerakan ini juga ditopang oleh iuran para anggotanya dimana setiap bulannya anggota diwajibkan untuk membayar iuran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Pendayagunaan sumberdaya di lingkungan baik yang sifatnya internal maupun eksternal menjadikan faktor determinan dalam mempengaruhi perkembangan suatu gerakan sosial.

G. Daftar Pustaka

- Creswell, John. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan (Edisi 3)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewanata Pandu dan Chavcay Syaifullah. 2008. *Rekonstruksi Pemuda*. Jakarta: Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga.
- Idrus, Muhammad. 2002. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Erlangga: Yogyakarta.
- Situmorang, Abdul Wahib. 2013. *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar:

- Suharko dkk, 2014. *Organisasi Pemuda Lingkungan di Indonesia Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.

Sumber Internet:

- <http://www.femina.co.id/trending-topic/peringkat-literasi-indonesia-nomor-dua-dari-bawah> diunduh pada 6 Juni 2017 pukul 12.00.
- <https://tirto.id/literasi-indonesia-yang-belum-merdeka-bBJS> diunduh pada 6 Juni 2017 pukul 10.04.
- <http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/view/50/293> diunduh pada 6 Juni 2017 pukul 13.19.

Peningkatan Kontrol Sosial Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA

Oleh: Putra Pratama Saputra, MPS.Sp

ABSTRACT

The drug abuse problem that occurred in society these days is very alarming. The existence of the perpetrator and the activity of drug abuse has become a custom of the community. However, permissiveness shown as if the people let these problems occur. The existence of stakeholders is expected to have a positive impact, so that the functions of society can work well, especially in the prevention of drug abuse. The improvement of society social control is an effort to prevent drug abuse. The purpose of this research is to improve the society social control as away to prevent drug abuse. The method used in this research is a qualitative research method with action research. The Place of research conducted in RW 18 Sadang Serang Village, Coblong Sub-district, Bandung with a number of main informants and supporting informant were 6 people as many as 3 people. The intervention is done through several activities, namely the Counseling and Socialization, Social Campaign, and Forming Local Organization "Pemuda Anti NAPZA". The results showed an increase in society social control is an effort to prevent drug abuse in RW 18 Sadang Serang Village. Final model has been enhanced tends to be more effective in addressing the problem of drug abuse which is occurred.

Key Words: Social Control, Society, NAPZA (Narcotics, Psychotropics and Addicted Substances), and Preventing Drugs Abuse.

A. Latar Belakang

1. Pendahuluan

Mengulas tentang pemaknaan dari NAPZA, NAPZA itu sendiri memiliki arti, yaitu: Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Selain itu juga, ada yang menyebutnya NARKOBA (Narkotika dan Obat-obat Berbahaya) atau NAZA (Narkotika dan Zat Adiktif). NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA. Istilah NAPZA umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. NAPZA sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu: zat yang bekerja

pada otak, sehingga menimbulkan perubahan pikiran perasaan, perilaku, perasaan, dan sikap.

Masalah penyalahgunaan NAPZA sekarang ini sudah merupakan bencana nasional. Hal ini ditandai dengan dicanangkannya "Indonesia Darurat Narkoba", makin meningkatnya jumlah populasi penyalahgunaan, kompleksitas permasalahan, maupun jenis zat yang disalahgunakan. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Besar Bandung, pada tahun 2015 sebanyak 555 kasus penyalahgunaan NAPZA dan hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk saat ini lebih dari 300 tersangka yang mendekam di Tahanan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Besar Bandung dikarenakan kasus penyalahgunaan NAPZA. Pelaku penyalahgunaan NAPZA di Kota Bandung berusia di bawah 20 tahun dan di atas 30 tahun. Namun, yang paling banyak berada pada usia di atas 30 tahun dengan jumlah 61 persen. Korban

penyalahgunaan NAPZA memiliki pekerjaan yang beragam, yaitu: anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai swasta, wiraswasta, mahasiswa/pelajar, tunakarya, dan profesi lainnya. Dilihat dari tingkat pendidikan, korban penyalahgunaan NAPZA yang tertinggi terjadi pada lulusan SLTA dan terendah terjadi pada lulusan Sarjana. Tempat yang menjadi lokasi transaksi atau tindak pidana, yaitu: tempat keramaian, tempat permukiman, jalan umum, sekitar sekolah/kampus, dan lain-lainnya. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung telah menyediakan program rehabilitasi untuk 750 orang. Akan tetapi, korban penyalahgunaan NAPZA yang baru mendaftar untuk di rehabilitasi sebanyak 274 orang. Beberapa pusat rehabilitasi untuk merawat korban penyalahgunaan NAPZA yang ada di Kota Bandung, yaitu: RSUD Ujung Berung, Puskesmas Ibrahim Adjie, Puskesmas Kopo, Puskesmas Pasir Kaliki, Klinik Yabes, Rumah Cemara, Sekar Mawar, dan lain-lainnya.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan program pencegahan dan penanganan penyalahgunaan NAPZA. Salah satu bentuknya berupa “Gerakan Nasional Rehabilitasi 100.000 Korban Penyalahgunaan Narkoba”. Upaya rehabilitasi dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Kementerian Sosial berkaitan dengan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA, sementara Kementerian Kesehatan berkaitan dengan rehabilitasi medis bagi korban penyalahgunaan NAPZA. Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam hal ini berperan dalam upaya pencegahan dan keterkaitan dengan aspek hukum para pelaku penyalahgunaan NAPZA. Program “Gerakan Nasional Rehabilitasi 100.000 Korban Penyalahgunaan Narkoba” bertujuan untuk menurunkan jumlah pemakaian NAPZA. Hal ini dikarenakan dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan NAPZA tidak bisa dilakukan oleh 1 *leading sector*. Perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta.

Masalah penyalahgunaan NAPZA di Kelurahan Sadang Serang menjadi sorotan

sebagai wilayah yang rawan terhadap masalah penyalahgunaan NAPZA dikarenakan banyak terjadi kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah penyalahgunaan NAPZA. Hasil asesmen yang dilakukan melalui metode partisipatif (*focus group discussion*) dan metode non partisipatif (wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi), menunjukkan bahwa wilayah yang rentan terhadap masalah penyalahgunaan NAPZA yang ada di Kelurahan Sadang Serang, yaitu: RW 15, 16, 18, dan 19. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumentasi, dan FGD menggambarkan bahwa wilayah RW 18 rentan terhadap masalah penyalahgunaan NAPZA. Beberapa pertimbangan yang menjadi alasan peneliti menentukan RW 18 Kelurahan Sadang Serang sebagai lokasi penelitian, yaitu: di RW 18 pernah terjadi penggerebekan kasus penyalahgunaan NAPZA, banyaknya lokasi yang menjadi tempat untuk mengkonsumsi minuman alkohol, sering terjadinya perkelahian dan perjudian, wilayah yang berdekatan dengan Pasar Tilil dan Terminal Sadang Serang, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap masalah penyalahgunaan NAPZA, tidak adanya dukungan masyarakat terhadap masalah penyalahgunaan NAPZA, serta kurangnya kontrol sosial masyarakat terhadap masalah penyalahgunaan NAPZA.

Upaya tokoh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung sangat dibutuhkan dalam usaha pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Masalah penyalahgunaan NAPZA dapat memisahkan antara orang tua dengan anak, keluarga, dan saudaranya. Apabila tidak ditanggulangi secara tuntas, maka kita akan kehilangan generasi penerus selanjutnya. Usaha dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA, bukanlah semata-mata untuk kepentingan korban penyalahgunaan ataupun pihak lain, tetapi demi terhindarnya dan mencegah penyebaran penyalahgunaan NAPZA yang akan menimbulkan korban lain di lingkungan masyarakat itu sendiri.

Sehubungan dengan hal di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang

“Peningkatan Kontrol Sosial Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung”. Ini dikarenakan Kelurahan Sadang Serang merupakan wilayah rawan terhadap masalah penyalahgunaan NAPZA di Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Peningkatan Kontrol Sosial Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung”. Selanjutnya, untuk mendeskripsikan permasalahan penelitian tersebut peneliti perlu menjabarkan ke dalam sub permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana karakteristik informan?, (2) Bagaimana kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA?, (3) Bagaimana perencanaan model peningkatan kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA?, (4) Bagaimana implementasi model peningkatan kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA?, (5) Bagaimana model akhir peningkatan kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan model yang tepat untuk peningkatan kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu: (1) Menggambarkan karakteristik informan, (2) Menggambarkan kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (3) Merencanakan model peningkatan kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (4) Mengimplementasikan model peningkatan kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, serta (5)

Merumuskan model akhir peningkatan kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini, yaitu: (1) Memberikan masukan tentang model peningkatan kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (2) Memberikan masukan tentang konsep pengembangan masyarakat lokal (*locality development*), serta (3) Memberikan sumbangan pemikiran tentang kemungkinan pengembangan kajian pekerjaan sosial dengan NAPZA. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis, yaitu: (1) Meningkatkan kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (2) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, serta (3) Menyediakan informasi yang dapat menjadi dasar bagi semua pihak yang berkompeten dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Tentang Kontrol Sosial/ Pengendalian Sosial

Menurut Siti Waridah Q. dan J. Sukardi (2003), “Pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh sekelompok orang atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat”. Pengendalian sosial berkaitan erat dengan norma dan nilai sosial. Bagi anggota masyarakat, norma sosial mengandung harapan yang dijadikan sebagai pedoman untuk berperilaku. Namun, masih ada sebagian kecil dari masyarakat yang menyimpang dari norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku. Agar masyarakat berperilaku sesuai dengan pedoman, pengendalian sosial merupakan mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan anggota masyarakat untuk bertindak menurut norma-norma dan nilai-nilai yang telah melembaga.

Sementara itu menurut Sarjoeno Soekanto (2007), yang dimaksud “Pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku”. Pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang. Selain itu, pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak, dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. Sistem mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma. Sistem mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma, dan tidak menurut kemauan individu-individu. Sistem memaksa bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma. Bila ia tidak mau menaati kaidah atau norma, maka ia akan dikenakan sanksi. Pengendalian sosial dimaksudkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial. Penggolongan pengendalian sosial dibuat menurut sudut pandang dari mana seseorang melihat pengawasan tersebut.

2. Tinjauan Tentang Masyarakat

Kata masyarakat berasal dari kata “musyaraka” (bahasa Arab) yang berarti peran serta. Pengertian masyarakat menurut Suharto (2009), “Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal dan berinteraksi yang dibatasi oleh wilayah geografis tertentu seperti desa, kelurahan, kampung atau rukun tetangga”.

Menurut Mayo (1998), masyarakat dapat diartikan dalam 2 konsep: (1) Masyarakat sebagai sebuah wadah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan, serta (2) Masyarakat sebagai

“kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebuah contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat khusus) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

Masyarakat adalah suatu sistem kehidupan bersama yang terdiri dari sekumpulan kelompok manusia yang tinggal dalam suatu batas wilayah tertentu, memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya serta bekerja sama dan berinteraksi diantara anggota-anggota kelompok masyarakat tersebut.

3. Tinjauan Tentang Masalah Penyalahgunaan NAPZA

Secara terminologi banyak istilah yang digunakan, yaitu NAPZA, Narkoba, Narkotika, Obat Terlarang, Zat Adiktif, Psikoaktif, Obat Bius, Madat, *Drug, Medicine*, dan lain-lainnya. Keseluruhannya terdapat kesamaan, yaitu addiction atau sesuatu yang dapat menyebabkan *addict*. *Addiction* merupakan segala sesuatu yang dapat menyebabkan ketagihan, kecanduan, dan dapat merusak sistem kerja pada otak. Sussman dan Ames (2008:3) menyatakan bahwa “*A drug is a substance that can be taken into the human body, and once taken, alters some processes within the body. Drugs can be used in the diagnosis, prevention, or treatment of a disease* (Obat adalah zat yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh manusia, dan setelah dimasukkan, mengubah beberapa proses dalam tubuh. Obat dapat digunakan dalam diagnosis, pencegahan, atau pengobatan penyakit)”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Lebih lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa “Psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat Adiktif merupakan zat bukan Narkotika atau Psikotropika yang berkhasiat adiktif, ketagihan psikis, dan fisik yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.

Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan menggunakan istilah NAPZA. NAPZA merupakan kependekan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Menurut Pasal 113 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, istilah NAPZA hanya terbatas pada istilah Zat Adiktif. Zat Adiktif sebagaimana dimaksud meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.

4. Praktik Pekerjaan Sosial dalam Masalah Penyalahgunaan NAPZA

Hakekat pekerjaan sosial dalam masalah penyalahgunaan NAPZA adalah memberikan pertolongan kepada individu maupun kolektifitas (kelompok atau masyarakat) yang bertujuan untuk membantu mereka agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar sesuai peranannya dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat merupakan hal yang menjadi pusat perhatiannya. Pemberdayaan juga menyangkut strategi nasional dalam upaya penanganan penyalahgunaan NAPZA, serta peredaran gelap NAPZA. International Federation of Social Work (dalam Tan dan Enval, 2000:5) menyatakan bahwa “*The social work profession promotes problem solving in human*

relationships, social change, empowerment and liberation of people, and the enhancement of society. Utilizing theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work (Profesi pekerjaan sosial mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, serta perbaikan masyarakat. Menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik dimana seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerjaan sosial)”.

Pekerjaan sosial makro atau juga disebut dengan *community practice* adalah aplikasi keterampilan praktik untuk merubah pola-pola tingkah laku dari komunitas kelompok, organisasi, serta institusi atau hubungan orang-orang dan interaksinya dengan entitas-entitas ini. Menurut Adi (2008:115-116) terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam ilmu kesejahteraan sosial terkait dengan pembahasan tentang pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat, yaitu: (1) *Community Work*, istilah ini merupakan terminologi untuk praktik pengorganisasian dan pengembangan masyarakat yang banyak digunakan di Inggris dan Australia, seperti yang digunakan oleh Thrope (1985), Mayo (1994), Popple (1995), dan Jones (1997), (2) *Community Organization*, terminologi ini digunakan oleh Rothman, Tropman, dan Erlich sejak tahun 1960-an hingga 1987-an (terminologi yang banyak digunakan di Amerika Serikat), sedangkan dari edisi kelima buku *Community Organization*, Rothman (1995) telah mengubah nama dari intervensi ini menjadi *community intervention* (intervensi komunitas), (3) Di Indonesia, terminologi yang banyak digunakan pada dasawarsa 1970-1990-an adalah pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Istilah intervensi komunitas adalah istilah yang relatif baru dikembangkan sekitar tahun 2000-an

merespons perubahan dari istilah yang digunakan oleh Rothman, serta (4) Di samping itu, Glen (1993) menggunakan istilah yang berbeda, yaitu *community practice* (praktik komunitas) untuk menggambarkan model intervensi yang serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Rothman dalam intervensi komunitas.

C. Metode Penelitian

1. Desain, Waktu, dan Lokasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2014:1) menyatakan bahwa “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan (*action research*). Penelitian tindakan merupakan salah satu varian dari penelitian terapan (*applied research*) dan termasuk dalam penelitian evaluasi (*evaluation research*) yang dimaksudkan untuk mendekatkan atau menghilangkan batasan antara teori dan praktik.

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan 02 November 2015. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah RW 18 Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Lokasi tersebut merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap masalah penyalahgunaan NAPZA. Penelitian berfokus pada peningkatan kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

2. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber, dan cara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Kata dan tindakan dari informan yang dipilih secara acak,

disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan, dan lebih diarahkan kepada *stakeholders* dan masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan model awal dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melakukan peningkatan kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (2) Dokumen tertulis yang terdiri atas buku-buku laporan dan dokumen foto terkait dengan kegiatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, serta (3) Data statistik yang berkaitan dengan kegiatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA yang memerlukan perhitungan angka sebagai data tambahan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2014:62) “Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Sumber data primer merupakan sumber data atau informasi yang diperoleh langsung dari informan atau partisipan yang telah ditetapkan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *stakeholders* dan masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Informan pendukung dalam penelitian ini berasal dari instansi terkait berjumlah 2 orang. Karakteristik yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini, yaitu informan yang berpendidikan minimal SLTA, informan yang telah merasakan program pencegahan penyalahgunaan NAPZA, dan informan yang tidak lagi menyalahgunakan NAPZA. Menurut Sugiyono (2014:62) “Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Sumber data sekunder, yaitu sumber data penunjang yang diperoleh dari berbagai pihak. Contohnya adalah masyarakat, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Karang Taruna, Kader PKK, Kader Posyandu, Kader RBM, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, Pegawai Puskesmas Puter, Pekerja Sosial Masyarakat, LPM Kelurahan, Koordinator BKM Paguyuban Amanah, Aparat Kelurahan Sadang Serang, Lembaga Swadaya Masyarakat,

serta lembaga atau instansi yang terkait. Sumber data sekunder juga dapat berupa catatan, laporan hasil penelitian, buku-buku pedoman, dan literatur lain yang dianggap relevan dengan penelitian.

Pada penelitian ini, teknik yang digunakan dalam menentukan informan adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2014:53-54) “*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti”. Penentuan sampel ini dilakukan setelah peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (*emergent sampling design*). Caranya dengan mempertimbangkan orang yang dapat memberikan data, yaitu orang-orang yang terlibat langsung pada proses pelaksanaan model awal. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari sampel ini peneliti menetapkan sampel lainnya yang akan memberikan data lebih lengkap.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumentasi, FGD (Focus Group Discussion), ToP (*Technology of Participation*), dan PEKA (Penilaian Kapasitas). Menurut Esterberg, 2002 (dalam Sugiyono, 2014:72) “*A meeting of two persons to exchange information and idea through question and meaning about a particular topic* (Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu)”. Wawancara mendalam dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dalam pedoman wawancara mendalam. Pedoman wawancara mendalam berguna sebagai alat kontrol agar pertanyaan yang diajukan sesuai dengan fokus penelitian. Wawancara mendalam dilakukan kepada 1 orang informan utama,

kemudian informan ini menunjuk informan lainnya yang dianggap lebih mengetahui dan memahami tentang masalah penyalahgunaan NAPZA. Peneliti juga ingin memperoleh gambaran tentang hambatan-hambatan yang mereka rasakan selama mengikuti pelaksanaan kegiatan.

Menurut Sugiyono (2014:64) “Dalam Observasi partisipatif, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian”. Lebih lanjut menurut Stainback, 1988 (dalam Sugiyono, 2014:65) “*In participant observation, researcher observes what people do, listen to what they say, and participates in their activities* (Dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengar apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka)”. Observasi Partisipatif, dilakukan pada saat penelitian dengan memanfaatkan informasi dari informan tentang adanya kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan fokus penelitian. Observasi partisipatif merupakan bentuk keterlibatan langsung dengan kegiatan masyarakat yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Melalui observasi partisipatif ini dilakukan pelibatan diri ke dalam lingkungan mereka, sehingga data yang diperoleh lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

Studi Dokumentasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Dokumentasi dapat berupa catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau kegiatan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai sumber data sekunder yang berkaitan dengan aspek penelitian, yaitu dokumentasi dan data tentang berbagai program pencegahan penyalahgunaan NAPZA baik dari pemerintah maupun nonpemerintah.

FGD (*Focus Group Discussion*), teknik pengumpulan data dalam menemukan makna sebuah tema secara terarah. FGD dalam penelitian ini dilakukan dengan melibatkan *stakeholders* dan masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang

Serang. FGD dilakukan dengan cara menggali data dan informasi tentang suatu permasalahan tertentu secara spesifik melalui diskusi kelompok. Tujuannya untuk menggali partisipasi semua partisipan, dimana dalam diskusi mempunyai kesamaan kesempatan untuk mengemukakan tanggapan dan masukan dalam rangka menangani masalah tersebut. Diskusi kelompok dalam hal ini, yaitu pertemuan kelompok yang telah direncanakan maupun tidak direncanakan. Diskusi yang tidak direncanakan sasarannya adalah informan yang tidak terlibat langsung pada pelaksanaan setiap proses model awal dengan memanfaatkan momen tertentu. Hal ini dilakukan pada saat masyarakat berkumpul dan terlibat dalam pembicaraan suatu permasalahan. Diskusi yang telah direncanakan merupakan diskusi yang dilakukan saat pertemuan masyarakat dengan menggunakan teknik FGD. Diskusi ini dirancang dalam pertemuan masyarakat dengan sasarannya adalah partisipan yang terlibat langsung dalam kegiatan awal pada saat penelitian terdahulu.

ToP (*Tecnology of Participation*), teknik yang digunakan dalam menyusun rencana tindak bersama-sama dengan masyarakat secara partisipatif. Suatu metode fasilitasi dalam pembuatan keputusan yang tujuannya untuk mengeksplorasi munculnya inisiatif, sikap kepemimpinan, keputusan, dan tanggungjawab dari seluruh masyarakat. Tahapan dalam menyusun rencana tindak, yaitu nama kegiatan, tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, pembentukan TKM (Tim Kerja Masyarakat), metode dan teknik, strategi dan taktik, prinsip, mekanisme kerja, pengorganisasian, langkah-langkah kegiatan, pelaksana kegiatan, peran peneliti, rincian kegiatan, rencana anggaran biaya, indikator keberhasilan, serta analisis SWOT.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan model teknik analisis interkatif, meliputi: reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

Menurut Madya (2011:76) “Reduksi data merupakan proses menyeleksi, menentukan fokus, menyederhanaan, meringkas, dan mengubah bentuk data mentah yang ada dalam catatan lapangan”. Pada proses reduksi data peneliti akan melakukan penajaman, pemilahan, pemfokusan, penyisihan data yang kurang bermakna, dan menatanya sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan akhir melalui penarikan dan verifikasi.

Menurut Madya (2011:78) “Setelah direduksi data siap dibebaskan. Artinya, tahap analisis sampai pada pemeberan data. Berbagai macam data penelitian tindakan yang telah direduksi perlu dibebaskan dengan tertata rapi dalam bentuk narasi plus matriks, grafik, dan/atau diagram”. *Display* data dilakukan setelah mendapatkan hasil reduksi data. Bentuk *display* data akan ditata rapi dalam bentuk narasi dengan ditambahkan matriks, grafik, atau diagram secara sistematis, interaktif, inventif, dan mantap. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang telah terjadi, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan atau penentuan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

Menurut Madya (2011:78) “Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap mulai dari kesimpulan sementara, yang ditarik pada akhir Siklus I, ke kesimpulan terevisi pada akhir Siklus II, dan seterusnya, dan kesimpulan terakhir pada akhir Siklus terakhir”. Penarikan Kesimpulan dilakukan setelah *display* data. Tahapan penarikan kesimpulan dimulai dari penarikan kesimpulan pada saat asesmen awal, kesimpulan yang terevisi, dan kesimpulan akhir implementasi kegiatan. Kesimpulan asesmen awal akan dijadikan sebagai pijakan untuk melangkah kepada pelaksanaan kegiatan. Kesimpulan yang dibuat mencakup semua perubahan/peningkatan yang direncanakan/diharapkan dan yang tidak diharapkan.

5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data atau kevalidan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas, uji *transferability*/

validitas eksternal, dan uji *dependability/reliabilitas*.

Menurut Stainback, 1988 (dalam Sugiyono, 2014:123) “*Rapport is a relationship of mutual trust and emotional affinity between two or more people* (Kesesuaian adalah hubungan saling percaya dan persamaan emosional antara dua orang atau lebih)”. Perpanjangan pengamatan akan peneliti lakukan dengan kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan wawancara mendalam dan pengamatan terhadap informan pada saat penelitian terdahulu maupun penelitian. Perpanjangan pengamatan akan memudahkan peneliti selama proses penelitian. Menurut Sugiyono (2014:124) “Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan”. Peneliti akan meningkatkan ketekunan dengan melakukan kembali pengamatan secara lebih cermat, tepat, dan berkesinambungan kepada *stakeholders* dan masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang, serta pihak lain yang dilibatkan dalam penelitian. Menurut Wiersma, 1986 (dalam Sugiyono, 2014:125-128) “*Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures* (Triangulasi adalah lintasan kualitatif-validasi. Itu menilai kecukupan data sesuai dengan konvergensi berbagai sumber data atau prosedur beberapa pengumpulan data)”. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data. Tujuannya untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi terbagi menjadi tiga, yaitu sumber, teknik, dan waktu. Jenis triangulasi yang akan digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber. Teknik triangulasi akan dicapai melalui perbandingan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara mendalam, membandingkan apa yang dikatakan *stakeholders* dan masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan *stakeholders* dan masyarakat

RW 18 Kelurahan Sadang Serang tentang situasi penelitian dengan apa dikatakannya sepanjang waktu, dan membandingkan hasil wawancara mendalam dan FGD dengan hasil observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Peneliti menggunakan alat pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan melalui wawancara mendalam, foto, rekaman, dan video.

Menurut Sugiyono (2014:130) “Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil”. Peneliti akan berupaya memberikan gambaran utuh tentang laporan peningkatan kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang secara jelas, terperinci, sistematis, dan dipercaya. Tujuannya agar pembaca dapat dengan mudah menangkap apa yang dituliskan oleh peneliti dan kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian ini di tempat lain dengan karakteristik yang sama.

Menurut Sugiyono (2014:131) “Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut”. Uji reliabilitas dilakukan oleh auditor independen. Auditor independen dalam penelitian ini adalah dosen pembimbing penelitian. Tujuannya untuk mengaudit keseluruhan aktivitas penelitian dengan menunjukkan masalah, sumber data, keabsahan data, dan kesimpulan dari hasil penelitian yang jelas.

6. Tahapan Penelitian

Penelitian diawali dengan kegiatan pra lapangan untuk pengumpulan data sebagai kelengkapan data dalam penyusunan proposal penelitian. Hasil pembuatan proposal dilanjutkan dengan seminar proposal penelitian sehingga mendapat tanggapan dan masukan guna pelaksanaan penelitian, sekaligus pengajuan instrumen penelitian. Setelah melakukan revisi terhadap kelayakan proposal penelitian dan instrumen penelitian, tahapan selanjutnya adalah pengurusan ijin penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan tahapan persiapan sosial, refleksi awal, pengumpulan, pemeriksaan dan analisis data,

perencanaan model, implemetasi model, serta refleksi akhir. Akhir dari tahapan penelitian adalah penyusunan dan bimbingan Karya Ilmiah Kompetensi Akhir (KIKA), yang dilanjutkan dengan ujian lisan Karya Ilmiah Kompetensi Akhir (KIKA).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Karakteristik Informan

Penelitian tentang peningkatan kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang dilakukan peneliti bersama dengan beberapa informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada kriteria yang menjadi *stakeholders* dan masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang.

Jumlah informan penelitian sebanyak 8 orang, yaitu 6 orang untuk analisis masalah, kebutuhan dan potensi, serta 3 orang untuk perencanaan model intervensi. Informan analisis masalah, kebutuhan dan potensi, korban penyalahgunaan NAPZA, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua RW, serta Sekretaris Lurah Sadang Serang. Informan untuk perencanaan model intervensi, meliputi BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Bandung, BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Jawa Barat, dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Besar Bandung. Informan berusia antara 18 sampai dengan 60 tahun dengan jenis pekerjaan yang beragam, yaitu pelajar, karyawan swasta, wiraswasta, Ketua RW, Pensiunan, PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan Aparat Kepolisian. Tingkat pendidikan yang dimiliki informan berbeda, pendidikan terendah lulusan SMP dan pendidikan tertinggi lulusan S2. Hal ini menandakan bahwa tingkat pendidikan pengurus dan anggota cukup baik untuk dikembangkan dalam mengelola organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA".

2. Gambaran Kontrol Sosial Masyarakat

Setelah proses persiapan sosial dilakukan,

peneliti kemudian memulai kegiatan asesmen. Asesmen merupakan kegiatan untuk memperoleh profil lengkap tentang situasi dan kondisi lapangan (*agency based maupun community based research*), serta mengungkap masalah, kebutuhan, serta potensi dan sumber secara umum. Asesmen dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Asesmen bertujuan untuk menggali, menganalisis, dan mengungkapkan isu-isu permasalahan, kebutuhan, serta potensi dan sumber yang melekat di dalam masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Asesmen dilakukan secara partisipatif dan non-partisipatif dengan harapan dapat memperoleh data, informasi, dan masukan secara langsung dari masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Data, informasi, dan masukan akan sangat bermanfaat bagi peneliti untuk menentukan tahapan selanjutnya. Dalam melakukan asesmen, peneliti tentunya tidak melakukannya secara langsung. Hal ini untuk menghindari ketidaktepatan dan efisiensi dalam melakukannya.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, peneliti menemukan beberapa masalah penyalahgunaan NAPZA, yaitu: merokok, mengkonsumsi minuman alkohol, dan menggunakan NAPZA jenis lainnya. Merokok biasanya dilakukan oleh para anak-anak atau remaja, sedangkan mengkonsumsi minuman alkohol paling banyak dilakukan oleh orang dewasa. Lokasi rentan yang menjadi tempat melakukan penyalahgunaan NAPZA biasanya terjadi pada tempat-tempat yang terbuka, yaitu: lapangan badminton, pos hansip, warung, maupun rumah masyarakat. Lokasi tersebut berada di wilayah RT 01, RT 03, RT 04, RT 05, dan RT 06.

Faktor penyebab masyarakat menyalahgunakan NAPZA terutama karena faktor lingkungan. Pengaruh lingkungan yang dimaksud, yaitu: masyarakat sering nongkrong, adanya kegiatan perjudian, dan pengaruh masyarakat luar wilayah RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Mudahnya mendapatkan rokok dan minuman alkohol juga merupakan faktor penyebab lainnya

dari masalah penyalahgunaan NAPZA. Selain mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, masalah penyalahgunaan NAPZA juga dapat berpengaruh pada lingkungan. Hal ini dikarenakan dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman hidup masyarakat. Masalah penyalahgunaan NAPZA juga dapat menimbulkan permasalahan baru, yaitu munculnya masalah kriminalitas dan kebobrokan mental dari generasi muda. Akan tetapi, rasa kepedulian dan kontrol masyarakat sangatlah kurang. Hal ini ditandai dengan jarangnyanya masyarakat menegur penyalahguna NAPZA dan seolah-olah membiarkan penyalahguna untuk merokok, mengkonsumsi minuman alkohol, dan menggunakan NAPZA jenis lainnya.

Masalah penyalahgunaan NAPZA di RT 01, RT 03, RT 04, RT 05, dan RT 06 (paku putih). Masalah penyalahgunaan NAPZA di RT 01 adalah merokok dan mengkonsumsi minuman alkohol yang mereka lakukan di pos hansip yang mereka gunakan untuk nongkrong sambil. Masalah penyalahgunaan NAPZA di RT 03 adalah merokok, mengkonsumsi minuman alkohol, bahkan berjudi di rumah salah satu masyarakat. Masalah penyalahgunaan NAPZA di RT 04 adalah merokok dan mengkonsumsi minuman alkohol di sebuah warung yang buka hingga larut malam. Salah satu masyarakat RT 04 yang terlibat kasus penyalahgunaan NAPZA, yaitu adik dari Bapak RW yang ditangkap karena kasus ganja. Masalah penyalahgunaan NAPZA di RT 05 adalah merokok, mengkonsumsi minuman alkohol, bahkan berjudi di rumah salah satu masyarakat. Beberapa kasus masalah penyalahgunaan NAPZA yang terjadi di RT 05 lainnya, yaitu: masyarakat RT 05 yang juga ditangkap karena kasus shabu-shabu, masyarakat RT 05 yang masih menggunakan obat-obatan terlarang, dan adanya 1 orang mantan narapidana kasus penyalahgunaan NAPZA. Masalah penyalahgunaan NAPZA di RT 06 adalah merokok dan mengkonsumsi minuman alkohol yang mereka lakukan di lapangan badminton. Lapangan ini sering digunakan untuk memperingati acara besar RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Akan tetapi, setelah acara tersebut

berakhir, masyarakat mulai menyalahgunakan NAPZA.

Hasil identifikasi terhadap kontrol sosial masyarakat melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan studi dokumentasi kemudian disandingkan dan diuji dengan data-data yang diperoleh melalui FGD (*Focus Group Discussion*). Melalui FGD banyak partisipan menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana kondisi, dan situasi kontrol sosial masyarakat. Terdapat beberapa permasalahan NAPZA yang terjadi di RW 18 Kelurahan Sadang Serang, diantaranya: (1) Merokok, (2) Minuman alkohol, (3) Penggunaan NAPZA jenis lainnya, (4) Kurangnya keimanan dan kesadaran seseorang terhadap masalah penyalahgunaan NAPZA, (5) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap masalah penyalahgunaan NAPZA, serta (6) Kurangnya kontrol sosial masyarakat terhadap masalah penyalahgunaan NAPZA.

Informan mengemukakan beberapa faktor penyebab dan Akibat masyarakat menggunakan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang dengan menggunakan metode FGD (*Focus Group Discussion*). Faktor penyebab dari masalah penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang menurut masyarakat, yaitu: (1) Pengaruh dari luar masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang yang sering ikut nongkrong, (2) Sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA belum pernah dilakuka, (3) Masyarakat kurang memahami dan mengetahui terhadap masalah penyalahgunaan NAPZA, (4) Keluarga (orang tua) kurang mengawasi remaja yang sering merokok dan mengkonsumsi minuman alkohol, serta (5) Tokoh masyarakat kurang memperhatikan upaya pencegahan terhadap masalah penyalahgunaan NAPZA kepada warganya. Prioritas penyebab masalah penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang adalah kurangnya perhatian tokoh masyarakat untuk mencegah masalah penyalahgunaan NAPZA kepada warganya.

Akibat dari masalah penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang

menurut masyarakat, yaitu: (1) Menimbulkan masalah kriminal dan perilaku negatif lainnya, (2) Menimbulkan kebobrokan mental dari generasi muda, (3) Mengganggu kenyamanan dan ketentraman hidup masyarakat, (4) Masyarakat yang menjadi pelaku menjadi tidak memiliki kemampuan memecahkan masalah hidupnya, karena NAPZA dijadikan salah satu solusi untuk memecahkan masalahnya, serta (5) Meningkatkan jumlah penyalahguna NAPZA. Akibat utama dari masalah penyalahgunaan NAPZA berdasarkan hasil partisipasi masyarakat adalah meningkatnya jumlah penyalahguna NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang.

Upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA yang ada RW 18 Kelurahan Sadang Serang tidak terlepas dari potensi dan sumber yang tersedia di wilayah tersebut. Diperoleh gambaran berkaitan dengan potensi dan sumber yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah penyalahgunaan NAPZA, yaitu: (1) Sumber formal yaitu sistem sumber yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu: Dinas Sosial Kota Bandung, Badan Narkotika Kota Bandung, Kantor Kecamatan Coblong, Polisi Sektor Kecamatan Coblong, TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) Kecamatan Coblong, PSM (Pendamping Sosial Masyarakat) Kelurahan Sadang Serang, Kantor Kelurahan Sadang Serang, LPM Kelurahan Sadang Serang, BKM Paguyuban Amanah Kelurahan Sadang Serang, dan IPWL (Institusi Penerima Wajib Laport), (2) Sistem sumber informal bersifat alamiah yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, yaitu: berupa dukungan emosional, kasih sayang, perhatian keluarga, serta kearifan lokal yang masih melekat pada masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang, yaitu: Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, Kader PKK, dan Kader Posyandu, Brigadir RW, serta nilai kebersamaan dan gotong royong, (3) Sistem sumber kelembagaan, yaitu kelembagaan lokal yang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan sebagai media dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW

18 Kelurahan Sadang Serang, yaitu: PKK, Posyandu, DKM, dan Karang Taruna. Sumber-sumber tersebut dapat dimanfaatkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, serta (4) Sistem sumber daya manusia, yaitu adanya stakeholders yang memiliki kepedulian terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Hal ini bisa terlihat dari setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh peneliti, masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang sangat antusias dan ikut terlibat serta hadir dalam setiap pertemuan.

3. Gambaran Perencanaan Model Peningkatan Kontrol Sosial Masyarakat

Penyusunan perencanaan model intervensi adalah salah satu tahapan kegiatan yang perlu dilakukan dalam penelitian. Perencanaan model intervensi merupakan aktivitas mutlak yang harus dilakukan, dikarenakan tidak terpisahkan dalam suatu sistem pelayanan sosial. Melalui perencanaan model intervensi dapat tersusun jenis, tujuan, dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang.

Model atau teknik yang peneliti gunakan dalam menyusun perencanaan model intervensi adalah ToP (*Technology of Participation*). ToP adalah teknik yang digunakan dalam menyusun rencana tindak bersama-sama dengan masyarakat secara partisipatif. Suatu metode fasilitasi dalam pembuatan keputusan yang tujuannya untuk mengeksplorasi munculnya inisiatif-inisiatif, sikap kepemimpinan, keputusan, dan tanggung jawab dari seluruh masyarakat. Semua pihak yang terlibat dalam pertemuan memiliki kesempatan sama untuk menyampaikan gagasan dan menolong setiap orang. Posisi peneliti dalam perencanaan model intervensi hanya sebagai pendamping atau fasilitator dalam mempersiapkan dan menyusun perencanaan. Tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan model intervensi yang bersifat partisipatif, yaitu: (1) Perencanaan partisipatif dapat membuka peluang kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk

berpartisipasi, agar masyarakat dapat memahami, merasa memiliki, dan bertanggung jawab dalam menyukseskan kegiatan, (2) Memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan ide-ide dan inisiatifnya dalam upaya mengadakan perubahan bersama secara lebih terarah dan terorganisir, serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, (3) Menciptakan kerangka kerja secara bersama dan dilaksanakan oleh semua masyarakat, sehingga masyarakat sebagai obyek dan subyek pembangunan dapat tercapai, serta (4) Hasil perencanaan bersifat kontekstual, aktual, serta spesifik, sehingga benar-benar dapat menggambarkan permasalahan dan kebutuhan. Masyarakat akan memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menangani persoalannya (*self help*).

Aktivitas awal yang dilakukan pada tahap ini adalah peneliti terlebih dahulu melakukan koordinasi atau diskusi. Disepakati dalam diskusi tersebut agar peneliti terlebih dahulu mensosialisasikan hasil analisis masalah, kebutuhan, dan potensi sebagai informasi awal sebelum melakukan pertemuan untuk menyusun perencanaan model intervensi. Tujuannya agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang berbagai masalah, kebutuhan, serta potensi yang tersedia. Selain itu juga, untuk menyampaikan rencana pembentukan TKM yang akan bekerja untuk memfasilitasi upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang.

Pembentukan TKM dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan sosialisasi hasil analisis masalah, kebutuhan, dan potensi. Proses pembentukan TKM ini memberikan kekuatan dan perasaan optimis bagi peneliti. Hal ini dikarenakan, semangat TKM menunjukkan adanya kemauan yang kuat untuk belajar dan berbuat sesuatu bagi komunitasnya, terutama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang.

Untuk persiapan dalam menyusun perencanaan model intervensi, maka terlebih dahulu peneliti bersama dengan TKM melakukan konsultasi. Pelaksanaan konsultasi melibatkan

pihak yang berkompeten, meliputi BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Bandung dan BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Bandung. Tujuannya untuk mengetahui pandangan mereka tentang upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang yang akan direncanakan dan dilaksanakan bersama-sama dengan TKM. Selain itu juga, peneliti bersama dengan kepengurusan TKM melakukan identifikasi terhadap kemampuan finansial dan sumber daya manusia, serta kesediaan keluarga dan masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi implementasi model intervensi.

Peneliti terlebih dahulu menawarkan kepada partisipan pertemuan untuk membuat rencana pemecahan masalah yang didasarkan pada kekuatan yang mereka miliki. Kekuatan yang dimaksud adalah nilai-nilai kepedulian, kegotong royongan, kesetiakawanan, dan pola hubungan kekerabatan yang sudah ada. Pelaksana kegiatan dalam implementasi model intervensi adalah TKM, masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang, dan instansi terkait. Kelompok sasarnya adalah *stakeholders* dan masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang.

Secara umum tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai, yaitu: (1) Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang masalah penyalahgunaan NAPZA, (2) Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (3) Untuk meningkatkan pengawasan/peran dari keluarga (orang tua) terhadap kenakalan remaja, serta (4) Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi tentang masalah penyalahgunaan NAPZA

4. Gambaran Implementasi Model Peningkatan Kontrol Sosial Masyarakat

Implementasi model intervensi merupakan tahapan paling penting dalam pengembangan masyarakat. Hal ini dilakukan peneliti bersama

dengan kelompok sasaran sebagai penerima langsung manfaat (*direct beneficiaries*) maupun sistem pendukung (*support system*). Tujuannya untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan pada rencana yang telah disusun secara bersama dan disepakati. Tahapan ini berisi tindakan aktualisasi bersinergi peneliti bersama dengan masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang.

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi dilakukan bersama masyarakat RW 18 dan perwakilan 21 RW Kelurahan Sadang Serang pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2015, pukul 09.30 WIB s/d selesai bertempat di Masjid Subulussalam RW 18 Kelurahan Sadang dengan jumlah peserta 50 orang (daftar hadir terlampir). Pemberian Penyuluhan dan Sosialisasi tentang masalah penyalahgunaan NAPZA dikemas dalam dialog interaktif. Kegiatan diawali dengan pemberian materi yang disampaikan oleh pemateri/narasumber, yaitu: Kompol. Ansari Fuad, S.H. (BNN Kota Bandung) berkaitan dengan "Pencegahan dan Rehabilitasi bagi Korban Penyalahguna Narkoba" dan Aiptu Cory (Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung) berkaitan dengan "Pengenalan dan Bahaya Narkoba Dilihat dari Aspek Hukum, serta Mekanisme Penanganan Kasus Pemakai/Pengguna Narkoba". Pada saat paparan Penyuluhan dan Sosialisasi berlangsung, masyarakat menyimak dengan penuh keseriusan apa yang disampaikan oleh pemateri/narasumber. Bahkan, beberapa masyarakat antusias dalam mengajukan pertanyaan. Secara operasional yang mendukung hasil dari pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi ditandai oleh beberapa hal, yaitu: beberapa masyarakat secara berulang-ulang menyampaikan kesiapannya untuk menghadiri kegiatan, banyaknya jumlah masyarakat yang hadir dalam mengikuti kegiatan, masyarakat serius dalam menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber/pemateri, dan masyarakat antusias mengajukan pertanyaan saat kegiatan berlangsung. Selain itu juga, dengan adanya kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi dapat merubah pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang sebelumnya bersikap permisif

berubah menjadi negatif, serta bagi para pelaku yang menyalahgunakan NAPZA muncul rasa malu dikarenakan masyarakat sekitar mulai menolak keberadaan mereka.

Pelaksanaan kegiatan Kampanye Sosial dilakukan bersama TKM dan masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang yang didampingi oleh peneliti pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2015, pukul 14.00 WIB s/d selesai bertempat di Masjid Subulussalam, Lapangan Badminton, Gapura RW 18, dan Rumah masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang dengan jumlah peserta 15 orang (daftar hadir terlampir). Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang masalah penyalahgunaan NAPZA, serta untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang masalah penyalahgunaan NAPZA melalui pemasangan Spanduk dan X-Banner, serta penyebaran Leaflet, Stiker, Buku Saku, dan CD Video. Melakukan kegiatan Kampanye Sosial tentang masalah penyalahgunaan NAPZA adalah wujud dari kepedulian masyarakat terhadap pencegahan masalah penyalahgunaan NAPZA. Pada saat pelaksanaan Kampanye Sosial berlangsung, beberapa masyarakat ikut membantu pemasangan Spanduk dan X-Banner, serta penyebaran Leaflet, Stiker, Buku Saku, dan CD Video. Pelaksanaan Kampanye Sosial ditentukan pada tempat yang strategis untuk pemasangan dan penyebarannya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam melihat dan mengaksesnya. Secara operasional yang mendukung hasil dari pelaksanaan kegiatan Kampanye Sosial ditandai oleh beberapa hal, yaitu: beberapa masyarakat yang tidak tergabung ke dalam TKM (Tim Kerja Masyarakat) ikut membantu pemasangan Spanduk dan X-Banner, anak-anak dan remaja yang sedang bermain futsal di lapangan badminton ikut membantu pemasangan Spanduk dan X-Banner, masyarakat yang melintas di sepanjang jalan RW 18 ikut menyaksikan pemasangan dan penyebaran Spanduk, X-Banner, Leaflet, Stiker, Buku Saku, dan CD Video, serta masyarakat menyambut baik dan mendukung adanya pemasangan dan penyebaran Leaflet, Stiker, Buku Saku, dan

CD Video di rumah-rumah. Selain itu juga, tidak ada tampak lelah yang terlihat pada wajah TKM (Tim Kerja Masyarakat) dan masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang saat kegiatan berlangsung. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang berorasi tentang penolakan terhadap penyalahgunaan NAPZA.

Pelaksanaan kegiatan Pembentukan Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA” dilakukan bersama TKM dan masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang yang didampingi oleh peneliti mulai hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015 s/d hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 bertempat di rumah Ibu Kader PKK RW 18 Kelurahan Sadang Serang dengan jumlah peserta 17 orang (daftar hadir terlampir). Pembentukan Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA” pada pertemuan pertama hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015 membahas tentang Nama, Tujuan, Semboyan, Latar Belakang, dan Dasar Hukum. Pembentukan Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA” pada pertemuan kedua hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015 membahas tentang Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran. Pembentukan Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA” pada pertemuan ketiga hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 membahas tentang Kebijakan dan Program, yaitu: Jangka Pendek (Mading NAPZA dan Opini Tempel), Jangka Menengah (Pembuatan Kaos NAPZA, Aksi Pembubuhan Tangan, dan Kunjungan ke Panti Rehabilitasi/IPWL), serta Jangka Panjang (Penyuluhan/Sosialisasi dan Terapi NAPZA). Pada saat proses Pembentukan Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA”, TKM dan masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. Hal ini dikarenakan mereka merupakan bagian dalam Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA”. Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA” didalamnya terdapat struktur kepengurusan, tupoksi pengurus dan anggota, serta rancangan program jangka pendek, menengah, dan panjang. Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA” yang dibentuk inilah nantinya dijadikan sebuah rencana tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Secara operasional

yang mendukung hasil dari pelaksanaan kegiatan Pembentukan Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA” ditandai oleh beberapa hal, yaitu: masyarakat yang tergabung dalam TKM (Tim Kerja Masyarakat) sangat antusias mengikuti kegiatan dikarenakan terlibat dalam keanggotaan Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA”, masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan terhadap Pembentukan Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA”, serta banyaknya program yang dirancang untuk kepengurusan Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA” 1 tahun ke depan.

Pada tahap implementasi model intervensi, peneliti merasa terbantu dengan adanya dukungan, kerjasama, dan partisipasi yang berasal dari pelaksana kegiatan. Terdapat banyak partisipasi aktif masyarakat yang disatukan dalam TKM, sehingga bisa mempermudah implementasi model intervensi yang sudah direncanakan sebelumnya. Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi model intervensi, maupun kekuatan dan peluang yang dapat dijadikan solusi, yaitu: (1) Hambatan dalam implementasi model intervensi yang dirasakan, yaitu penentuan waktu pelaksanaan dan sering terlambatnya kelompok sasaran ketika akan menghadiri implementasi model intervensi. Waktu yang cukup sulit ditentukan adalah pada saat pelaksanaan kegiatan. Hal ini dikarenakan, pekerjaan dan kesibukan pelaksana kegiatan itu sendiri, (2) Tantangan, fenomena masalah penyalahgunaan NAPZA yang terjadi tidak bisa ditangani hanya dengan satu pendekatan saja, tetapi memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Hal ini dikarenakan, permasalahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatar belakangnya. Hal ini menjadi tantangan bagi peneliti untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang dimilikinya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (3) Kekuatan, implementasi model intervensi dapat berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya ketersediaan tempat, waktu, sumber daya manusia, sumber pendanaan, peralatan dan perlengkapan, serta anggaran biaya pada saat berlangsungnya

implementasi model intervensi. Selain itu juga, kekuatan yang menjadi motor penggerak adalah tekad dan semangat pelaksana kegiatan untuk mengimplementasikan model intervensi, serta (4) Peluang dalam implementasi model intervensi, yaitu adanya kesempatan peneliti untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah di Program Pendidikan Pascasarjana Spesialis-1 Pekerjaan Sosial STKS (Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial) Bandung. Selain itu juga, dukungan dan apresiasi dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Bandung, BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Bandung, Kecamatan Coblong, dan Kelurahan Sadang Serang merupakan peluang yang harus dimaksimalkan pelaksana kegiatan untuk mengimplementasikan model intervensi yang telah rencanakan.

5. Gambaran Model Akhir Peningkatan Kontrol Sosial Masyarakat

Evaluasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui proses dan hasil yang dicapai. Evaluasi dilakukan pada saat implementasi model intervensi telah selesai dilaksanakan. Evaluasi dilakukan peneliti bersama dengan *stakeholders* dan masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Penilaian dilakukan dengan memberi skor 1 sampai dengan 5 terhadap setiap pertanyaan yang diberikan. Skor 1 diberikan partisipan apabila kegiatan yang dilakukan sangat tidak bermanfaat atau sangat tidak berhasil. Berturut-turut, skor 2 sampai dengan 5 diberikan partisipan apabila kegiatan yang dilakukan tidak berhasil, cukup berhasil, berhasil, dan sangat berhasil. Hasil evaluasi dengan kedua cara tersebut kemudian dijumlahkan, lalu dibagi 2 untuk mendapatkan nilai rata-rata.

Evaluasi proses dilakukan untuk menilai aspek-aspek pada semua tahap kegiatan, mulai dari persiapan sosial sampai dengan implementasi model intervensi. Partisipan tidak mengalami kesulitan dalam memberikan penilaian, dikarenakan evaluasi proses ini sudah pernah dilakukan pada saat penelitian terdahulu. Eva-

luasi hasil dilakukan untuk menilai hasil akhir seluruh kegiatan. Aspek yang dinilai, yaitu ketepatan waktu, ketepatan sasaran, kesesuaian jumlah sasaran, kesesuaian kualitas, perubahan yang terjadi, kesesuaian lokasi, penerimaan masyarakat terhadap program, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Model akhir yang telah disempurnakan efektif dan cenderung lebih baik untuk mengatasi masalah mendasar yang menyebabkan lemahnya kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Terbukti hasil implementasi model intervensi dapat meningkatkan kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Tujuan lain yang dicapai, yaitu: (1) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang masalah penyalahgunaan NAPZA, (2) Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (3) Meningkatnya pengawasan/peran dari keluarga (orang tua) terhadap kenakalan remaja, serta (4) Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi tentang masalah penyalahgunaan NAPZA.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Penelitian tentang peningkatan kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang merupakan jenis penelitian tindakan (*action research*). Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah identifikasi kontrol sosial masyarakat, perencanaan model, implementasi model, dan model akhir. Setiap tahapan melibatkan *stakeholders*, masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang, serta instansi terkait.

Berdasarkan hasil asesmen ditemukan beberapa masalah terkait kontrol sosial masyarakat, yaitu: (1) Masyarakat kurang memahami dan mengetahui tentang masalah penyalahgunaan NAPZA, (2) Sosialisasi tentang bahaya

penyalahgunaan NAPZA belum pernah dilakukan, (3) Masyarakat kurang peduli terhadap masalah penyalahgunaan NAPZA, (4) Masyarakat membiarkan apabila adaarganya yang mengkonsumsi minuman alkohol, (5) Tidak berfungsinya stakeholders dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (6) Masyarakat tidak mengetahui adanya pelayanan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan NAPZA, (7) Banyak masyarakat yang nongkrong sambil berjudi pada malam hari, serta (8) Keluarga (orang tua) kurang mengawasi terhadap kenakalan remaja.

Hasil asesmen akan dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan model intervensi. Untuk persiapan dalam menyusun perencanaan model intervensi, maka terlebih dahulu peneliti bersama dengan TKM melakukan konsultasi. Pelaksanaan konsultasi melibatkan pihak yang berkompeten, meliputi BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Bandung, BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Jawa Barat, dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Besar Bandung. Tujuannya untuk mengetahui pandangan mereka tentang upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang yang akan direncanakan dan dilaksanakan bersama-sama dengan TKM. Adapun rincian kegiatan dari hasil penyusunan perencanaan model intervensi, yaitu Penyuluhan dan Sosialisasi, Kampanye Sosial, dan Pembentukan Organisasi Lokal "Pemuda Anti NAPZA". Semua kegiatan akan dilaksanakan secara terorganisir dalam rangkaian proses yang telah direncanakan.

Kegiatan dalam implementasi model intervensi mampu meningkatkan kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Hasil lain yang dicapai dalam implementasi model intervensi, yaitu: (1) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang masalah penyalahgunaan NAPZA, (2) Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (3) Meningkatnya pengawasan/peran dari keluarga (orang tua) terhadap kenakalan remaja, serta (4) Meningkatnya akses masyarakat terhadap

informasi tentang masalah penyalahgunaan NAPZA.

Model akhir yang telah disempurnakan efektif dan cenderung lebih baik untuk mengatasi masalah mendasar yang menyebabkan lemahnya kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Terbukti hasil implementasi model intervensi dapat meningkatkan kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang.

2. Rekomendasi

Berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian ini, ada beberapa kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat dan ada juga kegiatan yang masih harus dikembangkan untuk lebih meningkatkan pencapaian yang sudah diperoleh. Untuk itu, ada hal-hal yang dirasa perlu direkomendasikan sebagai bahan pertimbangan kepada pihak-pihak terkait, yaitu: (1) Bagi Pemerintahan Daerah: (a) Agar pemerintah lebih aktif dalam menerapkan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan masalah penyalahgunaan NAPZA, pemerintah mampu bekerja sama dan menjadi mitra kerja bersama masyarakat, (b) Agar pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dilakukan kembali oleh pemerintah minimal 2 bulan sekali dalam upaya keberlanjutan program intervensi, serta (c) Pemerintah harus memberdayakan masyarakat secara mandiri dengan pemberian informasi dan penyadaran tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA, (2) Bagi Kelurahan Sadang Serang: (a) Aparat Kelurahan dan Brigadir RW 18 Kelurahan Sadang Serang agar terus memberikan pembinaan kepada Organisasi Lokal "Pemuda Anti NAPZA", sehingga ada keberlanjutan terhadap program intervensi, (b) Melalui media pertemuan yang ada di Kelurahan, dapat dilakukan sosialisasi tentang pentingnya peningkatan kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, serta (c) Program yang diluncurkan melalui Kelurahan tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan saja, tetapi juga untuk kegiatan di bidang sosial kemasyarakatan terutama untuk

masalah penyalahgunaan NAPZA, serta (3) Bagi Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA”: (a) Terus melanjutkan program intervensi terkait pencegahan dan penanganan penyalahgunaan NAPZA yang telah disusun bersama peneliti, (b) Mengadakan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan program kerja Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA”, (c) Melakukan mobilisasi pengurus dan anggota Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA” dengan tujuan agar lebih aktif dan kreatif memunculkan kegiatan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan NAPZA.

Daftar Pustaka

- Edi Suharto. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- Isbandi Rukminto Adi. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Johnson, Jerry L. 2004. *Fundamentals of Substance Abuse Practice*. Canada: Thomson Learning, Inc.
- Sloboda, Zili & Bukoski, William J. 2006. *Handbook of Drug Abuse Prevention*. New York: Springer Science Business Media.
- Siti Waridah Q. dan J. Sukardi. (2003). *Sosiologi 1*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Pengendalian Sosial dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sussman, Steve & Ames, Susan L. 2008. *Drug Abuses Concept, Prevention, and Cessation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Suwarsih Madya. 2011. *Penelitian Tindakan. Action Research*. Bandung: Alfabeta.
- Tan, Ngoh-Tiong & Envall, Elis. 2000. *Social Work: Challenges in the New Millenium*. Switzerland: IFSW Press.

**PENGELOLAAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (EBT) DI DAERAH PASCA
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(PERPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)**

Oleh:

Sigit Nugroho, SH., MH.

Dosen FH UBB

Email: snugroho571@gmail.com

Abstract

The Traditional Culture Expression reflects cultural identity. It also shows district's culture character and style. The local's historical value, character and identity are implemented so Indonesia is rich of culture. The Traditional Culture Expression is as one of the intellectual property or treasure which is public charactereristic has economic rights for its society. The Traditional Culture Expression must be utilized and developed efficiently and effectively by its society as its users and owners unless it will reduce the economic rights of the society as its owner . The Traditional Culture Expression needs to protect to avoid the abuse and legal action. Therefore it is necessary to provide an adequate regultion and management for the Traditional Culture Expression. The management of Traditional Culture Expression done by government must pay attention on good governance principles and ccooperate with stakeholders and the Intellectual Property Center in distric area or province. The management of Traditional Culture Expression is applied by inventoring and protecting it based on the valid regulation to register it at authorized government agency.

Keyword: *Management, Traditional Culture Expression, the district area*

Abstrak

Ekspresi budaya tradisional menunjukkan identitas kultural. Ekspresi budaya tradisional menampilkan watak dan corak kebudayaan daerah. Historisitas daerah itu dimanifestasikan dan dengan demikian sekaligus juga karakter atau identitas, sehingga bangsa Indonesia kaya akan budaya. Ekspresi budaya tradisional yang merupakan salah satu kekayaan intelektual yang bersifat komunal memiliki hak ekonomi. Ekspresi budaya tradisional bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat merugikan atau mengurangi hak ekonomi masyarakat pengembannya. Selain itu bila tidak dilindungi maka akan dapat disalahgunakan dan juga berpotensi terjadi sengketa. Untuk itu perlu adanya peraturan perundang-undangan yang memadai dan perlunya pengelolaan yang baik terhadap ekspresi budaya tradisional. Pengelolaan ekspresi budaya tradisional yang dilakukan pemerintah harus memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik dan harus bekerjasama dengan stakeholder dan Sentra Kekayaan Intelektual yang ada di daerah. Pengelolaan ekspresi budaya tradisional dilakukan dengan menginventarisasi dan melindunginya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yakni dengan mendaftarkannya di instansi pemerintah yang berwenang.

Kata kunci: pengelolaan, ekspresi budaya tradisional, daerah

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Terdapat lebih dari 300 [kelompok etnik](#) atau suku bangsa di [Indonesia](#). atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010.¹ [Suku Jawa](#) adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Orang Jawa kebanyakan berkumpul di [pulau Jawa](#), akan tetapi jutaan jiwa telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara² bahkan bermigrasi ke luar negeri seperti ke [Malaysia](#) dan [Suriname](#). [Suku Sunda](#), [Suku Batak](#), dan [Suku Madura](#) adalah kelompok terbesar berikutnya di negara ini. Banyak suku-suku terpencil, terutama di [Kalimantan](#) dan [Papua](#), memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang. Sebagian besar bahasa daerah masuk dalam golongan rumpun [bahasa Austronesia](#), meskipun demikian sejumlah besar suku di Papua tergolong dalam rumpun bahasa Papua atau Melanesia.³

Banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia membuktikan pula banyaknya budaya yang dimilikinya. Budaya yang dimiliki oleh masyarakat baik benda maupun tak benda merupakan karya cipta masyarakat bangsa Indonesia yang perlu adanya perlindungan. Perlindungan dalam hal ini mencakup pengembangan, pemanfaatan, pelestarian, penjagaan dan pemeliharaan yang harus ada campur tangan dari pemerintah dan masyarakat secara sinergis. Segala bentuk ekspresi, baik material (benda) maupun immaterial (tak benda), atau kombinasi keduanya yang dihasilkan oleh masyarakat di Indonesia harus dilindungi dengan pengelolaan yang baik.

Manajemen perlindungan ekspresi budaya tradisional yang baik perlu dilakukan karena banyak sekali beberapa waktu yang lalu adanya

penggunaan ekspresi budaya tradisional Indonesia yang sembarangan digunakan oleh pihak lain atau bukan masyarakat pengembannya. Bila penggunaan tersebut untuk komersial oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka akan sangat merugikan bangsa Indonesia terutama masyarakat pengembannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menjamin penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Konstitusi sudah jelas menjamin adanya perlindungan terhadap budaya yang dihasilkan masyarakat. Sudah barang tentu harus diimplementasikan dengan baik dan benar. Maka dari itu hak-hak tradisional yang tertuang dalam bentuk-bentuk nyata dari ekspresi budaya tradisional harus dilindungi dengan baik oleh negara dan/atau secara khusus oleh masyarakat pengembannya, agar ekspresi budaya tradisional tidak punah dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau bahkan penggunaan ekspresi budaya tradisional pada satu pihak yang memicu sengketa bisa dihindari. Seperti misalnya pada beberapa tahun yang lalu, telah terjadi permasalahan saling klaim budaya antar negara, mengenai klaim Malaysia terhadap produk budaya Indonesia diantaranya lagu Rasa Sayange, Reog Ponorogo, dan penggunaan Tari Pendet. Salah satu penyebabnya adalah karena belum jelasnya ketentuan yang mengatur perlindungan dan pelestarian produk budaya tradisional atau yang disebut dengan folklor. Belum jelasnya pengaturan perlindungan kesimpangsiuran pemahaman produk budaya tradisional dan proses pendaftaran hal cipta atas ekspresi budaya tradisional yang berbeda dengan pengaturan dalam sistem hak kekayaan intelektual⁵ konvensional. Sehingga dalam melindungi ekspresi budaya tradisional ini memerlukan tata kelola yang baik dalam sistem hukumnya. Sehingga dalam tulisan ini akan

1 *Suku Bangsa di Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia#Referensi, diakses tanggal 26 Mei 2017, pukul 08.30 WIB.

2 *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Institute of Southeast Asian Studies. 2003 dalam *Suku Bangsa di Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia#Referensi, diakses tanggal 26 Mei 2017, pukul 08.30 WIB.

3 *Ibid.*

4 Baca Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5 Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, Hlm. 1-2.

dikaji bagaimana pengelolaan ekspresi budaya tradisional (EBT) di daerah pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Perspektif Hukum Administrasi Negara)? Agar dengan tata kelola yang baik dalam administrasinya dapat lebih menjamin kepastian perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)

Ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk ekspresi, baik material (benda) maupun immaterial (tak benda), atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya dan pengetahuan tradisional, yang bersifat turun-temurun.⁶ Dalam undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang sudah tidak berlaku lagi pada Bagian Ketiga Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui Pasal 10 ayat (2) penyebutan ekspresi budaya tradisional dengan sebutan folklor. Folklor dalam Bukunya Purwadi yang berjudul “Folklor Jawa” memiliki definisi tradisi kolektif sebuah bangsa yang disebarkan dalam bentuk lisan maupun gerak isyarat, sehingga tetap berkesinambungan dari generasi ke generasi.⁷ Istilah folklore dimaksudkan untuk menyempitkan ruang lingkup suatu pengetahuan tradisional ke dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan.⁸ Penyebutan lain atas folklore maupun pengetahuan tradisional adalah digolongkan sebagai *intangible cultural heritage*.⁹

6 Pengertian tersebut diambil dari Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

7 Purwadi, *Folklor Jawa*, Pura Pustaka, Yogyakarta, 2009, Hlm. 1.

8 Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm. 2-3.

9 Intangible Cultural Heritage means the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artifacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their

Hakikat folklor merupakan identitas lokal yang terdapat dalam kehidupan masyarakat tradisional. Rasa memiliki terhadap tradisi yang sudah mengakar dan menyerah menyebabkan emosi masing-masing warganya menjadi manunggal.¹⁰ Manfaat folklor sebagai monumen tradisi lisan, ternyata menunjukkan identitas cultural. Folklor menampilkan watak dan corak kebudayaan daerah. Historisitas daerah itu dimanifestasikan dan dengan demikian sekaligus juga karakter atau identitas. Dimensi historis cultural di wilayah tersebut diungkapkan, maka lewat folklore watak daerah itu tampil dengan jelas.¹¹ Untuk itu ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus dilindungi dengan baik, agar karakteristik bangsa Indonesia yang banyak tertuang dalam budaya-budaya masing-masing daerah tidak pudar, bahkan tidak dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab.

2. EBT merupakan asset bangsa

Menurut Sanusi Bintang memberikan pengertian bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak manual eksklusif yang terdiri dari dua macam hak, yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*).¹² Bila dilihat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaannya. Hak ekonomi yang dimaksudkan adalah mencakup penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan, pengadaptasian,

environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. For the purposes of this Convention, consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development. Lihat selengkapnya dalam https://en.wikipedia.org/wiki/Intangible_cultural_heritage, *Intangible Cultural Heritage*, diakses tanggal 26 Mei 2017.

10 Purwadi, *Op.Cit.*, Hlm. 3.

11 *Ibid.*, Hlm. 5.

12 Sudarmanto, *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, Hlm. 1.

pengeransemenan, pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Selain itu, hak ekonomi seperti dijelaskan oleh Sudarmanto dalam bukunya “KI dan HKI serta Implementasinya bagi Indonesia” adalah hak yang dimiliki oleh seseorang Inventor dan pendesain untuk mendapatkan keuntungan atas invensi dan karya desain industrinya. Hak ekonomi tersebut berkembang dengan pemanfaatan hak secara komersial. Hal itu disebabkan karena untuk mewujudkan sebuah ide dan gagasan dalam sebuah tulisan, kemudian dilanjutkan dengan sebuah temuan produk dibidang teknologi (paten) maupun karya desain industri, tentunya memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, hasil suatu temuan karya intelektual harus dapat dikelola secara komersial, agar dapat mengembalikan modal dan memperoleh keuntungan. Berbeda dengan hak ekonomi, hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi inventor (penemu) dan reputasi pendesain. Konsep ini adalah konsep yang berasal dari hukum continental yang berasal dari Prancis. Dalam konsep ini hak pencipta (*droit auter; author rights*), terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi inventor dan pendesain.¹³ Pada prinsipnya sang pencipta dapat menggunakan hasil ciptaannya untuk apa saja seperti misalnya mengkomersialisasikan hasil ciptaannya untuk kepentingan dirinya maupun orang lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

Banyak ahli setuju bahwa hukum HKI adalah sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Hal ini dapat menguntungkan bagi masyarakat dalam jangka panjang.¹⁴ Dalam hal ekspresi budaya tradisional menjadi bagian dari kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat dan diwariskan

secara turun-temurun dan menjadi sebuah karakter bangsa sangat mendorong untuk dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan bukan hanya moral akan tetapi ekonomi. Hak ekonomi inilah yang kadang diambil oleh pihak yang tidak seharusnya menggunakan produk ekspresi budaya tradisional tersebut. Seperti yang dicontohkan ekspresi budaya tradisional dapat menjadi pendorong sektor pariwisata. Dengan begitu maka produk ekspresi budaya tradisional akan dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomis dalam jangka waktu lama dan terus menerus.

HKI adalah asset.¹⁵ Kekayaan intelektual merupakan asset bangsa yang tidak ternilai harganya. Dengan kekayaan intelektual yang diwujudkan dalam sebuah karya nyata akan dapat meningkatkan pembangunan suatu bangsa. Bangsa akan menjadi lebih maju bila digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini bukan hanya kekayaan intelektual yang bersifat individual saja, akan tetapi juga yang bersifat komunal. Kekayaan Intelektual yang bersifat komunal, khususnya warisan budaya yang boleh disebut produk dari ekspresi budaya tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Produk ekspresi budaya tradisional juga dapat bernilai ekonomis. Hak ekonomis tersebut dapat kesejahteraan masyarakat. Menurut Shahid Alikhan, penerapan sistem HKI merupakan batu loncatan dari sistem ekonomi modern di tingkat nasional dan sekaligus merupakan katalisator pembangunan. HKI merupakan asset untuk pertumbuhan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan¹⁶ yang harus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia di era pasar global. Kemajuan pembangunan ekonomi suatu bangsa dapat diukur dari seberapa banyak kepemilikan HKI-nya. HKI merupakan fundamental perekonomian

¹³ *Ibid.*, Hlm. 1-2.

¹⁴ Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013, Hlm. 15.

¹⁵ Achmad Zen Umar Purba, *Hukum Dalam Kolom*, Tempo Publishing, Jakarta, 2016, Hlm.137 dikutip dari pembukuan perusahaan, HKI masuk di kolom asset. Dalam berbagai BIT, “*investment*”, termasuk IPR (HKI). Lihat antara lain IJEP, Art. 58, f (6).

¹⁶ Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri: Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*, Cetakan ke-1, Bandung: Alumni, 2011, Hlm. 148.

suatu bangsa¹⁷ yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Selain itu HKI telah menjadi semacam alat efektif untuk membangun leverage dagang (*trade leverage*) dalam hubungan bilateral.¹⁸ Sehingga apabila HKI yang dimiliki suatu bangsa banyak maka dapat digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi suatu bangsa untuk kesejahteraan rakyatnya.

3. Pengaturan EBT belum tuntas

Pengaturan EBT dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang belum sempurna. Dapat dilihat dari pengaturan EBT dalam undang-undang tersebut hanya ada di BAB V tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang Dilindungi dan itupun hanya 2 (dua) pasal saja, yaitu Pasal 38 dan Pasal 39. Dalam pasal 38 ayat (1) tersebut diungkapkan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Diperjelas dalam ayat (2) nya bahwa negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional.¹⁹ Sejauh

17 Andy Noorsaman Someng dalam presentasinya pada seminar *Manfaat dan Strategi dalam Penggunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual oleh Dunia Usaha Termasuk Usaha Kecil dan Menengah* pada tanggal 24 Juni 2008 di Jakarta dengan judul: *Strategi Nasional dalam Pengembangan Sistem Hak Kekayaan Intelektual* menyampaikan bahwa maksud utama dari Kebijakan Nasional Kekayaan Intelektual (KNKI) adalah menjadikan kekayaan intelektual sebagai sebuah mesin baru pertumbuhan (*new engine of growth*) di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, dalam Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri: Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*, Cetakan ke-1, Bandung: Alumni, 2011, Hlm. 146.

18 Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengani Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, hal. 3 dalam Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Opini, dan Aktualisasi*, Buku Pertama, Penaku, Jakarta, 2014, Hlm. 2.

19 Yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informative
- b. Music, mencakup antara lain, vocal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayag

ini cukup jelas bahwa negara mempunyai tugas menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Tugas tersebut sampai saat ini masih kurang diperhatikan dan belum dilaksanakan dengan baik. Memang dalam pasal 38 ini bahwa ketentuan pemegang hak cipta atas EBT oleh negara dilaksanakan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang EBT. Tentunya hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Walaupun demikian bukan berarti perlindungan terhadap EBT tidak bisa dilakukan. Negara harus tetap mengusahakan aturan tersebut dalam dijalankan dengan memasukkan sedikit demi sedikit dalam program yang ada di setiap daerah. Amanah yang diemban negara sudah jelas diatur dalam konstitusi (dalam UUD Negara RI Tahun 1945). Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat.²⁰

4. Amanah bagi Negara dalam melindungi EBT

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia ke-4 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

dan sandiwara rakyat;

- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bamboo, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat.

Lebih jelasnya lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

20 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 94.

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....”

Perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam di wilayah NKRI yang menjadi tujuan mulia dalam pengelolaan suatu bangsa. Perlindungan yang diberikan seharusnya mencapai pada sebuah keadaan yang mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan umum yang juga menjadi salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang harus terus diupayakan oleh pemerintah melalui berbagai sumber daya yang ada termasuk melindungi budaya (tradisional) yang dihasilkan dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Budaya yang dilindungi oleh negara harus mengarah pada kondisi yang dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Artinya dengan melindungi EBT dapat membuat masyarakat lebih sejahtera.

Berbagai produk ekspresi budaya tradisional yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia menjadi sebuah asset yang sangat berharga sekaligus menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai karakter yang khas yang membedakan dari Negara-negara lain. Bangsa Indonesia kaya akan budaya dan budaya tersebut haruslah terus diupayakan perlindungannya oleh Negara dan masyarakat Indonesia. Upaya mewujudkan perlindungan untuk kesejahteraan umum dalam bidang budaya tersebut antara lain tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia...”. Ketentuan konstitusi ini merupakan politik hukum (*legal politic*) yang menunjukkan bahwa terdapat prinsip-prinsip dan arah pembangunan nasional dalam tata kelola budaya bangsa Indonesia. Arah kebijakan dan penetapan aturan yang menyangkut kepentingan suatu bangsa harus ditentukan dengan jelas secara konstitusi dan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan yang

berada di bawahnya.

Peran serta masyarakat juga sangat menentukan dalam pembentukan hukum. Hak masyarakat tersebut telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Itu artinya bahwa masyarakat dapat berperan aktif menyampaikan pikirannya dalam rangka membangun bangsanya sesuai kemampuannya. Hal itu juga diperkuat secara konstitusional salah satunya pada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Salah satu yang dijelaskan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengungkapkan bahwa setiap orang atau seluruh masyarakat berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari sebuah budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dalam hal ini masyarakat berhak ikut serta dalam melindungi budaya bangsa Indonesia yang sangat beragam dan banyak. Ekspresi budaya tradisional di Indonesia yang kepemilikannya secara komunal dalam perlindungannya harus melibatkan peran serta masyarakat. *Jean Jacques Rousseau* dalam bukunya yang berjudul “*Du Contract Social*” dalam teorinya mengenai perjanjian masyarakat mengungkapkan bahwa dalam suatu negara, *natural liberty* telah berubah menjadi *civil liberty* dimana rakyat memiliki hak-haknya.²¹ Menurut Rousseau, sejauh kehendak manusia diarahkan pada kepentingan sendiri atau kelompoknya maka kehendak mereka tidak bersatu atau bahkan berlawanan, tetapi sejauh diarahkan pada kepentingan umum bersama sebagai suatu bangsa, semua kehendak itu bersatu

21 Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm. 55.

menjadi satu kehendak, yaitu kehendak umum atau yang dikenal dengan istilah *volte general*.²² Kehendak rakyat Indonesia dalam menjaga ekspresi budaya tradisional perlu dipahami oleh pemerintah, terutama parlemen (lembaga legislatif), untuk dapat mewujudkan keinginan masyarakat sehingga tidak atas kehendak negara saja (pemerintah) secara sepihak.

Perwujudan peran serta masyarakat tertuang dalam Teori Kedaulatan Rakyat. Teori kedaulatan rakyat adalah suatu cara atau sistem yang menentukan bagaimana memecahkan sesuatu soal yang terjadi dalam masyarakat untuk memenuhi kehendak umum.²³ Pemenuhan kehendak umum juga telah tertuang dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang menjadi dasar penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara, termasuk sebagai dasar dalam penyelenggaraan segala ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam sila keempat Pancasila disebutkan bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Ungkapan tersebut berarti rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan, dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah, yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya.²⁴ Teori kedaulatan rakyat yang dipahami oleh *Immanuel Kant* yang menyatakan bahwa pemerintahan konstitusional yang sebagai penegak hukum tertinggi (*Constitutional government as enforcement of the Higher Law*), karena tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dari warganya, yaitu kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan. Sedangkan yang berhak membuat undang-undang adalah rakyat itu sendiri.²⁵

Pada abad ke-18 Jen Jacques Rousseau mengemukakan bahwa dasar terjadinya suatu Negara adalah ‘perjanjian masyarakat’ (*Contrat*

Social) yang diadakan oleh dan antara anggota masyarakat untuk mendirikan suatu negara. Teori JJ Rousseau yang menjadi dasar paham ‘Kedaulatan Rakyat’ mengajarkan bahwa Negara bersandar atas kemauan rakyat, demikian pula halnya semua peraturan-perundangan adalah penjelmaan kemauan rakyat tersebut.²⁶

Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui wakilnya yang berada di lembaga legislatif. Peran lembaga legislatif yang dalam hal ini disebut negara, tertuang dalam teori kedaulatan negara. Teori Kedaulatan Negara (*Staats-sovereiniteit*) yang dikemukakan oleh *Jean Bodin* dan *George Jelinek* dalam kerangka melindungi kekayaan masyarakat tradisi. Menurut teori kedaulatan negara: “Kekuasaan tertinggi ada pada negara dan negara mengatur kehidupan anggota masyarakatnya. Negara yang berdaulat melindungi anggota masyarakatnya terutama anggota masyarakat yang lemah”.²⁷ Suyud Margono dalam bukunya berjudul “Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)” menyatakan bahwa teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum dan teori kedaulatan rakyat pada dasarnya mengakui, bahwa rakyat telah mendelegasikan kedaulatannya kepada negara melalui organ-organnya.²⁸ Seperti yang dijelaskan oleh *Rousseau* bahwa hukum tiada lain merupakan perwujudan dari “*The general will*” (kehendak rakyat)²⁹, kehendak rakyat yang diwujudkan melalui sebuah pendelegasian kedaulatannya pada sebuah organ negara yang saat ini berupa parlemen (lembaga legislatif). Kehendak rakyat dalam melindungi ekspresi budaya tradisional dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual harus

26 Samidjo dan A. Sahal, *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*, h. 46 dalam Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, 2006, Hlm. 151.

27 Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, Hlm. 121, dalam Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, Hlm. 22-23.

28 Suyud Margono, *Hukum..., Op.Cit.*, Hlm. 28.

29 Bahder Johan Nasution, *Negara..., Op.Cit.*, Hlm. 71.

22 *Ibid.*

23 Suyud Margono, *Hukum..Op.Cit.*, Hlm. 27.

24 Bahder Johan Nasution, *Negara..., Op.Cit.*, Hlm. 60.

25 Suyud Margono, *Hukum..., Op.Cit.*, Hlm. 27-28.

diwujudkan dalam sebuah Undang-Undang yang sesuai dengan kehendak rakyat. Undang-Undang yang bisa memberikan hak-hak dalam melindungi kepentingan masyarakat pengemban maupun masyarakat yang mempunyai keinginan mengembangkan budaya atau tradisi atas budaya tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan.

Menurut teori yang dikemukakan oleh JJ Rousseau bahwa kemauan orang seluruhnya yang telah mereka serahkan kepada suatu organisasi (yaitu Negara) yang telah terlebih dahulu mereka bentuk dan diberi tugas membentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat.³⁰ Seperti yang diungkapkan oleh *Immanuel Kant* bahwa pemerintahan konstitusional yang sebagai penegak hukum tertinggi serta *Jean Bodin* dan *George Jelinek* juga mengungkapkan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada negara dan negara mengatur kehidupan anggota masyarakatnya³¹, mengamanatkan bahwa negara sebagai wakil rakyat dan penegak hukum tertinggi. Negara adalah sebuah sistem hukum.³² Sehingga negara wajib melindungi budaya khususnya EBT seperti yang tertuang dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang saat ini masih belum jelas pengelolaan maupun perlindungannya.

5. Pengelolaan EBT di daerah

Produk ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh masyarakat dalam lingkup kekayaan intelektual termasuk dalam hak komunal. Hak komunal merupakan sumber inspirasi penting dalam pengembangan inovasi modern, karena itu keberadaannya perlu mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara layak dalam tatanan hukum baik secara lokal, regional maupun internasional. Pengembangan inovasi baru berdasarkan hak komunal merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh komunitas lokal pemilikinya sendiri, supaya nilai tambah yang diperoleh sepenuhnya

30 CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 59 dalam Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, 2006, Hlm. 151.

31 Jimly Asshiddiqie, *Gagasan..., Loc.Cit*, Hlm. 121.

32 Hlm. 148.

dapat dinikmati oleh mereka.³³

Pengelolaan EBT dapat dilakukan dengan mendokumentasikan setiap hak komunal yang termasuk dalam EBT yang dimiliki daerah, dengan tujuan:³⁴

- a. Mengklaim jenis-jenis hak komunal milik daerah.
- b. Menangkal pendaftaran hak komunal yang dilakukan pihak asing.
- c. Menyebarkan kemanfaatan hak komunal kepada masyarakat Indonesia.

Langkah awal yang dapat dilakukan dalam pengelolaan EBT di daerah adalah dengan melakukan identifikasi terhadap seluruh produk EBT milik daerah yang ada di seluruh Indonesia. Identifikasi dapat dilakukan dengan menginventarisasi segala produk EBT di daerah masing-masing. Dalam melakukan inventarisasi produk EBT dapat dilakukan dengan pemberdayaan dan optimalisasi keberadaan Unit Pengelola Kekayaan Intelektual (UPKI) di setiap daerah melalui Sentra HKI dan/ atau Klinik HKI untuk pengelolaannya sesuai yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi³⁵ dan dengan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM dan juga Pemerintah Daerah setempat. Pertumbuhan Sentra HKI di setiap daerah harus didorong yang pembentukannya dipelopori melalui perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada di daerah setempat di seluruh Indonesia. Selanjutnya apabila sudah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, maka dapat dilakukan upaya perlindungan melalui cara-cara yang sudah tertera dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya seperti yang tertera dalam Pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta bahwa untuk produk EBT yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, maka negar dapat memegang hak ciptanya dan melakukan pengumuman demi

33 Sudarmanto, *Op.Cit.*, Hlm. 111.

34 *Ibid.*, Hlm. 113.

35 *Ibid.*, Hlm. 115.

kepentingan si penciptanya atau kepentingan komunal masyarakat adat atau pengembannya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dengan mengkoordinasikannya dengan Pemerintah Daerah yang lain agar tidak terjadi saling klain atas produk EBT tersebut dengan jalan musyawarah.

Peran Pemerintah Daerah atas pengelolaan EBT dapat melalui Dinas Pariwisata yang dimilikinya dalam melakukan inventarisasi EBT dengan bekerjasama dengan *stakeholder* dan Sentra HKI yang ada. Dalam melaksanakan pengelolaan EBT, pemerintah harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas tersebut menjadi landasan dalam pengelolaan EBT agar dalam jangka pendek maupun jangka panjang, EBT dapat terinventaris (teridentifikasi) dan terkelola dengan baik, sehingga adanya perlindungan dengan tata kelola EBT yang baik yang akhirnya akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dalam pengelolaan EBT dapat dilihat dari perpektif hukum administrasi negara melalui penerapan beberapa asas umum penyelenggaraan negara³⁶ yang baik.

Pertama, Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepastian, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dalam pengelolaan EBT pemerintah harus berlandaskan aturan hukum yang jelas. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak cipta atas EBT dipegang oleh negara. Perlu adanya pembuatan Peraturan pemerintah yang disegerakan agar dapat menjadi landasan dalam melaksanakan tugas bagi pemerintah daerah. Walaupun belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur EBT sebenarnya pemerintah daerah dapat juga melakukan pengelolaan EBT seperti yang dicontohkan dalam sebuah penelitian terhadap Tarian Tradisional dan Kerajinan Tangan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Daerah telah melakukan perlindungan dan inventarisasi terhadap Tarian Tradisional dan Kerajinan Tangan, walaupun belum optimal

dengan berbagai kendalanya. Seharusnya pemerintah daerah membuat kebijakan melalui program kerjanya untuk melindungi EBT yang ada.

Kedua, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dalam pengelolaan EBT harus adanya keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pelaksanaannya. Keteraturan ditandai dengan adanya peraturan perundang-undangan yang lengkap dan jelas, serta adanya sistem tata kelola yang baik, akuntabel dan transparan mulai dari pusat sampai daerah. Sehingga sistem tata kelola EBT yang baik dengan didukung dengan landasan hukum yang kuat, serta sumberdaya yang memadai dan profesional maka akan terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat. Keseimbangan dalam proses pendanaan antar daerah dalam pengelolaan EBT juga menjadi hal penting, sehingga membutuhkan prinsip keadilan dalam pendanaannya. Karena antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda kebutuhannya dan perlu adanya program yang jelas disetiap daerahnya untuk mendapatkan pendanaannya.

Ketiga, Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas ini mengajarkan bahwa dalam pengelolaan EBT harus melibatkan aspirasi dari masyarakat, disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dan selektif dalam pengambilan aspirasinya. Sehingga pengelolaan EBT juga dapat melibatkan masyarakat daerah yang memiliki kepedulian akan produk-produk EBT yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Hasil dari kebijakan pemerintah atas pengelolaan EBT dapat diterima oleh masyarakat dan dapat mensejahterakan masyarakat. Jadi kepentingan umum harus didahulukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pengelolaan EBT seperti yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan harus adanya keterlibatan atau

36 Ridwan HR, *Op.Cit.*, Hlm. 241-242.

peran aktif masyarakat atau *stakeholder* dalam setiap pembuatan kebijakan.

Keempat, Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dalam pengelolaan EBT harus adanya sikap terbuka bagi pemerintah. Keterbukaan dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengelolaan EBT disuatu daerah agar EBT dapat dilestarikan, dimanfaatkan, dan dilindungi dengan baik. Pemerintah juga harus memberikan informasi mengenai pentingnya perlindungan EBT kepada masyarakat luas terutama masyarakat adat atau masyarakat pengembannya. Sehingga masyarakat adat atau masyarakat pengembannya menjadi sadar akan hukum yang ada untuk dapat diajak kerjasama dalam melindungi EBT tersebut. Penyampaian informasi harus disampaikan secara terus menerus dan dibina, misalnya melalui sosialisasi dan kegiatan pembinaan terhadap pengembangan dan pelestarian produk EBT serta perlindungannya dengan memberikan bantuan materiil maupun non materiil dari pemerintah.

Kelima, Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Asas ini dapat mendorong kinerja pemerintah dalam penjagaan EBT. Kewajiban pemerintah sudah jelas tertuang dalam undang-undang hak cipta bahwa negara memegang hak cipta atas EBT. Sehingga negara berkewajiban membuat program kedepan untuk melakukan pengelolaan dan penjagaan EBT agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau tidak memiliki izin untuk kepentingan ekonomis. Negara juga berkewajiban membuat regulasi yang baik dan lengkap agar perlindungan EBT dapat dilakukan dengan berlandaskan aturan-aturan yang kuat dan lengkap. Karena saat ini perlindungan EBT masih terhambat oleh belum lengkapnya aturan yang ada, ataupun belum ada peraturan yang lebih khusus dalam bidang kekayaan intelektual yang mengaturnya.

Keenam, Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melindungi EBT di dalam pemerintahan perlu adanya Sumber Daya Manusia yang mumpuni di bidang kekayaan intelektual. Untuk itu perlu tenaga profesional untuk menangani hal ini. Pemerintah daerah dapat mengajak Perguruan Tinggi dan *stakeholder* yang peduli dengan EBT. Sehingga dalam pengelolaan produk EBT melibatkan sumber daya yang profesional dan ahli dalam bidangnya.

Ketujuh, Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya, pengelolaan produk-produk hasil EBT harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Indonesia terutama masyarakat adat atau masyarakat pengembannya dengan capaian adalah kesejahteraan masyarakat luas. Pengelolaan produk EBT akan dapat dipertanggungjawabkan apabila dalam pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas serta transparan, melalui sistem tata kelola yang baik.

C. SIMPULAN

Pengelolaan terhadap EBT menjadi suatu keharusan bagi Bangsa Indonesia. Sebab saat ini Indonesia telah masuk pada era pasar bebas yang suatu saat dapat mengerus kebudayaan yang menjadi ciri khas Bangsa Indonesia. Produk EBT dapat dikomersialisasikan dan dikapitalisasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan dirinya sendiri. Untuk itu perlu adanya pengelolaannya yang baik dengan cara menyusun peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap, adanya peran serta pemerintah daerah, *stakeholder* dan perguruan tinggi yang memiliki Sentra HKI dalam pengelolaan produk-produk EBT dengan cara mengidentifikasi dan

menginventarisasikannya yang selanjutnya diberikan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilakukan pengembangan, pemanfaatan, promosi, dan pelestarian terhadap produk-produk EBT disetiap daerah dengan memperhatikan dan melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengelolaannya agar terwujudnya tujuan negara Indonesia yaitu kesejahteraan umum bagi seluruh rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Ichtisar Baru van Hoeve: Jakarta.

HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Johan Nasution, Bahder. 2012. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju: Bandung.

Lindsey, Tim, dkk. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Alumni: Bandung.

Lutviansori, Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Margono, Suyud. 2015. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Pustaka Reka Cipta: Bandung.

Purwadi. 2009. *Folklor Jawa*. Pura Pustaka: Yogyakarta.

Sinungan, Ansori. 2011. *Perlindungan Desain Industri: Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*. Alumni: Bandung.

Soelistyo, Henry. 2014. *Hak Kekayaan*

Intelektual: Konsep, Opini, dan Aktualisasi. Penaku: Jakarta.

Sudarmanto. 2012. *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, PT Elex Media Komputindo: Jakarta.

Triwulan Tutik, Titik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prestasi Pustakaraya: -

Zen Umar Purba, Achmad. 2016. *Hukum Dalam Kolom*. Tempo Publishing: Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Website

https://en.wikipedia.org/wiki/Intangible_cultural_heritage , *Intangible Cultural Heritage*, diakses tanggal 26 Mei 2017.

Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. Institute of Southeast Asian Studies. 2003 dalam *Suku Bangsa di Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia#Referensi, diakses tanggal 26 Mei 2017.

Suku Bangsa di Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia#Referensi, diakses tanggal 26 Mei 2017.

Lain-lain

Andy Noorsaman Someng dalam presentasinya

pada seminar *Manfaat dan Strategi dalam Penggunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual oleh Dunia Usaha Termasuk Usaha Kecil dan Menengah* pada tanggal 24 Juni 2008 di Jakarta dengan judul: *Strategi Nasional dalam Pengembangan Sistem Hak Kekayaan Intelektual*.

Biodata Penulis

Data Pribadi

- Nama Lengkap : Sigit Nugroho
- Nama Panggilan : Sigit
- Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 10 Februari 1984
- Umur : 33 tahun
- Alamat : Perum Indo Residence Jl. Singkur No. 30, RT. 006 RW. 002 Selindung, Gabek, Pengkalpinang.
- Pekerjaan : Dosen FH UBB
- Nomor HP : 085 225 314 318
- e-mail : c_git_tik@yahoo.com/snugroho571@gmail.com
- Agama : Islam
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia

Pangkat dan Golongan

- Golongan/Pangkat : IIIb/Penata Muda Tk. I
- Jenjang Jabatan Akademik : Asisten Ahli (AA)
- NIP : 198402102012121005
- NIDN : 0210028401

ABSTRAK
PEREMPUAN DALAM ARENA KEKERASAN DOMESTIK
(Studi Dokumen Penyebab Kekerasan pada Perempuan dalam Rumah Tangga di Pulau
Bangka)

*Oleh : Sujadmi*¹*

Tulisan ini mencoba untuk menganalisis berbagai bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam rumah tangga atau keluarga. Lebih lanjut mencoba menggali kemungkinan penyebab yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan pada perempuan. Mansour Fakih mengemukakan bahwa pada dasarnya penyebab terjadinya kekerasan terdiri atas dua faktor yakni internal dan eksternal. Berangkat dari pandangan tersebut, maka tulisan ini akan mencoba mengkajinya melalui studi dokumentasi. Data-data yang digunakan untuk melakukan analisis adalah hasil penelusuran dokumentasi dari beberapa sumber. Hasil analisis menyebutkan bahwa tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan di Pulau Bangka mayoritas disebabkan oleh faktor internal yakni terkait persoalan ekonomi rumah tangga. Lebih lanjut adanya pandangan tabu akan persoalan keluarga jika dipublikasikan sehingga perempuan cenderung lebih memilih diam dan tidak melaporkan pada pihak yang berwajib. Disini menunjukkan adanya faktor internal dan eksternal baik dari sisi perempuan maupun keluarga itu sendiri.

Keywords : *Perempuan, KDRT dan Ekonomi*

1 Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

A. Pendahuluan

Kehidupan bersama yang terdiri atas orang tua (ayah/suami, ibu/istri) dan anak yang diikat oleh sebuah ikatan perkawinan disebut sebagai keluarga. Keluarga merupakan sebuah kelompok sosial terkecil yang selalu menjadi dambaan atau impian dari setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Secara ideal keluarga merupakan tempat dimana individu mendapatkan kenyamanan baik secara materi maupun immateri. Setiap individu mendambakan kehidupan keluarga yang harmonis. Sebuah keluarga dikatakan harmonis ketika seluruh anggota keluarga merasa bahagia. Perasaan bahagia tersebut ditandai dengan tidak adanya konflik atau kekecewaan dan kepuasan terhadap seluruh keadaan anggota keluarga. Kepuasan terhadap keadaan yang dimaksud adalah baik keadaan secara fisik, mental, emosi dan sosial ekonomi.

Keluarga yang harmonis memiliki kekukuhan yang relatif lebih tinggi yang dipengaruhi

oleh beberapa faktor. Faktor yang dimaksud diantaranya bahwa setiap anggota keluarga memiliki komitmen, kesediaan, mengungkapkan apresiasi, mengembangkan spiritualitas dan dapat menyelesaikan konflik. Faktor terakhir merupakan yang sangat menentukan akan keharmonisan dalam sebuah keluarga yaitu mampu tidaknya anggota keluarga terutama antara suami dan istri dalam menyelesaikan sebuah konflik.

Konflik dalam rumah tangga atau keluarga cenderung menimbulkan adanya tindak kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya baik itu pada suami, istri ataupun anak sebagai korban. Tindak kekerasan senantiasa terjadi terhadap pihak-pihak yang dinilai lemah. Pada kasus rumah tangga pihak yang dimaksud yakni pada perempuan (istri) dan anak. Perempuan dan anak seringkali menjadi korban tindak kekerasan mengingat posisinya dalam struktur keluarga cenderung dianggap oleh masyarakat sebagai pihak yang berada pada kelas bawah yaitu berada

dibawah kuasa laki-laki/suamu/ayah.

Rumah tangga merupakan ranah domestik yang secara sosio kultur dikonstruksikan sebagai ranahnya perempuan. Kondisi ini terjadi mengingat dalam budaya masyarakat memegang sistem pembagian kerja secara seksual, dimana perempuan ditempatkan di ranah domestik dan laki-laki pada ranah publik. Pembagian peran seperti ini secara tidak langsung telah menumbuhkan tindak kekerasan yang seringkali terlewat bahkan para korban banyak yang berdalih sebagai bentuk ketaatan terhadap pelaku karena adanya ikatan perkawinan. Dengan demikian banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi akan tetapi tidak terdata atau sulit untuk ditangani karena sifat tertutup dari para korban dan pelaku.

Data Komnas Perempuan mencatat bahwa tahun 2016 terdapat laporan tindak kekerasan terhadap perempuan sebanyak 259.150 kasus yang tersebar di 34 provinsi. Data tersebut tentunya lebih sedikit dibandingkan dilapangan mengingat masih banyak kasus yang belum atau tidak dilaporkan. Angka tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak ii setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Lebih miris lagi bahwa para pelakunya adalah anggota keluarga sendiri.

Lebih lanjut dari adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga ini mengacu pada meningkatnya angka perceraian. Berdasarkan data dari 359 Pengadilan Agama (PA) menunjukkan terdapat 245.548 kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh tindak kekerasan. Tindak kekerasan ini dialami oleh pihak perempuan sehingganya tidak sedikit dari kasus-kasus perceraian yang diajukan ke PA yakni dari pihak istri atau perempuan.

Pada wilayah kepulauan Bangka Belitung sendiri, angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga setiap tahunnya pun terus mengalami peningkatan. Kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga ini berpotensi terjadi kapanpun dan dimanapun. Berdasarkan data dari dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak pada tahun 2016 terdapat 202 kasus yang terdiri atas 90 kasus kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT), perkosaan 90 kasus, pencabulan 64 kasus, trafiking 2 kasus dan lainnya 49 kasus. Kasus tersebut yang menjadi korban mayoritas anak dan perempuan yang pelakunya adalah anggota keluarga sendiri.

Data-data tersebut menunjukkan bahwasannya kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan yang mencemaskan pada setiap daerah bahkan negara (Djannah dkk, 2007: 1). Persoalan perempuan yang dialami dalam keluarga tentunya bukan lagi menjadi masalah privat atau domestik dalam setiap keluarga tersebut melainkan menjadi masalah sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Selama banyak sekali faktor yang diduga sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam keluarga. Meskipun demikian, belum ada solusi atau tindakan yang dinilai cukup efektif dan efisien guna menekan tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anak dan perempuan. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka tuisan ini akan mencoba melakukan analisis penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ranah domestik. Analisis dilakukan pada data-data yang ditelusuri dari beberapa sumber dokumentasi baik pemerintah maupun media.

B. Perempuan dan Keluarga

Perempuan dan keluarga merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Pada setiap masyarakat tentunya memiliki kebiasaan atau kebudayaan yang beragam. Keberagaman budaya ini menimbulkan adanya perbedaan dalam sistem pembagian peran yang diterapkan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat luas. Perbedaan ini tidak terlepas dari adanya proses sosialisasi yang dilakukan dalam keluarga yang kemudian berkembang dalam kehidupan sekitar keluarga yakni masyarakat secara lebih luas. Sosialisasi dalam keluarga memegang peran yang sangat penting dalam setiap individu dan kelompok masyarakat memaknai terkait sistem pembagian kerja atau gender.

Pembagian peran yang terjadi antara perempuan dan laki-laki tentunya memiliki perbedaan. Keduanya secara biologis berbeda karenanya peran-peran yang diharapkan dalam masyarakat pun secara sosiologis berbeda dan karenanya sosialisasinya pun berbeda. Perbedaan sosialisasi ini terjadi baik yang dilakukan dalam keluarga maupun lingkungan sosial yang lebih luas yakni masyarakat (Ihromi, 2004: 43-44).

Menurut Scanzoni dan Scanzoni (dalam Ihromi, 2004: 44) laki-laki diharapkan melakukan peran yang bersifat instrumental yaitu berorientasi pada pekerjaan untuk memperoleh nafkah (*task oriented*), sedangkan perempuan diharuskan untuk melakukan peran yang sifatnya ekspresif, yaitu berorientasi pada emosi manusia serta hubungannya dengan orang lain (*people oriented*). Pembagian peran yang demikian berimplikasi pada perempuan yang senantiasa ditempatkan pada ranah domestik. Domestifikasi perempuan terjadi karena kultur yang terjadi pada masyarakat senantiasa dinilai sebagai sebuah kodrat atau suatu hal yang tidak dapat dirubah.

Pada kehidupan sosial budaya masyarakat di Indonesia khususnya di Pulau Bangka, perempuan dinilai memegang peran yang cukup besar dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga. Pada lingkup ini tentunya perempuan dipandang sebagai pihak yang berwenang pada ranah domestik. Meskipun demikian, tidaklah sedikit kaum perempuan khususnya di Pulau Bangka yang juga turut bekerja di ranah publik. Ranah publik yang dimaksud disini adalah pada ranah ekonomi. Keterlibatan perempuan pada ranah ekonomi ini nampak pada adanya aktivitas atau keterlibatan perempuan sebagai pekerja atau buruh pada beberapa sektor. Sektor yang dimaksud diantaranya sebagai buruh pada kebun kelapa sawit, buruh timah konvensional (TI), buruh lepas atau harian dan lain sebagainya. Selain itu juga tidak sedikit yang terlibat dalam bidang jasa atau perdagangan hasil karya atau industri rumah tangga.

Kondisi pembagian peran atau kerja secara seksual tersebut semakin terinstitusionalisasikan kala pada kehidupan keluarga sistem tersebut

terus direproduksi dari waktu ke waktu. Keluarga yang merupakan tempat dilakukannya sosialisasi untuk pertama kali memiliki andil yang cukup besar dalam diterapkannya sistem domestifikasi pada pihak atau kaum perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Gambaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pulau Bangka

Tindak kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga atau yang disebut dengan KDRT disebabkan oleh beberapa faktor. Dampak dari adanya KDRT ini tidak sedikit berujung pada gugatan perceraian. Sebagai contoh di Kabupaten Bangka Tengah, data pada dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan pada data perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Bangka Tengah. Tabel 1 menunjukkan bahwa hampir pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah dalam kurun waktu dua tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Semakin meningkatnya gugatan perceraian ini, PA Bangka Tengah menyampaikan bahwa sebagian besar dilatar belakangi oleh adanya tindak KDRT.

Selain di Kabupaten Bangka Tengah, daerah lain di Pulau Bangka yang angka perceraianannya juga relatif tinggi adalah di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan. Gambaran kedua kabupaten tersebut juga tidak jauh berbeda dengan kabupaten Bangka Tengah. Kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tanggapun juga cukup tinggi. Kondisi tersebut juga berdampak pada tingginya angka perceraian dengan alasan KDRT. Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten yang beberapa waktu terakhir ini banyak sekali ditemukan kasus tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri.

Tabel 1. Data Perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Bangka Tengah

No.	Kecamatan	Jumlah Perkara	
		Tahun 2015	Tahun 2016
1	Koba	43	43
2	Pangkalan Baru	21	39
3	Sungai Selan	26	30
4	Simpang Katis	31	28
5	Namang	23	13
6	Lubuk Besar	17	21
Total		161	174

2. Faktor Ekonomi

Secara nasional, dari 255 juta penduduk Indonesia, 126,9 jutanya adalah kaum perempuan. Tingkat pendidikan kaum perempuan sebanyak 34,7% nya adalah SLTA keatas. Dari angka ini terdapat 93,3 juta dari total jumlah perempuan berada pada usia kerja dan 45,6 juta jiwa merupakan angkatan kerja. Berdasarkan data-data tersebut dapat menunjukkan bagaimana tingginya angka perempuan yang ikut berpartisipasi dalam ranah publik atau ekonomi. Sebanyak 37,2% dari jumlah penduduk Indonesia yang bekerja adalah kaum perempuan yang bergerak diberbagai sektor. Sektor informal menempati posisi terbanyak yakni mencapai 55,4%. Sektor informal ini mencakup berbagai bidang mulai dari membuka usaha sendiri (UMKM) dan sebagai buruh.

Perempuan dengan perekonomian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dan diabaikan begitu saja. Keterlibatan perempuan dalam ranah ekonomi inilah yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Akan tetapi tidak sedikit karna persoalan keterlibatan perempuan dalam ranah ekonomi inilah yang juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Pada perempuan yang memiliki aktivitas ekonomi pada ranah formal (bekerja di institusi) dan secara gaji lebih tinggi atau mapan dari suami, cenderung memunculkan rasa minder atau gengsi pada pihak laki-laki. Selain itu tidak sedikit

juga yang menyatakan bahwa kadangkala sang istri menjadi tidak optimal dalam mengerjakan pekerjaan domestik dan cenderung menggunakan jasa asisten rumah tangga atau jasa penitipan anak bagi yang memiliki anak kecil. Kondisi tersebut memicu terjadinya percekocokan antara suami dengan istri dalam rumah tangga. Dimana suami merasa istrinya tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Keadaan ini pada awal-awalnya memunculkan sikap yang memunculkan tindak kekerasan mulai dari verbal hingga non verbal/fisik.

Data di lapangan juga menunjukkan adanya kondisi yang sebaliknya yakni dimana laki-laki sebagai suami memiliki status pekerjaan dan penghasilan yang relatif lebih mapan. Pada keadaan ini adanya kecenderungan suami melarang istrinya untuk bekerja atau terlibat dalam ranah ekonomi dan hanya fokus pada pekerjaan domestik. Pada saat yang sama, tidak sedikit dari para suami informan menyatakan bahwa suami atau laki-laki cenderung memiliki perempuan idaman lain atau selingkuhan. Tindakan yang diambil suami inilah yang sudah pasti memunculkan adanya pertikaian atau pertengkaran dan tidak sedikit berujung pada adanya tindak kekerasan yang dilakukan suami/laki-laki pada istrinya.

Ketika kondisi ekonomi mengalami perubahan atau menurun, para informan (para istri) menyatakan bahwa kadang suaminya mulai sering marah tanpa alasan. Situasi akan semakin tidak baik kalau sang istri tidak memiliki pekerjaan diluar rumah yang dapat membantu perekonomian keluarga. Sehingga ketika suami mengalami kesulitan dalam pendapatan maka akan cenderung melakukan kekerasan baik yang sifatnya verbal maupun non verbal.

3. Faktor Usia Pernikahan

Faktor lain yang memengaruhi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu usia pernikahan. Usia pernikahan ini mencakup dua hal yaitu lamanya pernikahan dan umur ketika menikah. Salah satu yang dinilai ada korelasi

dengan terjadinya peningkatan angka KDRT yaitu umur ketika menikah atau yang disebut dengan pernikahan dini.

Fenomena pernikahan dini ini memunculkan permasalahan tersendiri bagi suatu daerah bahkan negara. Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang memiliki angka pernikahan dini cukup tinggi. Data nasional menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia terbilang cukup tinggi dan terus mengalami peningkatan. Berikut angka pernikahan usia dini yang masuk dalam lima besar nasional :

Tabel 2. Jumlah Prosentase Angka Pernikahan Dini di Indonesia Tahun 2016

No.	Provinsi	Persentase (%)
1	Kalimantan Tengah	52,1
2	Jawa Barat	50,2
3	Kalimantan Selatan	48,4
4	Bangka Belitung	47,9
5	Sulawesi Tengah	46,3

Sumber : CNN 2016

Berdasarkan tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa untuk daerah Bangka Belitung angka pernikahan dini masih cukup besar. Kondisi tersebut searah dengan data yang menyebutkan bahwa angka perceraian juga relatif tinggi. Angka ini seolah menunjukkan bahwa semakin tingginya angka pernikahan dini maka berdampak pada makin tingginya angka perceraian. Angka perceraian yang terjadi khususnya di Bangka Belitung terus mengalami peningkatan. Data Pengadilan Agama (PA) menyebutkan bahwa gugatan perceraian banyak diajukan dari pihak istri (perempuan) dan rata-rata terkait adanya kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami (laki-laki).

Tindak kekerasan terjadi pada keluarga muda yang melakukan pernikahan dini disinyalir karena adanya faktor ekonomi sebagai salah satu pemicunya. Dimana kondisi perekonomian keluarga muda ini kurang stabil dan mental yang juga belum stabil kala menghadapi perubahan perekonomian dalam keluarga. Perekonomian

yang melatarbelakangi tindak kekerasan ini ternyata tidak melulu pada kasus penurunan ekonomi melainkan persoalan peningkatan ekonomi. Kala perekonomian keluarga mengalami peningkatan dan ketidakseimbangan antara pendapat istri maupun suami (yang kebetulan sama-sama bekerja) menjadi pemicu mulai terjadinya percekocokan antara suami istri yang tidak sedikit berujung pada tindak kekerasan.

Faktor yang kedua yang menyebabkan disharmonis pada keluarga yakni terkait lamanya usia perkawinan. Permasalahan kedua ini terjadi pada keluarga yang sudah relatif lama menjalani ikatan pernikahan atau berumah tangga. pada beberapa kasus semakin lama usia pernikahan maka kondisi ekonomi semakin stabil. Kestabilan bahkan kelebihan ekonomi ini juga memicu terjadinya tindak KDRT yang mayoritas terjadi karena adanya faktor perselingkuhan baik pada suami atau istri. Pada sisi lain yang kondisi ekonominya tidak juga menjadi stabil atau tercukupi akan semakin mempertinggi potensi terjadinya tindak KDRT dalam masyarakat. Dengan demikian, usia pernikahan pada dasarnya mempengaruhi tingkat kestabilan dalam rumah tangga dan salah satu faktor pemicu terjadinya tindak KDRT. KDRT disini secara mayoritas pihak perempuan atau istrilah yang senantiasa menjadi korban.

Kondisi tersebut seolah menjadi sebuah pengukuhan dimana keluarga menjadi ranah domestik yang sangat rentang terhadap terjadinya tindak kekerasan pada perempuan.

D. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Membahas kekerasan tentunya sangatlah luas dan tidak cukup jika sekedar mendefinisikannya saja. Banyak tokoh yang mencoba mendefinisikan maupun mengklasifikasikan berbagai macam bentuk tindak kekerasan. John Galtung (2003) mengklasifikasikan bentuk kekerasan ke dalam tiga bentuk. *Pertama*, kekerasan langsung. Kekerasan ini disebut juga sebagai sebuah peristiwa dari terjadinya tindak kekerasan. Kekerasan ini terwujud dalam bentuk tindakan/perilaku seperti pemukulan, intimidasi,

pembunuhan dan penyiksaan.

Bentuk yang *kedua* menurut Galtung adalah kekerasan struktural. Bentuk kekerasan ini terwujud dalam sebuah konteks, sistem dan struktur. Kekerasan ini merupakan kekerasan yang melembaga dan disebut sebagai proses terjadinya kekerasan. Terakhir yang *ketiga* adalah kekerasan kultural. Kekerasan ini terwujud dalam kehidupan sosial budaya masyarakat yang merasuk pada sistem, sikap, nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Kekerasan ini terwujud dalam bentuk kebencian, ketakutan, rasisme dan lain sebagainya.

Pada kehidupan kelompok sosial terkecil yakni keluarga, tindak kekerasan pun juga tidak dapat dielakkan. Beberapa penelitian justru menyebutkan bahwa arena domestik menjadi sebuah arena yang “*aman*” dan bahkan seolah “*legal*” untuk melakukan tindak kekerasan. Kesemua tindakan tersebut selalu berdalih atas nama ranah privat dan pengabdian ataupun kepatuhan kepada pasangan. Sehingga tidak sedikit yang merasa tabu dan tidak berani menggugat ketika mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga. Dari sekian banyak bentuk kekerasan yang ada, dalam keluarga atau rumah tangga, bentuk kekerasan yang terjadi jika mengacu pada Galtung maka banyak yang mengalami tindak kekerasan langsung yang dialami oleh perempuan. Dari kekerasan langsung tersebut juga tidak menutup kemungkinan merambah pada kekerasan struktural dan kultural. Secara garis besar, kekerasan langsung yang terjadi pada rumah tangga dan dialami oleh perempuan dibedakan menjadi dua kategori, yakni kekerasan fisik dan non-fisik.

1. Kekerasan Non-Fisik

Bentuk kekerasan yang tidak berdampak langsung pada fisik tetapi dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan fisik yakni kekerasan non fisik. Beberapa ahli menyatakan bahwa kekerasan non fisik ini justru dinilai lebih berbahaya dan memiliki dampak yang relatif cukup lama. Kekerasan non fisik disini yaitu jenis kekerasan

yang tidak kasat mata. Artinya, tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli memperhatikan, karena tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya.

Secara garis besar, kekerasan non fisik ini dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan verbal dan kekerasan psikologis atau psikis. Kekerasan verbal merupakan kekerasan yang dilakukan melalui kata-kata. Sedangkan kekerasan psikis yaitu kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh seperti mendiamkan, merendahkan, mencibir, memelototi dan lain sebagainya.

Tindak KDRT yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat cenderung diawali dengan adanya tindak kekerasan nonfisik. Dalam kehidupan rumah tangga, berdasarkan data di lapangan informan menyatakan bahwa tidak sedikit awal mulanya terjadi kekerasan fisik dimulai dengan perkecokan. Perkecokan yang terjadi umumnya antara suami dan istri sering bertengkar bahkan melontarkan kata-kata kasar yang berujung pada rasa sakit hati atau bahkan dendam. Disini menunjukkan bahwasannya kekerasan verbal yang terjadi pada pasangan suami istri pada tahap lebih lanjut berdampak pada psikis keduanya. Dengan demikian kekerasan verbal akan berdampak atau merambah pada kekerasan psikis. Dari bentuk kekerasan inilah yang tidak jarang berujung pada tindak kekerasan fisik. Beberapa informan di lapangan mengemukakan bahwa ketika terjadi perkecokan, suaminya sering melontarkan kata-kata kasar, cacian, makian bahkan umpatan.

Dari kejadian tersebut, ketika perempuan tidak memiliki power untuk berontak, maka yang terjadi berbagai tindak kekerasanpun dialami. Perempuan berada pada posisi yang cukup sulit. Pada satu sisi konstruksi sosial memandang bahwa perempuan sebagai istri tidak boleh melawan suami. Pada sisi lain perempuan telah mengalami kekerasan yang berlapis. Ketika perempuan melakukan gugatan, maka lingkungan sekitar sering menilai atau memberi label negatif. Situasi seperti ini yang tidak sedikit membuat perempuan memilih diam ketika mengalami tindak KDRT.

2. Kekerasan Fisik

Kasus KDRT yang terjadi pada keluarga di pulau Bangka dan masyarakat luas pada umumnya berbentuk kekerasan langsung. Perempuan sebagai korban tidak sedikit yang mengalami kekerasan secara fisik bahkan hingga mengalami luka parah. Kekerasan fisik disini merupakan jenis kekerasan yang kasat mata. Artinya, siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Contohnya adalah: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang dan lain sebagainya. Data dari informan yang diambil, 72% dari perempuan yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (PA) di Kabupaten Bangka dilatar belakangi karena adanya tindak kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan (Anisa, 2016:47-49). Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan ketika berada pada ranah domestik pun juga cukup rentan mengalami tindak kekerasan yang bahkan bersumber dari orang terdekatnya.

Pemicu terjadinya tindak kekerasan fisik ini pun sangat bervariasi. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa faktor ekonomi, usia pernikahan dan lamanya pernikahan berpengaruh pada keharmonisan keluarga. Mulai dari hal-hal kecil lingkup rumah tangga yang terjadi pada sebagai pemicu tindak kekerasan. Peran perempuan dalam ranah domestik ini pun menjadi cukup rentan sebagai sumber terjadinya kekerasan. Perempuan dituntut untuk sempurna dalam menangani bergitu banyak peran atau pekerjaan yang ada dalam ranah domestik. Beban yang berlebih ini terkadang diabaikan dan tidak dipedulikan oleh suami sehingga suami cenderung tahunya semua beres.

E. Penutup

Perempuan dan tindak kekerasan seolah-olah menjadi dua hal yang tidak terpisahkan dalam fenomena kehidupan masyarakat. Perempuan senantiasa ditempatkan dan diberlakukan sebagai pihak yang seolah-olah lemah dan tidak mampu mandiri. Konstruksi sosial masyarakat yang

terus berkembang dinilai menjadi tidak adil bagi perempuan. Keberadaan perempuan senantiasa menjadi ancaman bagi perempuan itu sendiri.

Keluarga merupakan institusi sosial yang harapannya mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggotanya. Akan tetapi faktanya justru sebaliknya. Keberadaan perempuan dalam keluarga ini juga menjadu kekhawatiran ataupun masalah yang cukup pelik. Belakangan terakhir justru banyak tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan justru di dalam keluarga atau rumah tangganya sendiri. Tindakan kekerasan ini dipicu oleh beberapa faktor. Untuk di wilayah Pulau Bangka, tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang paling dominan dipicu oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi pun ini juga tidak tanpa sebab. Salah satu sebabnya adalah pernikahan yang terlampau dini. Hal ini sekaligus menjadi faktor penyebab kedua dari terjadinya KDRT. Melakukan pernikahan di usia yang relatif muda ini cenderung mempengaruhi kestabilan dalam rumah tangga, baik kestabilan emosi maupun ekonomi. Faktor yang ketiga yakni lamanya usia pernikahan. Usia pernikahan yang sudah lama ternyata berpengaruh bagi tindak KDRT. Pasangan yang sudah lama menikah dan mengalami masalah ekonomi (baik peningkatan maupun penurunan) cenderung menimbulkan masalah baru yakni keberadaan orang ketiga. Hal inilah yang kemudian menyulut perkecokan yang tidak jarang berakhir pada tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya arena privat atau ranah domestik yang dibebankan pada perempuan cenderung menjadi ranah terjadinya tindak kekerasan. Kekerasan yang dialami oleh perempuan ini sangat kompleks. Bentuknya sangat variatif. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua yakni kekerasan fisik dan non-fisik. Tindakan kekerasan inilah yang senantiasa menjadi pemicu munculnya gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan.

Daftar Pustaka

- Ayu, Radita Wulandari. 2013. *Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda dan Kaitannya Dengan Tindakan Perceraian Pada Masyarakat di Kota Pangkalpinang*. Skripsi Sosiologi: UBB.
- Artiana, Septi. 2015. *Kasus Perceraian di Babel meningkat*. <http://www.antarababel.com>
- Budiman, Arief. 2007. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Yayasan Obor: Jakarta.
- C.Ollenburger, Jane dan Helen A. Moore. *Sosiologi Wanita*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Choiriah, Muchlisa. 2016. *Indonesia Darurat Perceraian*. <https://www.merdeka.com>.
- Djannah, Fathul dkk. 2007. *Kekerasan Terhadap Istri*. LKIS: Yogyakarta.
- Hadiwardoyo, Purwa. 2006. *Tujuh Masalah Sosial Aktual: Sikap Gereja Katolik*. Kanisius: Yogyakarta.
- Ihromi. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Yayasan Obor: Jakarta.

Male victimization of women Covered in Society's Expectation in Razia Sultana Khan's *Seduction: The Perspective of Seven Building Tasks of Language*

NurvitaWijayanti

University of Bangka Belitung

Email: vita_janejana@yahoo.com

Abstract

Living in the society's expectation is like we are forced to do what they want us to do and it is in the circle of hell. At one time, we need society as the means to communicate and be a natural human being. At the other hands, its culture and custom destroy ourselves especially those who have sexist culture and custom. This Bangladesh short story titled Seduction is one of the representatives of society that has sexist culture. It tells about a young girl who is forced to marry at the young age and becomes the object of her husband's sexual trinket. What the writer wants to emphasize is the way the author named Razia Sultana Khan describe the treatment and the culture through Paul Gee's seven language blocks' perspective. The result of the discussion is that this short story, indeed, contains some of the seven building blocks that are significance, activities, identities, relationships, politics, connections and sign systems and knowledge.

Keywords: men victimization, seven building tasks of language, discourse analysis

A. Introduction

Society is the place where the people socialize and develop their culture. It means that they have the media to express the thoughts and apply them into rules. Rules become powerful when it is decided by the influential people in society and those influential people are the ones who

have the power and in major environment. The greatest majority is when it relates to the gender issue which is very obvious to see that women are the minority and powerless in most society. This paper shows how the Bangladeshi women become the object of sexual pleasure and how they are symbol of objects in post-colonialism era.

Women are the very centered of the object by gender issue. They receive the discrimination from the more dominant gender which is men. Women and girls in Bangladesh face some obstacles in their privacy because of the society and gender discrimination. Girls are considered to be the financial burden to the family therefore

many of them marry in the very young age.¹ Bangladesh has one of the highest rates of child marriage in the world. More than two-thirds of adolescent girls are married (of those aged 10-19). Nearly two in five girls aged 15-17 are married. The legal of marriage is 18 for girls, however three- quarters of women aged 20-49 were married before 18 (as cited in UNICEF and BBS, Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2006, Bangladesh 2007).

The object of this study is the short story titled *Seduction* by Razia Sultana Khan. It is the example of Asian literature that is written in English. The main character is Halima, a newlywed woman who has married in her sixteen. And, the main focus of the story is the woman victimization as the object of pleasure. It is explained through Khan's journal discussing the same issue in *The Good Wife and Other Tales*

1 Noorani, S. *Women and Girls in Bangladesh, issue – child marriage*.2007. Retrieved on October, 2014 from http://www/unicef.org/bangladesh/Women_and_girls_in_Bangladesh.pdf

of Seduction :

Though none of the stories are autobiographical, some of them have sprouted from seeds that the women in my family casually scattered in my path. My grandmother was a born story teller and when I was a child she told me an anecdote about the British enticing the population of their colony in Bengal by offering free tea to the local residents. The British had discovered that the areas in the northeastern parts of India were conducive to tea plantation, and though the best tea was shipped away to Britain, it was economically prudent to have a flourishing local market. The story “Seduction” originated from that².

The above quotation tells about the implicit exploitation that is occurred by the British colony. Though this story does not tell about the British colony, it clearly symbolizes the condition of the tea plantation time. British has conquered the tea plantation and it also becomes flourishing in the own native country and even become the drink for the Bangladesh people. They pay more for their own harvesting product.

What makes this story gender issue is that the way the author describes the main character who is a young married woman who has temptation to be easily seduced by the man outside her husband. Furthermore, this paper analyzes the problems through the seven building tasks of language by James Paul Gee. It uses a discourse analysis to analyze the story.

According to Gee, seven building tasks of language use are significance, activities, identities, relationship, politics, connections and sign system and knowledge. The significance is needed to use language to give them significant or to lessen their significance, to signal to others how we view their significance. The activities are what people say, do, and are in using language

enacts practices. At the same time, what people say, do, and are would have no meaning unless these practices already existed. The identities are when people often enact their identities by speaking or writing in such a way as to attribute a certain identity to others, an identity that people explicitly or implicitly compare or contrast to our own. People build identities for others as a way to build ones for them. The relationship is when people use language to signal what sort of relationship they have, want to have, or are trying to have with their listener(s), reader(s), or other people, groups, or institutions about whom they are communicating. People use language to build social relationships. The politics is when people use language to convey a perspective on the nature of the distribution of social goods, that is, to build a perspective on social goods. Social goods are potentially at stake any time we speak or write so as to state or imply that something or someone is “adequate,” “normal,” “good,” or “acceptable” (or the opposite) in some fashion important to some group in society or society as a whole. In connections, people use language to give certain things connected or relevant (or not) to other things, that is, to build connections or relevance. Things are not always inherently connected or relevant to each other. Often, people have to make such connections. Even when things seem inherently connected or relevant to each other, people can use language to break or mitigate such connections. And the last one is sign system and knowledge that people can use language to make certain sign systems and certain forms of knowledge and belief relevant or privileged, or not, in given situations, that is, to build privilege or prestige for one sign system or way of knowing over another.³

Those seven building tasks are under the discipline of discourse analysis which tries to analyze the use of language. It is not only about form but also the practice of language through context. Language not only defines the meaning

2 Khan, Razia Sultana. “The Good Wife and Other Tales of Seduction”.(2010) *ETD collection for University of Nebraska - Lincoln*. Paper AAI3355627. <http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI3355627>

3 Gee, James Paul. *An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method*. 2011. Routledge: Cambridge University Press.

of words, but through those words it can be used as the rule to practice what is written or spoken through language⁴ and it is part of how the language uses in the action. . In discourse analysis, language can be analyzed through the transcripts from interview, lyric, or movie, focus group, samples of conversation, published literature, media and web based material. In other words, discourse analysis studies how large chunks of language beyond the sentence level are organized, how the social transaction imposes a framework on discourse.⁵

One of the studies has analyzed Khan's *Seduction*. It is from Kartika Puspaningrum in her undergraduate thesis titled *The Portrayal of Women in Bangladesh in Razia Sultana Khan's Seduction* who studies about the condition of the women at that time using the literature approach. She uses the theory of characters to convey the main problem that is faced by Bangladeshi women. In this paper, the writer would like to study about discourse analysis of Khan's *Seduction* using Gee's seven building tasks of language to convey the men victimization of women especially Bangladeshi women.

Finding and Discussion

1. Significance

The Significance is shown through the quotation that shows the rule of women in Bangladesh who have to marry to a good and respectable family in their very young age.

"We've found you an excellent husband. The Mirs are well-to-do respectable family." Halima had been playing with cowry shells. "Listen when I talk to you!" The sharpness in her mother's voice made Halima stop and the cowries clattered onto the floor (p.120).

This quotation shows the beginning of the problem that even Halima as the main character is only sixteen and she still plays with her cowries. It shows that she is only teenager who

still needs her own time to grow before entering the marriage life.

Another problem that is faced by Halima is that she cannot go outside alone. She has to stay at home all day doing her chores.

Each morning after a quick bath from the family well, she rushed to the kitchen to help in the breakfast preparation....No matter how early Halima woke, her mother-in-law was always in the kitchen before her (p.120).

Her mother's words seemed a thing in the past now as Halima sat in front of the window looking out. This was her favourite pastime in the afternoon when the men returned to their work and Halima's mother-in-law retired to her room to take a long nap. Halima was on her own (p.121).

Based on these two quotations, Halima has to stay at home and does her chores as a good and obedient wife and daughter-in-law.

Then the seduction begins. It shows that Halima in her curiosity and bravery feels bored staying all day in her room or her husband's house.

"We always have the slats pointing downward; otherwise there's no privacy in this room". He (Halima's husband) had paused then added, "Ma is very particular about this" (p.121).

Gradually, the afternoon seduced her to it (window) and she noticed that when the slats pointed downward she could see the legs of people passing by her window (p.121).

An uncanny feeling of herself being watched made Halima look up. The man was staring at her! (p.123).

Halima is alone all afternoon in her room and there is a window that is only covered with slats pointing downward. It signifies that as a woman, Halima can be seduced by the curiosity what exists outside her room. It is part of her boredom staying all day inside the house. She can never

4 Ibid

5 Cutting, J. *Pragmatics and Discourse: A Resource Book for Students*. 2002. London: Routledge.

freely know the news outside.

The point is that there is a man who is a seller of tea to whom Halima takes an interest.

A jaunty smile touched his lips as he sneaked a look at Halima's window, then looked away. So when had the slats moved up! She lowered her eyes but let the slats be.... Halima turned pink under her *ghumta*, sure now that he had seen her behind the wooden slats. Her heart skipped a couple of beats as she imagined the boy coming with some message from the stranger (p.124).

Halima is happy because she can contact with outside world that in this case it is a man that makes her heart beat because of the curiosity.

The significance is not the only way to reveal the men victimization toward women. Above quotations are just the beginning the way the men see women as an object that can easily be seduced and fooled. There is more significance thing that is studied through the activities.

2. Activities

This part discusses the activities that show the men victimization toward women. The activity takes part in the way the seller of tea or *chai* has caught interest on Halima who never has freedom to go outside.

"*Bhabi*, the *Chai Bhai* said to give this to you." He (the boy) stood cradling the clay cup between his small hands.

"What is it?" Halima said in a flat tone. The stitches needed her full attention.

"It's a drink...sherbet."

"What?"

"It's called *chai*."

"Well?"

"He's giving it to everyone." Ahsan looked at her, a little puzzled at her attitude.

"But what is it?"

"He called it *chai*."

Halima still made no move to relieve him of the bowl.

"It's really good. It's something new they're

trying out." As the bearer of the exotic drink Ahsan felt bound to defend the concoction.

"How much?" Halima finally ventured in a low voice.

Ahsan's face cleared, "It's free, *Bhabi*! It's free!"

The activity of offering the *chai* for free for the very first time is of course something surprising for Halima for the one who offers is the man. The man is the one who caught staring at her through the slats and Halima lets him to stare back at her.

Halima approached the cup. Perhaps it tasted different when hot. As she held the cup between her curved hands she thought of the *Chaiwallah*'s fingers touching the same places, and felt her body turning warm.

With each passing day she became a little less timid and adjusted the slats as soon as the *Chaiwallah* came into view. She noticed how his eyes turned to her window and the corner of his mouth turned up in a smile while one eye brow shot up. ...she wondered what less as she focused on the *Chaiwallah*'s biceps. They bulged through the half sleeve of his safari shirt as he stood poised over the cup of tea with the heavy kettle in midair.

The activity shows the start of the way the man seduces Halima with his free *chai*. It is like the beginning of Halima is fooled because of her curiosity. Halima is not aware that she is the object of the seduction starting from the free *chai*.

"One paisa a cup. Hot *chai*. One paisa a cup." His (*Chaiwallah*)'s voice sent tentacles of awareness up her skin (p.129).

"She asked me if I could get her two cups of the *chai* and gave me five paisa coin. And well she might. When I asked Mizan how much I should pay, he said four paisa. That's two paisas a cup. Can you believe that? You can get four bananas for that! " (p.130).

Halima was silent. When Ahsan came that afternoon, she handed him four paisas (p. 130).

These quotations show the result of being seduced and Halima comes into the bait. She willingly gives the man money though she knows that the *chai* is not free anymore and that price is getting more expensive. She gets the temptation of having the pleasure from becoming the object of man's pleasure.

3. Identities

Identities show the one who has the authority and the one who is not. This short story tells us about the obvious difference chores between man and woman. The division usually oppresses women to stay at home all day. At first before the marriage, they have to stay at home. After marriage, they are also supposed to stay at home.

"Listen when I talk to you!" The sharpness in her mother's voice made Halima stop and the cowries clattered onto the floor (p.120).

"We always have the slats pointing downward; otherwise there's no privacy in this room". He (Halima's husband) had paused then added, "Ma is very particular about this" (p.121).

That's how her mother-in-law found her one day, eyes glued to the world outside, oblivious to the sound inside. The older woman gently adjusted the slats and said, "It works both ways, you know. When we look out they look in."(p.122).

Those quotations are from Halima's mother, Halima's husband and Halima's mother-in-law who are gained superiority toward Halima. Even her mother and mother-in-law as women have the authority to rule Halima's way of behaving. Husband's advice is like an order that Halima should be careful with the slats and she cannot peer the outside world through the slats.

4. Relationship

The way the older women have the position to rule the younger ones are being conveyed through this story. It might be the same case that the women are not aware of the gender discrimination rules therefore they obey every rule without questioning and even without complaining. The worst part is they do not understand what is going on with the issue.

"What am I telling you?" Shahina's voice rose with excitement. "They're giving it to whoever wants it, old and young, boy or girl..."

"But why?"

"I don't know." Shahina paused, and gave the question some consideration. Then she shrugged. "Who cares? As long as we don't have to pay for it."(p.126).

Shahina's statement that she does not know the reason why the *chai* is given to everybody and the way she says she is okay as long as it is free shows that she as a woman is not aware of being the object from the man.

5. Politics

The politics element in this story is obvious. It is also analyzed through Khan's *The Good Wife and Other Tales of Seduction*. She says that her grandmother was a born story teller and when she was a child she told her an anecdote about the British enticing the population of their colony in Bengal by offering free tea to the local residents. The British had discovered that the areas in the northeastern parts of India were conducive to tea plantation, and though the best tea was shipped away to Britain, it was economically prudent to have a flourishing local market. The story "Seduction" originated from that (Khan: 2007).

6. Connection

The connection happens when it comes to the comparison of the politics point. Bangladesh is symbolized through Halima as the representation of the woman who is forced to obey the rule in her

society that actually it has no benefit in woman gender. Her limit knowledge of outside world makes her feel curious and she is easily being used in the way the tea seller sells his product. At first it is free, but after that the price is unusually expensive.

The man as he is called *Chaiwallahis* the one who represents the British colony. The British colony takes the tea plantation and makes a good product of it free from Bangladesh and they sell it back to the Bangladesh people to gain more benefit.

7. Sign System and Knowledge

In this part, the writer wants to connect the sign system and knowledge with the short story. Through this short story, the readers can be aware of the existence of the colonial time in the past that is depicted through the way the man seduces woman. Moreover, the one being seduced is not aware at all that she becomes the object of pleasure.

The sign system in this story is the slats that are the means to connect to the outside world, the *chai* as the symbol of the product of the country gives the readers knowledge of the means of seduction so that the benefit can be gained double.

Conclusion

This short story has rich culture of society showing the way the people behaves in the name of society rules. In contrast, part of the society wants to break the rule silently through the curiosity of having known the outside world. The people that have to be ruled are mostly women and that is why it is also part of gender discrimination. It is how the rule only gives benefit to one of the genders. It becomes part of everyday life that even the disadvantage side; in this case women are not aware and easily accept that it is part of their destiny.

In every way, the women always become the object to gain the advantage. This short story has shown the readers the characteristics of women in Bangladesh that mostly curious and brave in particular way. It is as the result of being

abandoned not to go outside before and after marriage. In addition, the women are still under age and it can be concluded that they are still innocent and they do not know the consequence of being curious and brave into certain situation; in this case Halima's curiousness and bravery staring and being seduced by the *Chaiwallah*.

B. References

- Cutting, J. *Pragmatics and Discourse: A Resource Book for Students*. 2002. London: Routledge.
- Gee, James Paul. *An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method*. 2011. Routledge: Cambridge University Press.
- Noorani, S. *Women and Girls in Bangladesh, issue – child marriage*. 2010. Retrieved on October, 2014 from http://www/unicef.org/bangladesh/Women_and_girls_in_Bangladesh.pdf
- Puspaningrum, Kartika. *The Portrayal of Women in Bangladesh in Razia Sultana Khan's Seduction*. 2015. Yogyakarta: English Language Education Study Program, Department of Language and Arts Education, Faculty of Teachers Training and Education, Sanata Dharma University.
- Quayum, Mohammad A. *A Rainbow Feast: New Asian Short Stories*. 2010. Singapore: Marshall Cavendish.
- Khan, Razia Sultana. "The Good Wife and Other Tales of Seduction". (2007). *ETD collection for University of Nebraska - Lincoln*. Paper AAI3355627. <http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI3355627>